

BIOGRAFI DARIPADA SOEHARTO

Dari Kemusuk Hingga “Kudeta Camdessus”

"Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun."

(**Michel Camdessus**, *Mantan Direktur Eksekutif IMF*)

"Wah, Harto itu *koppig* (keras kepala) ..."

(**Soekarno**, *Presiden Pertama RI*)



A. Yogaswara

BIOGRAFI DARIPADA SOEHARTO

© *all rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

by: A. Yogaswara

215 hlm

ISBN: 979-222-217-0

Published by: MedPress Digital 2012

<http://www.media-pressindo.com>

medpressdigital@gmail.com

**Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana**

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait

Daftar Isi

1. "The Old Man Has Resigned"	7
Kejatuhan yang Tak Diduga	10
Mengapa Soeharto Mundur?	12
Keterlibatan Pihak Asing : "Kudeta Camdessus"	15
De Javu dalam Transisi Kekuasaan	17
2. Asal Usul yang Penuh Misteri	18
Masa Kecil Soeharto	19
Pindah ke Wuryantoro	21
Filosofi Hidup Soeharto	21
Tak Mampu Beli Sepatu	22
Bekerja di Bank Desa	23
Siapa Sesungguhnya Ibunda Soeharto	24
Benarkah Ayah Kandung Soeharto Seorang Pedagang China?	25
3. Mengabdikan pada Belanda dan Jepang	26
Menjadi Anggota KNIL	27
Menjadi Anggota PETA	29
Jadi Orang Kepercayaan Jepang	30
4. Di Awal Masa Revolusi	32
Merasa Mendapat "Panggilan"	32
Penyerbuan Kotabaru, 7 Oktober 1945	35
Bertahan di Banyubiru	36
Sebuah Titik Balik	37
5. Terlibat Peristiwa 3 Juli	39
Ketidakpuasan Militer	40
PM Sutan Syahrir Diculik	40
Menolak Perintah Presiden Soekarno	41
Julukan "Opsir Koppig"	42
Soeharto Bohong	43
Soedarsono Ditangkap	44
6. Agresi Militer Belanda I & Perjanjian Renville	46
Agresi Belanda Pertama	47
Kabinet Amir Syarifuddin Jatuh	48

Kekacauan Akibat Rencana "Re-Ra"	49
7. Menikah di Suasana Perang	51
Pertemuan Kembali dengan Calon Istri	53
Siti Hartinah, "Sumber Kekuatan" Soeharto?	54
8. Pemberontakan Madiun	57
Terbentuknya FDR	58
PKI Menguasai Madiun	59
Soeharto Bertemu Muso	60
Aksi Pembersihan	61
9. Agresi Militer II Belanda	62
Serangan Fajar di Maguwo	62
Yogya Jatuh ke Tangan Belanda	63
Nasution Menyalahkan Soeharto	64
Tutut Lahir	65
10. Serangan Umum 1 Maret 1949	67
Soeharto Mengaku Sebagai Penggagas SU 1 Maret 1949	68
Jalannya Serangan	70
Siapa Penggagas SU 1 Maret 1949 Sebenarnya?	71
11. Dampak Serangan Umum 1 Maret 1949	73
Menolak Penyerahan Kekuasaan Oleh Belanda	74
Menyamar untuk Bertemu Sultan	75
Membujuk Jenderal Soedirman Kembali ke Yogyakarta	76
12. Menumpas Pemberontakan Andi Aziz	79
Pemberontakan Andi Aziz	80
Insiden Penembakan Letnan Yan Ekel	81
Kekhawatiran Soeharto tentang Kahar Muzakkar	83
13. Ekses Rasionalisasi Tentara yang Berkepanjangan	85
Masalah Pelik Rasionalisasi Tentara	86
Mengejar Pemberontak ke Klaten	87
Peristiwa 17 Oktober 1952	88
Menjadi Atasan Untung di Solo	90
14. Memegang Komando	92
Divisi Diponegoro	92
Mempertahankan Posisi Netral	93
Mengamati Kegiatan-kegiatan Komunis	94
Tersangkut Masalah Korupsi	95
"Dibuang" ke SSKAD	97
15. Panglima Komando Mandala	99
Soeharto Merasa Frustasi	100
Panglima Komando Mandala	101
Mendapat Promosi	102
Rencana Operasi Militer	103
Lahirnya Tommy	105

16. Konfrontasi Setengah Hati	107
Menjadi Pangkostrad	108
Soekarno: "Indonesia Telah Dikentuti"	109
Dari Komando SIAGA ke KOLAGA	111
17. Menjelang Pertumpahan Darah	113
Soekarno Terlalu <i>Overconfident</i>	113
Ekspansi PKI	114
Kontroversi Angkatan Kelima	115
"Dokumen Gilchrist" dan Isu Dewan Jenderal	117
Dubes AS Diganti " <i>Marshall of CIA</i> "	120
Soekarno Jatuh Pingsan	119
18. Kesaksian Soeharto tentang Gerakan 30 September	121
Dikunjungi Kolonel Latief	121
Firasat Soeharto	122
Mengamankan Monas	123
Mengonsolidasikan Angkatan-angkatan	124
Presiden Pergi ke Halim	126
Antara Soeharto dan Pranoto	127
Pengumuman Soeharto	128
Soeharto Menolak Keinginan Soekarno	130
RPKAD Menyerbu Halim	131
Soeharto Menghadap Presiden	132
19. Apakah Soeharto Terlibat G 30 S?	134
Letkol Untung yang Naif	135
Latief, "Tukang Pukul" Soeharto	136
Supardjo dan Sjam	138
Mata Rantai yang Putus	140
Benarkah Ada Penyiksaan Sadis?	141
Kejanggalan Demi Kejanggalan	142
20. Epilog G 30 S	144
Balas Dendam yang Brutal	145
Sidang Kabinet Pertama Pasca G 30 S	146
Pembantaian Terus Berlanjut	147
Aidit Tertangkap dan Ditembak Mati	148
Mahasiswa Bergerak	151
Soekarno Melawan	150
21. Supersemar	152
Reaksi Soekarno	152
Sidang Kabinet di Bawah Ancaman	153
Nota Sabur	154
Tiga Jenderal Pergi ke Bogor	156
Kesaksian yang Berbeda-beda	157
Detik-detik Penyusunan Supersemar	158

22. Menjadi Presiden RI Kedua	161
Supersemar	161
Reaksi Soekarno	163
“Mata Pedang Akan Tumpul Kalau Terlalu Sering Digunakan”	164
Membuat Soekarno Tersudut	165
Menurut Elson, Soeharto Berbohong	166
Membentuk Kabinet Militeristik	168
Perlawanan Terakhir Soekarno	169
Soekarno Menyerah	170
Soeharto Naik Tahta	171
23. 32 Tahun di Puncak Kekuasaan	182
Aspri dan Opsus	183
Menyingkirkan Nasution	184
Menjinakkan Partai dan Memilih Golkar Sebagai Kendaraan	187
Bangkrutnya Pertamina	190
Peristiwa Malari	192
Petisi 50	195
Penembak Misterius (Petrus)	197
Peristiwa Tanjung Priok	198
Benny Moerdani Dipinggirkan	199
Bisnis Keluarga Cendana	201
Yayasan-yayasan Soeharto	204
Sabtu Kelabu 27 Juli 1996	205
24. Jatuhnya Sang “Raja”	207
Reformasi 1998	207
Para Loyalis Meninggalkan Soeharto	210
Inpres No. 16 Tahun 1998: Serupa dengan Supersemar?	211
Pasca-Soeharto Mundur	213
Daftar Pustaka	215

- 1 -

"The Old Man Has Resigned!"

*"Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa
Presiden Soeharto turun."*

- **Michel Camdessus**, Mantan Direktur Eksekutif IMF -

DENGAN benak penuh tanya, mata jutaan masyarakat Indonesia melalui pesawat televisi menantikan sebuah pengumuman penting yang hendak disampaikan oleh Presiden Soeharto dari Istana Merdeka, Jakarta. Sebagian dari mereka tak akan mengira bahwa pada hari itu, tanggal 21 Mei 1998, mereka akan menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang akan tercatat selamanya dalam sejarah bangsa Indonesia.

Tepat pukul 09.00 pagi, diiringi oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie serta beberapa pejabat negara lainnya, Presiden Soeharto mulai membacakan naskah pidatonya. Dari sorot kamera yang menerpa wajah mereka yang hadir saat itu di *Credentials Room*, Istana Merdeka, di antaranya para tokoh masyarakat terkemuka seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholish Madjid (Cak Nur), serta Emha Ainun Najib (Cak Nun), tampak tersirat adanya sebuah ketegangan yang tertahan.

Ketegangan seketika berubah menjadi keterkejutan manakala Presiden Soeharto, dengan suara yang tak berubah, datar seperti biasa, sampai pada kalimat,

*" ... dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan **berhenti** dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998."*

Jenderal tua yang selama 32 tahun berdiri kokoh di puncak tampuk pemerintahan negara Indonesia, telah mengucapkan kata "BERHENTI", satu kata sakral yang mungkin telah sangat lama dinanti dengan penuh keputusan oleh para musuh-musuh politiknya. Ribuan bahkan jutaan rakyat turun ke jalan merayakan akhir sebuah era yang dulu dikenal dengan nama Orde Baru. Para mahasiswa yang selama sehari-hari menduduki Gedung MPR/DPR melakukan sujud syukur. Tak urung airmata kebahagiaan menetes dari para demonstran putri. Seluruh stasiun televisi berlomba meliput ekspresi kegembiraan dari setiap penjuru pelosok negeri. Sebuah kenyataan yang menguak ironi, betapa seseorang yang dulunya dianggap pahlawan pada masa awal pemerintahannya, kini telah berubah menjadi musuh nomor satu di negeri yang dipimpinnya.

Krisis yang Memaksa Soeharto Terjungkal

Krisis ekonomi yang tak kunjung lalu membuat rakyat marah dan kecewa terhadap pemerintahan Soeharto. Bisnis keluarga Cendana dan kroni Soeharto semakin disorot karena dianggap menjadi salah satu penyebab panjangnya masa krisis ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan. Pada akhirnya, guncangan perekonomian dunia telah menggiring Soeharto memasuki krisis politik.

Namun Soeharto kembali menunjukkan sifat keras kepalanya. Di saat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintahan Orde Baru digugat oleh banyak pihak, ia malah memasukkan nama

putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan pengusaha yang dekat dengan Cendana, Bob Hasan, dalam susunan Kabinet Pembangunan VII.

Sifat suka “menantang” juga ditunjukkan oleh Soeharto saat ia memutuskan pergi melawat ke Kairo, Mesir, justru di saat keadaan keamanan internal negaranya sedang dalam keadaan tidak stabil. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Bahkan pada tanggal 4 Mei 1998, pecah kerusuhan dan penjarahan di Medan, yang selanjutnya menjalar ke beberapa daerah di Indonesia. Ada kesan Soeharto ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa stabilitas nasional masih berada di bawah kendalinya. Tak ada ketakutan dalam dirinya akan terjadi kudeta saat ia sedang berada di luar negeri. Bagi sebagian pengamat, kepercayaan diri yang besar ini dimungkinkan karena dirinya masih merasa yakin memperoleh dukungan yang bulat dari pihak militer.

Kali ini perhitungan Soeharto meleset. Selama dirinya berada di Kairo, telah terjadi rentetan peristiwa penting (hanya dalam hitungan hari) yang akhirnya mengantarkannya keluar dari kursi kekuasaan. Tanggal 12 Mei, 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang berdemo tewas diterjang peluru aparat militer. Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan (juga pembantaian terhadap etnis Cina) meluas dan hampir menjangkau seluruh wilayah RI. Ada kabar yang mengatakan, di saat-saat genting seperti itu digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk melakukan *move* untuk menggencarkan tuntutan agar Soeharto mundur dari pemerintahannya. Bahkan terjadi konflik yang meruncing di antara faksi-faksi dalam tubuh militer. Reformasi adalah isu utama dalam negeri saat itu.

Soeharto memutuskan untuk mempersingkat kunjungan luar negerinya dan kembali dari Kairo pada tanggal 15 Mei 1998. Ia mencoba melakukan sebuah perbaikan dengan berjanji akan *reshuffle* kabinet menjadi Kabinet Reformasi (sebuah sikap *salah kaprah* yang disengaja mengingat apa yang dikendaki oleh rakyat adalah sebuah reformasi tanpa adanya keterlibatan Soeharto dalam

pemerintahan). Tapi waktu tak berpihak pada Soeharto. Sudah terlambat untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Satu per satu orang kepercayaannya meninggalkan dirinya. Sebanyak 14 menteri, termasuk Ginanjar Kartasasmita, salah satu orang dekat Soeharto, menolak terlibat dalam Kabinet Reformasi. Tiba-tiba saja nasib berputar 180 derajat. Semua orang ramai-ramai menarik dukungannya atas Soeharto. Sepertinya, di Indonesia (saat itu) tak ada lagi pihak yang bersedia menyangga kursi goyah Soeharto. Bahkan Ketua MPR/DPR Harmoko yang sudah menjadi “pembantunya” yang paling setia selama bertahun-tahun sekalipun, ikut-ikutan memintanya mundur.

Walaupun dalam kondisi yang sudah terdesak sedemikian hebat, tak ada pihak yang berani menjamin runtuhnya pemerintahan Soeharto. Namun angin harapan berhembus saat tanggal 20 Mei 1998 malam, dalam jumpa pers yang diadakan di kediaman Malik Fadjar, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais – salah satu tokoh reformasi yang mengancam akan mengerahkan *people power* untuk mendongkel Soeharto dari kursi kekuasaan – memberikan keterangan bahwa seseorang di pusat pemerintahan (belakangan diketahui bahwa orang itu adalah Yusril Ihza Mahendra) telah berkata kepadanya, “Mas Amien, *most probably, the old man has resigned.*”

Esoknya, kabar itu menjadi kenyataan. Presiden Soeharto yang sedianya akan membacakan susunan Kabinet Reformasi ternyata malah membacakan pidato pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah selesai membacakan pidatonya, Mahkamah Agung lalu mengangkat B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Sejak saat itu, berakhir pula masa emas Soeharto.

Kejatuhan yang Tak Diduga

Walaupun sebelumnya telah muncul desas-desus mengenai rencana mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan, tak

ada pihak yang berani berspekulasi menebak arah pikiran sosok yang dikenal ahli dalam mengatur strategi ini. Dengan memandang berbagai pukulan yang menghantam pemerintahannya, dimulai dari krisis ekonomi yang pada akhirnya berubah menjadi krisis politik, blunder-blunder politik di akhir masa jabatannya hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah yang diwarnai oleh tumpahnya darah 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti, seharusnya tak ada keraguan dalam meramalkan keruntuhan “rezim” Orde Baru.

Namun Soeharto adalah Soeharto, sebuah pribadi yang dikenal keras dan pantang menyerah. Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, apalagi oleh desakan pihak lain, sepertinya mustahil dilakukan oleh Soeharto. Mereka yang mengenal Pak Harto, pasti memahami bahwa dengan kekerasan hati yang dimilikinya, tak ada pihak lain yang bisa menggoyang kursi kekuasaannya, kecuali dirinya sendiri.

Bahkan kabarnya Soekarno, Presiden Pertama RI, sempat menjulukinya dengan sebutan *koppig* (keras kepala). Hal yang sama pernah disampaikan oleh Abdul Gafur beberapa bulan sebelum Soeharto resmi diangkat menjadi presiden untuk ketujuh kalinya pada tanggal 11 Maret 1998. Saat itu Gafur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (DPP Golkar) mengatakan, “Tak ada satu fraksi pun yang bisa memaksa Presiden Soeharto untuk naik ataupun turun.” Probosutedjo, pengusaha yang juga adik tiri Soeharto, dalam momen yang hampir bersamaan mengungkapkan bahwa “Sulit membayangkan jika Presiden Soeharto menyatakan mundur secara tiba-tiba.”

Perilaku serta tindak-tanduk Soeharto selama menjabat sebagai presiden, sepertinya merupakan penegasan kembali atas kebenaran penilaian sebagian orang tentang kekerasan hati (juga kepala) orang yang dulu dijuluki “Bapak Pembangunan” ini. Oleh R.E. Elson, profesor dari University of Queensland, Australia yang juga penulis buku *Suharto: A Political Biography*, ia dianggap sebagai

sosok keras yang tak mengenal kata ampun. Di balik penampilan dan senyum ramahnya, Soeharto menyimpan kekerasan sikap yang sanggup menyingkirkan musuh-musuhnya keluar dari panggung politik selamanya. Meskipun dianggap bukan kreatif, Soeharto dinilai pandai dalam memanfaatkan kesempatan dan mengarahkannya menjadi sebuah keuntungan.

Dengan karakter yang demikian kuat, tak ada satu pun pihak yang berani meramalkan kejatuhan Soeharto. Hingga akhirnya saat itu tiba. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, apa yang sesungguhnya membuat Soeharto lengser?

Mengapa Soeharto Mundur?

Pengunduran diri Soeharto hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sama ketika dulu ia naik ke kursi kepresidenan dengan penuh teka-teki atas taktik serta strategi yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi Presiden Kedua Republik Indonesia menggantikan Soekarno, kini kepergiannya dari kursi nomor satu negara ini begitu menggoda benak setiap insan untuk dikaji. Apa (atau siapa) yang membuat Jenderal yang *koppig* itu memutuskan untuk mengundurkan diri? Benarkah Soeharto yang selama ini dikenal alot dan pandai bersiasat, menyerah begitu saja tanpa perlawanan atas desakan yang bertubi-tubi datang menuntut pengunduran dirinya?

Awal petaka bagi Soeharto dimulai pada tanggal 8 Juli 1997 ketika krisis ekonomi yang menghantam Thailand, menular ke Indonesia. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika merosot tajam dari Rp 2.500,00 menjadi Rp 17.000,00 per dolar. Terjadi kepanikan nasional. Kemajuan ekonomi yang selama ini menjadi alat legitimasi kesuksesan Soeharto, tiba-tiba saja berada dalam keadaan bahaya.

Indonesia yang dulu pernah dijuluki “Macan Asia” karena keperkasaan negeri ini di bidang ekonomi kini terpuruk dihantam

badai yang tak pernah terbayang sebelumnya. Padahal sejarah pertumbuhan pada awal era Orde Baru pernah mencatat sejumlah prestasi. Ekonom Emil Salim pernah menulis bahwa indeks biaya hidup di Indonesia antara tahun 1960 dan 1966 naik 438 kali lipat. Pemerintah saat itu menggulirkan antara lain kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyelamatkan ekonomi. Sebagai contoh, sebut saja Paket 10 Februari dan 28 Juli 1967. Saat itu pemerintah membuka diri untuk penanaman modal asing secara bertahap. Dengan cara itu, inflasi bisa dijinakkan perlahan-lahan. Dari sekitar angka 650 persen (1966) hingga terkendali di posisi 13 persen (1969).

Prestasi itu seperti nyaris tak berbekas. Menjelang turunnya Soeharto, pemerintah Indonesia membutuhkan utang baru sebesar US\$ 43 miliar (kini setara Rp 387 triliun) dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyangga nilai rupiah. Kepanikan pemerintah tercermin dari ketidaktegasan dalam menyikapinya solusi masalah ekonomi ini. Meskipun bantuan dari IMF sudah disetujui tanggal 31 Oktober 1997, - yang pada akhirnya ditandatangani Presiden Soeharto tanggal 15 Januari 1998 - tiba-tiba saja pemerintah melontarkan sebuah gagasan kontroversial yang disponsori oleh *Currency Board System* (CBS), sebuah sistem dewan mata uang yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia mematok nilai Rp 9.500,00 pada dolar Amerika. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi hebat dari luar negeri. Kanselir Jerman, Helmut Kohl sampai merasa perlu untuk mengirim Menteri Keuangannya, Theo Waigel, dan Presiden Amerika, Bill Clinton juga mengirim Walter Mondale untuk membahas masalah ini. Aksi Soeharto yang bersikeras pada gagasan CBS membuat IMF *ngambek* dan mengancam akan mencabut bantuan 43 miliar dolar-nya.

Belakangan diketahui bahwa penyebab sikap *ngotot* Soeharto mendengarkan gagasan CBS adalah sebagai upaya dirinya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai orang nomor satu di Indonesia (beberapa pendapat juga mengartikan sikap ini sebagai upaya Soeharto untuk menyelamatkan kepentingan bisnis

miliknya dan juga milik para kroninya). Seorang pakar CBS asal Amerika, Steve Hanke, yang datang ke Indonesia berkali-kali mengingatkan Soeharto agar tak mempercayai IMF. Menurut Hanke, IMF merasa khawatir gagasan CBS bakal sukses diterapkan di Indonesia. Hal ini bisa juga berarti tamatnya misi IMF di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Hanke, Washington punya kepentingan agar krisis terus berlangsung di Indonesia sehingga pada akhirnya Soeharto dapat di-*lengser*-kan secara paksa.

Memilih untuk percaya pada informasi ini, Soeharto mengangkat Steve Hanke sebagai penasihat khusus (ia bahkan sempat menyebut CBS dalam pidatonya di depan Sidang Umum MPR 1 Maret 1998). Namun apa daya, utang terus melemahkan posisi Soeharto. Soeharto tidak mungkin mengacuhkan desakan IMF. Bagaimanapun dia membutuhkan pencairan secepatnya dana bantuan sebesar 43 miliar dolar dari IMF. Kekacauan kondisi ekonomi di Indonesia ini memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Amerika. Bahkan sebuah tajuk *The Washington Post* menulis bahwa kesungguhan ultimatum IMF terhadap Soeharto itu merupakan masalah kedua terbesar bagi Gedung Putih setelah Saddam Hussein.

Namun masalah terbesar bagi Soeharto justru datang dari dalam negeri. Krisis ekonomi yang berlarut-larut menyebabkan tergerusnya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahannya. Perlahan-lahan, krisis ekonomi menjalar menjadi krisis kepercayaan. Naiknya harga meletupkan unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah. Keadaan semakin bertambah parah ketika pada bulan Desember, tubuh tua Soeharto mulai goyah dihantam masalah yang tanpa henti. Soeharto terkena stroke ringan. Tak ayal muncul banyak spekulasi terhadap pergantian pucuk pemerintahan di Indonesia. Orang mulai bertanya-tanya, apakah ini akhir dari Soeharto?

Di saat seperti itu, Soeharto kembali menunjukkan ketahanan dirinya dalam menghadapi setiap krisis yang datang menerpa. Untuk mendongkrak popularitas dirinya menjelang Sidang

Umum MPR pada bulan Maret, Soeharto melakukan *come back* populis dengan menandatangani perjanjian dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998. Untuk sementara, gejolak dalam negeri dapat diredam oleh harapan akan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia. Walaupun bulan Januari dan Februari di tahun itu masih diwarnai berbagai unjuk rasa mahasiswa, namun Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Maret dapat berjalan dengan tenang meskipun situasi politik tetap mencekam.

Keterlibatan Pihak Asing: “Kudeta Camdessus”

Mundurnya Soeharto dari tampuk pemerintahan Indonesia setelah 32 tahun berkuasa, telah memunculkan banyak teori yang mencoba mencari tahu penyebab jatuhnya orang kuat itu dari singgasana kepresidenannya. Kebanyakan pengamat Barat memang lebih memilih menggunakan istilah “Jatuhnya Soeharto” daripada menggunakan istilah “Mundurnya Soeharto” atau “Lengsernya Soeharto”. Menurut Stefan Eklof, pengamat politik dari Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), Denmark, dalam bukunya yang berjudul *Indonesian Politics in Crisis: The Fall of Soeharto, 1996-1998*, runtuhnya ekonomi Indonesia menjadi pendorong berkembangnya krisis politik secara penuh. Apalagi, Indonesia sudah sejak lama berada di tengah krisis legitimasi politik ketika krisis ekonomi melanda pada pertengahan 1997.

Tanda tanya besar yang muncul dari jatuhnya Soeharto ini adalah, adakah skenario tingkat tinggi dari pihak asing untuk menjatuhkan Soeharto?

Bukan menjadi rahasia lagi, pada tahun-tahun akhir pemerintahannya, Soeharto telah tumbuh menjadi pribadi yang keras terhadap pihak-pihak asing (termasuk Amerika) yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, di mana Soeharto merasa tak ada satu tempat pun bagi pihak luar mendiktekan cara menyelesaikan konflik dan masalah di Indonesia. Oleh karena itu, pihak Amerika lalu menetapkan embargo militer kepada Indonesia. Satu

hal yang kemudian menjadi alasan bagi Soeharto untuk mengalihkan pandangannya pada Rusia sebagai pemasok kebutuhan militer Indonesia.

Dengan melihat fakta ini, ditambah informasi yang diperoleh dari Steve Hanke, maka wajar bila kemudian muncul dugaan-dugaan bahwa pihak asing ikut bermain dalam melengserkan Soeharto. Ada banyak wacana yang mengatakan bahwa CIA turut andil mengatur skema menjatuhkan Soeharto untuk melindungi kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Namun seperti halnya yang terjadi pada Soekarno, hal ini tampaknya akan sulit dibuktikan mengingat rapinya setiap operasi yang dimainkan oleh para agen Amerika ini. Hal yang mungkin agak jelas adalah pemerintah Amerika Serikat turut memberikan tekanan kepada Soeharto agar segera turun dari takhtanya. Melalui Menteri Luar Negeri-nya, Madeleine Albright lewat pernyataan di CNN dalam *breaking news* 10 jam sebelum Soeharto mundur, Amerika menyatakan langkah mundurnya Soeharto semestinya diambil untuk memberi jalan bagi transisi demokratis di Indonesia.

Pernyataan ini tentu saja mengejutkan bila mengingat bahwa rezim Soeharto dulunya adalah “kawan dekat” AS juga. Ada kabar bahwa malam sebelum Soeharto mundur, secara personal Albright telah menghubungi Soeharto dan meminta kepadanya untuk segera mengundurkan diri. Pihak Gedung Putih langsung membantah kebenaran kabar ini. Melalui juru bicaranya, Gedung Putih menyatakan secara resmi bahwa tak ada upaya kontak langsung dari pemerintah Amerika kepada Soeharto selama dua hari menjelang mundurnya Soeharto. Satu-satunya kontak yang dilakukan adalah dari Duta Besar Amerika kepada Menteri Pertahanan RI dan pejabat senior militer lainnya untuk meminta agar pihak ABRI secara maksimal menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Berbeda dengan pemerintah Amerika yang terkesan masih “malu-malu” mengakui keterlibatannya dalam melengserkan Soe-

harto, Direktur Eksekutif IMF, Michel Camdessus, tidak membantah adanya permainan IMF untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam wawancaranya dengan *New York Times*, bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia. “Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Sayang memang tidak disebutkan secara detail mengapa IMF ingin menjatuhkan Soeharto. Tapi, yang jelas, masuknya IMF ke Indonesia memang telah membuka pintu lebar bagi masuknya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Tak salah bila prosesi penandatanganan perjanjian dengan IMF (waktu Soeharto sedang menandatangani surat perjanjian, Camdessus secara tidak sengaja menunjukkan gesture melipat tangan di depan dada, sebuah gesture yang kerap ditunjukkan oleh orang-orang dalam kondisi superior) dianggap sebagai simbolisasi kekalahan Soeharto sekaligus memantapkan kemenangan “Kudeta Camdessus”.

***De Javu* dalam Transisi Kekuasaan**

Menyimak kronologi mundurnya Soeharto seperti menghadirkan *de javu* dalam kehidupan politik di Indonesia. Jika dulu Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dengan didahului oleh terjadinya krisis ekonomi, lalu diikuti dengan desas-desus terjadinya konflik dalam tubuh militer yang dipicu oleh isu kesehatan Soekarno, dengan diwarnai aksi demonstrasi yang menumpahkan darah mahasiswa bahkan juga rumor keterlibatan pihak asing dalam sebuah skenario politik, hingga akhirnya muncul kisah Supersemar yang menjadi alat legitimasi Soeharto dalam melengserkan Soekarno, maka kini pola yang sama nyaris berulang. Kesamaan pola ini tentu saja membangkitkan kecurigaan, adakah pihak yang bermain dalam merekayasa naik turunnya presiden pertama dan kedua Indonesia? Ataukah ini hanyalah sebuah karma dari dosa-dosa politik Soeharto di masa lalu?

- 2 -

Asal Usul yang Penuh Misteri

“Soe” berarti lebih baik dan “Harto” berarti kekayaan

- **Retnowati Abdulgani-Knapp**, penulis *Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President* -

SEPERTI halnya saat ia naik dan turun dari tampuk pemerintahan RI, asal usul Soeharto juga masih menyisakan banyak pertanyaan. Pada tahun 1974, Soeharto amat murka mengetahui majalah *POP*, salah satu majalah yang beredar di Jakarta, telah memuat silsilah “yang tidak benar” tentang dirinya.

Dalam artikel itu, dikatakan bahwa Soeharto adalah anak dari Padmodipuro, seorang ningrat keturunan Hamengkubuwono II (Sultan Yogyakarta) yang telah membuangnya bersama ibunya kepada seorang penduduk desa Kertorejo. Apa yang menyebabkan dibuangnya Soeharto ini, dimungkinkan karena ayahnya harus menikahi anak dari seorang pejabat yang berpengaruh saat itu (Elson, 2001: 29).

Pemuatan artikel itu bagi Soeharto, seperti yang tertuang dalam otobiografinya, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, berarti sebuah “kesempatan yang baik untuk pihak yang melakukan subversi dalam melaksanakan gerpolnya, dan dapat mening-

katkan gangguan stabilitas nasional". Dengan alasan itu, Soeharto merasa perlu adanya klarifikasi dengan mengundang wartawan dalam dan luar negeri, bertempat di Bina Graha, untuk menjelaskan silsilah keluarga yang sebenarnya.

Sebagai seorang kepala negara, besarnya kepedulian Soeharto kepada masalah kesimpang-siuran asal usul ini setidaknya menunjukkan prinsip yang dianut. Mungkin saja bagi Soeharto, seperti layaknya penguasa-penguasa Jawa di masa lalu, asal usul seorang raja dapat menjadi tempat sandaran legitimasi bagi kelanggengan kursi kekuasaan. Mengotak-atik asal usul seorang raja, berarti pula mengancam kelangsungan kekuasaan sang raja.

Masa Kecil Soeharto

Menurut Soeharto, ia berasal dari keluarga tak mampu di desa Kemusuk, Argomulyo, Godean, sebelah barat kota Yogyakarta. Dalam beberapa kesempatan, tampak jelas bahwa ia sangat membanggakan sejarah hidupnya, di mana pada waktu kecil ia telah mengalami kehidupan yang serba pahit hingga akhirnya berhasil menapaki anak tangga menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Ayah Soeharto bernama Kertosudiro, petugas *ulu-ulu*, sebutan bagi aparat desa yang bertugas mengatur pembagian air. Oleh karena jabatannya itu, ayahnya memperoleh tanah *lungguh* untuk dikelola. Ayahnya ini pulalah yang telah memberi nama Soeharto kepadanya. "Soe" berarti lebih baik dan "Harto" berarti kekayaan (Retnowati Abdulgani-Knapp, 2007: 20).

Kertosudiro yang menyandang status duda beranak dua kemudian menikahi Sukirah. Dari wanita inilah kemudian lahir Soeharto. Tak lama setelah melahirkan Soeharto, Sukirah dan Kertosudiro bercerai. Sukirah kemudian menikah lagi dengan Atmopawiro dan memiliki tujuh anak (salah satunya adalah Probosutedjo, yang kelak dikenal sebagai konglomerat kontroversial di

masa Orde Baru). Sedang Kertosudiro juga menikah lagi dan memperoleh empat anak.

"Den Bagus Tahi Mambu"

Belum genap berumur 40 hari, Soeharto dibawa ke rumah adik kakeknya, Kromodiryo, seorang dukun bayi yang juga telah membantu kelahiran Soeharto. Tampaknya, hanya beberapa hari setelah Soeharto lahir, ibunya jatuh sakit sehingga tak dapat menyusui (mungkin saja ada alasan lain yang menyebabkan Soeharto akhirnya harus tinggal di rumah Kromodiryo lebih lama, yaitu selama kurang lebih empat tahun).

Di rumah Mbah Kromo, demikian Soeharto memanggil Kromodiryo, ia menemukan kehangatan kasih sayang. Di rumah inilah Soeharto belajar berdiri dan berjalan. Suatu ketika ia mengenang, sering diajak pergi ke sawah, bermain di atas lumpur dan mencari belut, makanan kesukaannya.

Ketika berumur empat tahun, Soeharto diambil kembali oleh Sukirah dan diajak tinggal bersama Atmopawiro, ayah tirinya. Pada masa ini ia bercerita, sekali waktu ayahnya datang berkunjung. Soeharto sangat girang ketika suatu ketika ayahnya datang membawa seekor kambing untuknya.

Di masa-masa itu, Soeharto mulai merasakan pahitnya hidup. Ia bercerita, saat itu kondisi ekonomi keluarganya tidak begitu baik sehingga ia hanya mengenakan celana hitam selutut tanpa baju. Soeharto kecil sangat mendambakan baju. Oleh karena itu ia sangat senang ketika kakek buyutnya dari keluarga ibu, Mbah Notosudiro, memanggilnya dan menyuruhnya memakai *sorjan* (kemeja jawa) buatan sendiri. Namun ternyata *sorjan* itu bukan untuk Soeharto melainkan untuk kakaknya, Darsono. Rasa sedih dan hina membekas di hati Soeharto.

Oleh ibunya, Soeharto yang beranjak besar disekolahkan di Desa Puluhan, Godean. Namun oleh karena ibu dan ayah tirinya pindah ke daerah Kemusuk Kidul, maka Soeharto pun pindah

sekolah ke desa Pedes. Pada masa sekolah ini ia teringat akan sebutan mengejek yang diberikan seorang temannya, *Den Bagus Tahi Mambu*.

Pindah ke Wuryantoro

Kertosudiro yang merasa khawatir dengan masa depan anaknya, akhirnya menitipkan Soeharto pada keluarga Prawirowiharjo (suami dari adik Kertosudiro) di Wuryantoro. Saat menitipkan Soeharto, Kertosudiro berpesan kepada adiknya agar Soeharto dibimbing dan diberi pendidikan yang baik.

Soeharto sangat senang tinggal di rumah bibinya. Meskipun bukan anak kandung (keluarga Prawirowiharjo memiliki sembilan anak, salah seorang di antaranya adalah Sudwikatmono, pengusaha besar di masa Orde Baru), ia merasa diperlakukan sama dengan anak-anak yang lain. Kehidupan Prawirowiharjo sebagai seorang mantri tani membuatnya merasakan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pada masa ini, Soeharto banyak belajar tentang segala sesuatu, dari masalah pertanian hingga keagamaan.

Prawirowiharjo adalah seorang mantri tani yang berdedikasi. Dari mengikutinya, Soeharto menjadi tahu banyak hal mengenai kegiatan bercocok tanam. Sebuah kegiatan yang pada akhirnya menjadi kegemaran Soeharto hingga usia tua. Diakui pula, masa-masa ini telah membangkitkan rasa simpati yang mendalam terhadap para petani.

Filosofi Hidup Soeharto

Selain ilmu pertanian, kehidupan di rumah pamannya ini juga telah memupuk kecintaan Soeharto terhadap nilai-nilai luhur Jawa. Ajaran tiga “aja”, yaitu *aja kagetan*, *aja gumunan*, dan *aja dumeh* (jangan kagetan, jangan heran, dan jangan mentang-mentang), adalah salah satu filsafat hidup yang dipelajarinya di masa ini dan terus dianutnya saat menjadi presiden. Ajaran lain

yang juga diperoleh pada masa ini adalah "*Hormat kalawan Gusti, guru, ratu lan wong atuwo karo*" (artinya: hormat kepada Tuhan, guru, pemerintah, dan kedua orangtua).

Secara rutin ia mulai dikenalkan pada penempatan spiritual, baik yang berasal dari budaya Islam maupun Jawa. Puasa Senin-Kamis dilakoninya dengan penuh disiplin. Begitupula tidur di *tritisan* (di bawah ujung atap pada bagian luar rumah). Dalam budaya Jawa, aktivitas ini dianggap sebagai tirakat yang akan menambah kekuatan batin seseorang dalam menghadapi masalah hidup. Kegemaran dalam berorganisasi disalurkanannya dengan masuk menjadi anggota Hizbul Wathan, sebuah organisasi Islam yang nasionalis.

Dalam otobiografinya, Soeharto mengakui bahwa kehidupan di Wuryantoro ini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakternya di masa mendatang. Pada masa ini jugalah ia mengenal Siti Hartinah, putri dari Wedana Wuryantoro yang kelak dinikahinya. "*Cukup untuk membentuk keluarga,*" begitu tulis Soeharto tentang wanita yang kemudian dikenal dengan sapaan Ibu Tien (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 13).

Tak Mampu Beli Sepatu

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Wuryantoro selama lima tahun, ia kemudian pindah ke Wonogiri untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah tingkat menengah. Di sana ia tinggal bersama Hardjowijono, teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api. Hal yang paling menarik saat tinggal di Wonogiri ini adalah ia dapat bertemu dengan Kiai Darjatmo, seorang pemuka agama yang dalam ilmu agama dan kebatinannya, juga terkenal sebagai orang yang pandai menyembuhkan berbagai penyakit.

Karena Hardjowijono merupakan salah satu pengikut setia dari Kiai Darjatmo, Soeharto muda sering diajak mengunjungi Kiai Darjatmo dan mendengarkan percakapan kedua orang tua

ini mengenai ilmu agama. Soeharto amat senang ketika ia diizinkan membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat dari daun dan akar-akaran untuk mengobati pasien.

Namun kegembiraan Soeharto tak berlangsung lama. Ia harus kembali ke Kemusuk karena adanya peraturan sekolah yang mengharuskan siswa mengenakan celana dan sepatu. Sebegitu miskin keluarganya hingga orangtuanya tak dapat membantu Soeharto memenuhi persyaratan dari sekolahnya itu.

Dengan berat hati ia kemudian pindah bersekolah di sekolah menengah Muhammadiyah di kota Jogja, di mana ia dapat pergi ke sekolah dengan mengenakan kain atau sarung dan juga tidak bersepatu. Dari kehidupan di Jogja ini, ia pertama kali mendengar adanya protes terhadap penjajahan Belanda, pandangan-pandangan kaum nasionalis, serta mengetahui adanya pertemuan tokoh-tokoh politik di Jogja. Namun semua ini tidak menarik minat Soeharto, setidaknya, belum.

Bekerja di Bank Desa

Setelah lulus di tahun 1939, ia dituntut untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Setengah menyalahkan keadaan, Soeharto mencatat, "Sangat sulit memperoleh pekerjaan tanpa bantuan orang yang berkedudukan atau yang berpengaruh, tanpa uluran tangan orang kaya ataupun pengusaha besar saat itu."

Karena sekian lama tidak juga memperoleh pekerjaan, ia kembali ke Wuryantoro, berharap memperoleh koneksi yang dapat menyediakan lapangan kerja baginya. Akhirnya ia diterima bekerja di sebuah bank desa (*volks-bank*) sebagai pembantu klerek yang kerjanya tiap hari mengayuh sepeda berkeliling kampung, bertemu dengan para petani, pedagang kecil ataupun pemilik warung kecil yang ingin mengajukan pinjaman. Dalam melaksanakan tugasnya itu, ia harus mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, seperti blangkon dan kain.

Suatu waktu, ia meminjam kain dari bibinya untuk dipakai bekerja. Secara tidak sengaja kain itu sobek karena tersangkut sadel sepeda. Bibinya menjadi marah atas kecerobohannya. “Padahal saya tidak bersalah, cuma jalan hidup saya saja yang demikian,” Soeharto beralasan dalam hati.

Kejadian ini tampaknya berefek besar bagi pekerjaannya. Ia lalu berhenti bekerja, satu hal yang menurutnya tak pernah ia sesali. Bagaimanapun, ia mengaku tidak begitu suka bekerja pada bidang itu. Ia pun kembali menganggur.

Siapa Sesungguhnya Ibunda Soeharto

Menurut Elson, ada beberapa kesimpangsiuran mengenai asal usul Soeharto (Elson, 2001: 29). Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan bahwa kelahirannya dibantu oleh Mbah Kromo (Kromodiryo), adik dari kakeknya Kertoirono. Sedangkan O.G. Roeder dalam *The Smiling General* menyebutkan bidan kelahiran Soeharto adalah ibu dari Kertosudiro (nenek dari Soeharto). O.G. Roeder juga menyebut nama Fatimah sebagai ibu Soeharto, sedang keterangan dari Soeharto merujuk nama Sukirah.

Selain beberapa masalah perbedaan keterangan itu, ada juga keganjilan-keganjilan yang diutarakan Elson berkaitan dengan cerita masa kecil Soeharto. Bagi Elson, ayah Soeharto adalah sosok yang misterius. Bagaimana mungkin seorang miskin seperti Kertosudiro mampu menyekolahkan anak pada usia yang begitu muda sedangkan pada masa itu sedikit sekali anak Indonesia yang mengenyam bangku sekolah? Selain itu, hadiah seekor kambing untuk seorang anak, adalah hal yang “terlalu mewah” bagi petani yang tidak memiliki lahan.

Mengenai hal ini, Elson lebih mengarahkan pandangannya kepada kemungkinan-kemungkinan yang menyimpulkan bahwa Soeharto adalah anak tidak sah dari seorang pembesar atau orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau pun kaya (Elson, 2001:

32). Adapun Kertosudiro, menurut Elson, bisa saja seseorang yang ditunjuk untuk memainkan peran sebagai ayah bagi Soeharto.

Benarkah Ayah Kandung Soeharto Seorang Pedagang China?

Hal yang paling kontroversial di seputar pembahasan mengenai asal usul Soeharto ini adalah adanya kabar yang mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari pedagang keliling keturunan China (Elson, 2001: 32). Saat itu, di Yogyakarta dikabarkan ada seorang pedagang China yang kerap berhubungan dengan masyarakat lokal. Selain berjualan, ia juga membeli hasil bumi penduduk untuk diperdagangkan. Melalui aktivitas inilah, ia berkenalan dengan Sukirah, ibunda dari Soeharto.

Mungkin saja dengan alasan ini, pada masa pemerintahannya Soeharto dikenal dekat dengan pengusaha-pengusaha besar China seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Bahkan ada kabar, salah satu partner bisnis Soeharto adalah Tek Kiong, yang sering disebut-sebut sebagai adik Soeharto (lihat: <http://www.geocities.com/capitolhill/4120/soeharto.html>). Tentu saja akan menjadi suatu hal yang mengejutkan bila ternyata berita ini benar mengingat di masa ia memerintah, Soeharto dikenal cukup diskriminatif terhadap etnis China.

Terlepas dari benar tidaknya berita tersebut, kesimpangsiuran masalah asal usul Soeharto ini tampaknya akan terus menarik minat bagi mereka yang penasaran ingin mengetahuinya. Rasa penasaran yang sangat mungkin tidak akan terjawab dan selamanya menjadi bagian abu-abu dari kehidupan Soeharto.

- 3 -

Mengabdikan pada Belanda dan Jepang

"Saya menemukan kesenangan dan mulai tertarik untuk benar-benar hidup dari pekerjaan ini."

- **Soeharto** yang baru saja menekuni dunia militer
(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

SOEHARTO pastinya tidak menjadikan militer sebagai tujuan hidup. Paling tidak, pada awal masa mudanya, Soeharto tak pernah terpikirkan akan masuk dalam kehidupan ketentaraan yang keras dan penuh disiplin. Dalam berbagai sumber yang dapat diperoleh, tak satu pun yang mengatakan bahwa Soeharto kecil pernah bercita-cita menjadi tentara. Bahkan dalam otobiografinya, secara tersirat Soeharto mengakui bahwa di masa mudanya, tak ada sedikit pun ketertarikan dirinya untuk menjadi tentara. Soeharto muda adalah seorang yang miskin, yang hidupnya hanya berfokus pada upaya untuk bertahan hidup dan mengurus masalah perut. Ia juga merasa lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian ataupun spiritual.

Jika ada sesuatu yang pada akhirnya mendorong Soeharto terjun ke dalam dunia militer, tak lain karena adanya harapan

untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Selepas bekerja di *volksbank*, Soeharto kembali terjebak pada kehidupan yang tidak menentu. Dan dalam ketidakmenentuan itulah, Soeharto seperti juga umumnya masyarakat yang bernasib sama dengannya di masa itu, mengalihkan pandangan mereka ke arah kemiliteran. Imbas Perang Dunia II yang juga telah sampai ke Indonesia menjadikan kemiliteran sebagai “sebuah pekerjaan” yang tampak lebih bersinar dibanding bidang pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Menjadi Anggota KNIL

Lelah mencari peluang di Solo, Soeharto kembali ke Wuryantoro. Ia lalu memutuskan mendaftar ke KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indisch Leger* sebutan bagi Angkatan Bersenjata Hindia-Belanda) setelah sebelumnya sempat mempertimbangkan pilihannya masuk ke dalam barisan Angkatan Laut Belanda. Maka datanglah surat panggilan untuk bergabung dengan KNIL. Kelak Soeharto mencatat, “Pada mulanya saya sama sekali tidak akan mengira bahwa lamaran yang saya ajukan akan merupakan anak kunci yang membuka pintu lapangan hidup yang menyenangkan.”

Ada dua cara menjadi anggota KNIL, cara panjang dan cara pendek. Cara panjang atau yang disebut *Langverband* adalah dinas yang diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah mengenyam bangku pendidikan hingga kelas tiga HIS (*Holands Inlandse School* – SD di zaman Belanda). Lulusan *Langverband* membutuhkan waktu yang lama, yaitu sepuluh tahun, untuk menjadi kopral. Sedangkan cara pendek atau *Kortverband* diperuntukkan bagi mereka yang telah lulus HIS atau lebih. Lulusan *Kortverband* kemudian dapat melanjutkan pendidikannya ke *Kader School* untuk menjadi kopral. Karena tingkat pendidikan yang dimilikinya, pintu *Kortverband* terbuka untuknya.

Di Gombong yang terletak di sebelah barat kota Yogyakarta, Soeharto memulai latihan militernya pada tanggal 1 Juni 1940. Sebuah kehidupan yang benar-benar baru dan sangat berbeda

dengan kehidupan sebelumnya. Pagi hingga malam ia habiskan untuk berlatih. Meskipun terasa berat, Soeharto mulai menemukan kesenangan pada bidang ini. Ia bahkan berencana untuk terus hidup dari pekerjaan ini. Berbeda dengan apa yang ditulis Roeder bahwa Soeharto memilih dunia militer karena tertarik pada petualangan yang dijanjikan, Elson dengan tegas meyakini bahwa satu-satunya motivasi Soeharto masuk ke dalam dunia kemiliteran adalah semata karena mencari penghidupan yang lebih baik (Lihat Roeder: 1969: 93, lihat juga: Elson, 2001: 38). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Soeharto dalam otobiografinya, “ ... Saya menemukan kesenangan dan mulai tertarik untuk benar-benar hidup dari pekerjaan ini” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 20).

Setelah lulus dengan memperoleh predikat terbaik, ia ditempatkan di Batalion XIII di Rampal, dekat Malang. Sewaktu bertugas di Gresik, ia sempat terkena malaria hingga akhirnya dipulangkan ke Malang. Setelah keluar dari rumah sakit, Soeharto mengikuti ujian dan masuk ke *Kader School* di Gombong untuk mendapatkan pangkat sersan. Mengingat diskriminasi yang biasa diderita oleh mereka yang berasal dari Jawa, di mana Belanda lebih terbuka terhadap anggota-anggota KNIL yang berasal dari Maluku atau Sulawesi Utara, “nasib baik” tampaknya mengiringi Soeharto. Tanpa menemui kendala yang berarti, karier militernya dimulai dengan sangat lancar. Ini bagi Elson mengindikasikan bahwa Soeharto telah menunjukkan sikap yang patuh dan loyal yang kemudian juga membawanya menempati jabatan tinggi di masa pengabdianya pada militer Jepang (Elson, 2001: 42).

Setelah lulus, pecahnya Perang Dunia II membuat Sersan Soeharto dikirim ke Cisarua, Bandung untuk bergabung sebagai pasukan cadangan di markas angkatan darat. Hanya seminggu setelah berdinasnya di sana, Belanda menyerah pada pendudukan Jepang.

Menjadi Anggota PETA

Perasaan waswas mendera benak Soeharto. Ketakutan akan ditawan oleh Jepang membayangi dirinya. Ia lalu memilih pulang dengan kereta ke Yogyakarta bersama sahabatnya, Amat Sudono setelah sebelumnya menanggalkan seragam di Cimahi. Setibanya di stasiun Tugu, Yogyakarta, mereka mendengar adanya pengumuman Jepang yang meminta semua bekas tentara untuk masuk kantor dan melapor. Soeharto bersikeras untuk tidak keluar dari stasiun. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengubah rencana dan dengan menggunakan kereta pergi mengamankan diri ke rumah Amat Sudono di Sleman.

Dari Sleman, Soeharto kemudian menggunakan bis ke Wonogiri lalu pulang ke Wuryantoro. Di sini penyakit malarianya kambuh. Masa pendudukan Jepang mengembalikan Soeharto ke masa-masa sulit. Makanan dan pakaian semakin susah didapatkan. Rakyat dianjurkan untuk memakan bekicot. Kehidupan yang serba susah itu makin bertambah karena sulitnya Soeharto mencari pekerjaan. Untuk mengisi kebosanan ia mengikuti kursus mengetik di depan kantor polisi.

Secara tak sengaja, suatu hari Soeharto mendengar adanya rekrutmen anggota baru *Keibuho*, sebutan bagi polisi di masa pendudukan Jepang. Awalnya ia ragu untuk mendaftar karena takut ketahuan sebagai bekas anggota KNIL. Kondisi serta kebutuhanlah yang akhirnya membuatnya berani mendaftarkan diri.

Soeharto yang pernah memperoleh pendidikan kemiliteran di masa Belanda dapat melalui semua tes dengan baik. Bahkan selama tiga bulan pelatihan, ia (lagi-lagi) menjadi lulusan terbaik. Atas saran Kepala Polisi Jepang, ia mendaftarkan diri ke PETA (Pembela Tanah Air).

PETA adalah angkatan pertahanan yang dibentuk pada Oktober 1943 oleh Jepang, dengan orang Indonesia sebagai anggotanya. Anggota PETA dilatih dengan tujuan mempertahankan tanah airnya dari serbuan tentara sekutu yang mencoba merebut

kembali Indonesia dari tangan Jepang. Setiap waktu, mereka didoktrin dan dipupuk kebenciannya terhadap tentara sekutu.

Mengenai masuknya Soeharto ke PETA, Elson menyangsikan adanya dorongan nasionalisme dari dalam diri Soeharto. Mengingat saat itu kesadaran nasionalis Soeharto masih teramat minim, maka dapat disimpulkan alasan Soeharto untuk bergabung dengan PETA adalah murni bermotif oportunis untuk melanjutkan karier militernya yang sempat terhambat (Elson, 2001: 42).

Jadi Orang Kepercayaan Jepang

Terbantu oleh pengalamannya di KNIL, Soeharto terpilih untuk mengikuti latihan sebagai komandan peleton (*Shodancho*) di Bogor. Setelah menjalani empat bulan latihan, Soeharto kembali ke Yogyakarta, ditempatkan di Batalion Wates. Tak berapa lama, ia terpilih lagi untuk dikirim ke Bogor untuk dilatih menjadi *Chudancho* (komandan kompi). Selesai pelatihan di tahun 1944, ia ditempatkan di Markes Besar PETA di Solo. Di sana tugasnya adalah melatih para calon *Bundancho*.

Selama di PETA, Soeharto mencatat bahwa rasa patriotisme serta nasionalismenya mulai bangkit. Ini tak lepas dari propaganda Jepang yang menanamkan semangat anti-Barat. Selain itu, tekanan keras yang diberikan Jepang kepada rakyat Indonesia telah membangkitkan semangat kekeluargaan dan persatuan di kalangan prajurit PETA. Semboyan “Tiga A” yang digembar-gemborkan Jepang, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia, terbukti pepesan kosong belaka. Perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia justru mencerminkan sikap memandang rendah. Akibatnya, mulai muncul pembangkangan. Di antaranya adalah pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945.

Soeharto berkisah tentang perasaannya yang marah melihat cara Jepang memperlakukan bangsanya. “Tumbuh keinginan saya untuk melawan mereka (Jepang) yang menyakiti hati kami

itu,” catat Soeharto dalam otobiografinya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 25).

Pernyataan ini ditolak oleh Elson. Kenyataan yang menunjukkan bahwa di kala pembangkangan sering terjadi di antara pasukan PETA, Soeharto malah memperoleh kepercayaan melatih prajurit PETA dari Blitar untuk dijadikan *Bundancho* menggantikan para *Bundancho* yang dihukum mati akibat pemberontakan, menunjukkan bahwa ia sangat dipercaya oleh Jepang (sesuatu yang tidak mungkin diperolehnya bila menunjukkan bibit perlawanan terhadap Jepang) atau mungkin tidak terlalu peduli pada kegagalan pemberontakan serta nasib yang menimpa teman-teman PETA-nya (Elson, 2001: 42).

Soeharto sedang berada di Brebeg untuk melatih pada *Budancho* ketika Jepang menyerah pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia yang berarti dimulainya suatu babak baru bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini berarti pula babak baru bagi karier militer Soeharto. Kemerdekaan Indonesia berarti sebuah “panggilan” baginya ...

- 4 -

Di Awal Masa Revolusi

"Jika saja penyerbuan ini berujung pada kekalahan, karier militer Soeharto akan berakhir bahkan mungkin saja ia akan dihadapkan ke pengadilan militer."

- O.G. Roeder, penulis *The Smiling General* -

SETELAH Soekarno-Hatta memproklamlirkan kemerdekaan Indonesia, negeri yang sedang berjuang untuk memperoleh pengakuan dunia ini segera memasuki masa-masa revolusi. Di mana Soeharto saat itu?

Berdasarkan catatan-catatan kemiliteran Belanda, serta beberapa keterangan dari para pelaku sejarah, nampaknya Soeharto memiliki andil yang cukup penting (meskipun tak sebesar yang digembar-gemborkan kemudian saat dirinya masih menjabat sebagai presiden) di masa revolusi ini.

Merasa Mendapat "Panggilan"

Saat kemerdekaan Indonesia diproklamlirkan, Soeharto sedang berada di Brebeg untuk melatih para prajurit dari Batalion Blitar untuk menjadi *Bundancho* (komandan regu). Mereka dilatih untuk menggantikan *Bundancho* dan *Shodancho* pimpinan Supriyadi, yang memberontak pada bulan Februari 1945.

Oleh karena berada di tempat yang terpencil, maka Soeharto tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tiba-tiba saja, sesaat setelah selesai melatih para prajurit itu, Soeharto diberi perintah untuk membubarkan pasukannya. Semua senjata serta mobil diminta kembali oleh Jepang. Soeharto yang kebingungan lalu kembali ke rumah dinas di Madiun, sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke Yogyakarta.

Di Yogyakarta inilah ia mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan di Jakarta. Pada tanggal 19 Agustus 1945, melalui surat kabar *Matahari*, ia memastikan kebenaran berita tentang kemerdekaan Indonesia serta terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI pertama. Pada surat kabar itu pula tertuang kata sambutan dan ucapan selamat dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII atas terbentuknya Negara Kesatuan RI. Dalam suratnya itu, Sultan Hamengku Buwono IX menulis, "Semua, tanpa terkecuali, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama, yaitu menjaga, memelihara, dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa." Membaca anjuran ini, Soeharto membatin "Anjuran yang sudah ada dalam pikiran saya."

Di masa-masa ini juga Soeharto yang saat itu masih "buta" terhadap masalah politik, mencoba memperdalam pengetahuannya dengan bergabung pada Kelompok Pathuk, sebuah kelompok yang secara aktif menyelenggarakan diskusi-diskusi masalah politik dan kenegaraan. Di kelompok inilah ia pertama kali bertemu dengan Sjam Kamaruzzaman, salah tokoh yang kemudian pada tahun 1965 menjadi gembong utama penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal di Lubang Buaya.

Rupa-rupanya rasa nasionalis Soeharto yang telah dipupuknya semasa menjadi tentara PETA, bangkit kembali saat membaca berita tentang kemerdekaan Indonesia. "Wah, ini artinya panggilan!" pikir Soeharto saat itu.

Meskipun Soeharto kemudian untuk pertama kali dalam hidupnya melakukan sebuah langkah yang benar-benar nyata mengindikasikan bangkitnya rasa nasionalisme dalam dirinya, yaitu dengan bergabung menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) namun niat ini diragukan oleh Elson. Dalam bukunya, Elson menganggap tindakan Soeharto yang bergabung dengan BKR ini sebenarnya bukan didasari oleh rasa nasionalismenya, melainkan karena ia terperangkap dalam gejolak euforia pascareformasi – hal yang juga melanda sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu.

Diwarnai oleh teriakan-teriakan “Merdeka atau mati!”, keadaan Yogyakarta saat itu benar-benar berada dalam demam revolusi. Presiden Soekarno yang menduga Belanda serta sekutunya tak akan rela melepaskan tanah jajahannya ini, kemudian merasa perlu untuk membentuk sebuah badan pertahanan yang akan membantu dalam mempertahankan diri menghadapi serangan musuh. Maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Seluruh anggota masyarakat, terutama yang pernah menjadi anggota KNIL, PETA, *Heiho*, *Kaigun* ataupun pasukan lainnya, dianjurkan untuk bergabungkan diri dalam BKR.

Soeharto yang merasa “terpanggil” lalu menemui temannya, Oni Sastroatmodjo, Komandan Kompi Polisi Istimewa, dan bersama-sama mengumpulkan bekas anggota PETA serta kesatuan lainnya untuk membentuk BKR. Tak berapa lama, terbentuklah BKR dengan senjata seadanya (karena kebanyakan senjata api telah dirampas oleh Jepang) dengan mengandalkan bambu runcing, *klewang* (pisau panjang) dan juga panah. Umar Slamet, atas pertimbangan senioritas, kemudian terpilih menjadi ketua BKR sedang Soeharto menjadi wakilnya.

Penyerbuan Kotabaru, 7 Oktober 1945

Dalam otobiografinya, Soeharto mengingat masa ini sebagai “tangga pertama yang menaikkan saya ke tangga-tangga

berikutnya.” Nyatanya, kelompok kecil BKR inilah yang kemudian mengawali karier cemerlangnya di bidang militer.

Semakin hari semakin banyak pihak yang bergabung dengan BKR pimpinan Umar Slamet dan Soeharto. Masalah utama mereka saat itu bukanlah semangat juang namun kurangnya persenjataan yang memadai. Untuk itu diputuskan merebut senjata dari setiap tentara Jepang yang ditemui.

Pada awalnya, kompi ini melucuti tentara-tentara Jepang yang berada di luar asrama. “Saya memimpin kelompok ini melucuti tentara Jepang,” ujar Soeharto. Meskipun telah banyak senjata yang diperoleh namun tetap saja belum mencukupi kebutuhan. Dalam buku Roeder, *The Smiling General*, diceritakan di antara para pemuda itu banyak yang merasa gemas dan mengusulkan agar BKR menyerbu asrama tentara Jepang untuk memaksa mereka menyerahkan senjata. Namun usulan ini ditolak oleh Umar Slamet dan tokoh BKR lainnya. Pasukan BKR saat itu dianggap belum cukup kuat untuk melakukan serangan langsung kepada musuh.

Soeharto lalu menanti saat yang tepat untuk bergerak. Akhirnya kesempatan itu tiba. Di kala Umar Slamet harus pergi menyelesaikan sebuah urusan di Madiun, Soeharto sebagai wakil komandan lalu melakukan inisiatif memimpin sebagian BKR (yang berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat-TKR pada tanggal 5 Oktober 1945) ditambah para pemuda dan rakyat untuk menyerbu asrama Jepang. Apa yang menjadi pemicu keberanian Soeharto saat itu adalah tak lain karena dirinya merasa percaya diri dengan semangat tempur yang dimiliki oleh pasukannya. Pada tanggal 7 Oktober 1945, hanya 2 hari setelah ia resmi bergabung dengan TKR, Soeharto berhasil melaksanakan niatnya merebut persenjataan dari asrama Jepang di Kotabaru. Tentara Jepang yang tak menyangka akan mendapat serangan di pagi itu akhirnya menyerah setelah sebelumnya terjadi pertempuran selama 12 jam. Ratusan senapan mesin dan juga senjata lainnya berhasil dirampas.

Roeder mencatat bahwa tindakan penyerbuan ini merupakan “sebuah tindakan yang berisiko”. Jika saja penyerbuan ini berujung pada kekalahan, karier militer Soeharto akan berakhir bahkan mungkin saja ia akan dihadapkan ke pengadilan militer. Faktanya, kemenangan berpihak pada Soeharto. Terbukti perhitungan cermat Soeharto tidak keliru. Ini kali pertama Soeharto (yang pada saat itu baru berusia 24 tahun) menunjukkan keterampilannya dalam mengambil sebuah keputusan yang secara politis memiliki arti tinggi bagi karier militernya.

Bertahan di Banyubiru

Oleh karena prestasinya itu, Soeharto kemudian diangkat menjadi pimpinan Batalion X dengan pangkat mayor. Bersama dengan tiga batalion lainnya, Soeharto tergabung dalam Divisi IX yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Soedarsono. Konsolidasi militer ini segera dilakukan mengingat sekutu telah mendarat di Indonesia di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison asal Inggris. Di dalam pasukan sekutu ini juga terdapat pasukan Belanda, *Netherland Indies Civil Administration* (NICA), yang dibebani misi menguasai kembali Indonesia.

Segera terjadi bentrokan antara pasukan sekutu dengan barisan TKR yang mati-matian menjaga kehormatan negaranya. Di Semarang, pertempuran pecah tanggal 31 Oktober. Keesokan harinya, pertempuran yang sama juga terjadi di Magelang dan Ambarawa. Namun yang paling dahsyat terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November. Arek-arek Surabaya yang miskin pengalaman serta dengan senjata seadanya, berjuang hingga titik darah penghabisan menghadapi sekutu. Di bawah pimpinan orator ulung, Sutomo (Bung Tomo), para pejuang menghadirkan neraka bagi Sekutu di Surabaya. Jenderal Mallaby tewas di pertempuran ini.

Sekutu telah tiba di Magelang dan Ambarawa. Ini berarti keselamatan kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota terpenting di awal berdirinya RI, terancam. Menanggapi hal tersebut, para

pimpinan militer lalu mengadakan pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945. Hasilnya, Panglima Divisi V/Banyumas Kolonel Soedirman terpilih sebagai pemimpin tertinggi. Sedangkan Urip Soemohardjo terpilih menjadi Kepala Staf.

Soeharto bersama Batalion X ditugaskan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah resimen yang dipimpin oleh Letkol Sarbini dengan tujuan menghambat gerak laju tentara Sekutu di Magelang. Upaya ini berhasil. Pasukan Sekutu lalu mundur ke Ambarawa.

TKR yang bersemangat lalu mengejar hingga Ambarawa. Soeharto dengan Batalion X-nya turut serta dalam penyerbuan itu. Ia dan pasukannya ditugaskan menduduki Banyubiru. Tugas itu dijalankannya dengan baik. Tidak terima dengan kekalahannya, pasukan Sekutu lalu menembakkan meriam ke Banyubiru dari arah Ambarawa. Namun Soeharto bertahan. Upaya ini kemudian memperoleh rasa salut dari Letkol Gatot Soebroto, ayah angkat dari Bob Hasan, yang kelak menjadi “kawan dekat”-nya di masa Orde Baru.

Pertempuran sengit yang sekarang dikenal dengan sebutan “Palagan Ambarawa, pun terjadi. Sekutu akhirnya dapat dipukul mundur ke Semarang. Maka selamatlah kota Yogyakarta dari ancaman musuh.

Sebuah Titik Balik

Kolonel Soedirman lalu secara resmi dilantik menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember dengan pangkat jenderal. Atas jasanya, Soedirman mengangkat Soeharto sebagai Komandan Resimen III dari Divisi IX (Istimewa) dengan pangkat letnan kolonel. Berdasarkan dokumen Belanda, sekitar bulan Maret 1946 dikabarkan Soeharto mengepalai tiga batalion, yaitu Batalion X di bawah pimpinan Mayor Sudjono, Batalion XX di bawah Mayor Sardjono, dan Batalion XXV di bawah Mayor Basyuni. Dan karena adanya reorganisasi, pada bulan Mei 1946, Soeharto

masuk ke dalam Divisi III (Pekalongan, Kedu, dan Yogyakarta) hasil penggabungan antara Divisi IX (Istimewa) dengan Divisi V (Pekalongan Kedu). Divisi ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soedarsono.

Tahun 1946 adalah tahun yang menjadi titik balik dari kehidupan Soeharto. Bermodalkan kualitas diri yang dimilikinya, ia tampaknya sangat menikmati kehidupan militer yang menjanjikan. Di masa revolusi, para saksi mata yang terlibat dalam pertempuran bersama Soeharto, salah satunya adalah bekas anak buahnya yang kemudian menjadi pendeta Katolik – Y.B. Mangunwijaya, mengenang pribadinya sebagai seorang yang tenang dan berwibawa. (Elson, 2001: 49) Soeharto sendiri mengenang dirinya sebagai seorang pemimpin yang sangat membenci ketidakdisiplinan (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 33). Meskipun pada tahun ini juga ia mendapat kabar duka tentang kematian ibunya, namun secara umum tahun 1946 telah menjadi awal bagi kecemerlangan karier militernya di masa-masa mendatang.

Kini, kehidupan yang lebih cerah menanti di depan ...

- 5 -

Terlibat Peristiwa 3 Juli

*“Kamu harus menyadarkan Soeharto. Dia harus menentukan sikap,
jangan ikut Tan Malaka.”*

- **Soekarno** pada Dayno (Eros Djarot, *dkk.*, 2006) -

SEPERTI yang biasa terjadi di tempat lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru terbentuk belum memiliki pemerintahan yang solid serta sepaham dalam hal pengambilan kebijakan. Konflik-konflik internal kadang muncul akibat perbedaan pandangan di antara elemen pemerintahan. Salah satunya kemudian menghasilkan apa yang disebut oleh orang sebagai “Peristiwa 3 Juli” yang secara kebetulan juga melibatkan Soeharto.

Pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah memutuskan memindahkan ibukota negara RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Hal ini tak lepas dari adanya rongrongan secara terus menerus dari pasukan Belanda kepada pusat pemerintahan RI di Jakarta. Puncaknya saat muncul upaya penembakan terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sepertinya, Kerajaan Belanda tidak rela melihat tanah bekas jajahannya ini meraih kemerdekaan.

Ketidakpuasan Militer

Pemindahan pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta berarti menempatkan posisi Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen III Divisi III TRI (Tentara Republik Indonesia – perubahan nama dari nama sebelumnya, TKR, pada tanggal 25 Januari 1946) menjadi strategis. Menjaga keamanan kota Yogyakarta sama halnya dengan menjaga kelangsungan pemerintahan RI. Sebuah beban yang tak ringan mengingat pemerintah Belanda terus saja menambah jumlah tentaranya yang dikirim untuk menduduki kembali Republik Indonesia.

Sadar akan minimnya kekuatan militer yang dimiliki, pemerintah Indonesia melalui PM Syahrir dibantu dengan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin mengambil jalan kooperatif dalam menghadapi Belanda dengan maju ke meja perundingan. Sikap lunak pemerintah ini rupanya tidak menyenangkan hati sebagian orang yang menganggap kemerdekaan Indonesia hanya dapat dipertahankan dengan perjuangan bersenjata secara radikal. Salah satu tokoh radikal yang gencar menyuarakan ketidakpuasannya ini adalah Tan Malaka, tokoh kiri yang menjadi oposisi kabinet Syahrir.

Gejala ketidakpuasan rupanya juga disinyalir ditunjukkan oleh Panglima Besar Soedirman serta beberapa tokoh militer lainnya (Elson, 2001: 53). Mungkin saja keinginan (dari beberapa tokoh militer) untuk menghentikan perundingan dengan Belanda ini disebabkan karena menurut pengalaman di masa lalu, Belanda terbukti tak pernah menepati janji yang mereka buat sendiri.

PM Sutan Syahrir Diculik

Soedarsono, Komandan Divisi III (Kedu, Pekalongan, Yogyakarta) TRI adalah salah satu tokoh militer yang mengagumi pemikiran Tan Malaka. Atas perintah Soedarsono-lah, A.K. Yusuf, Komandan Batalion 63 Yogyakarta melaksanakan penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir di kota Solo pada tanggal

27 Juni 1946. Menurut Adam Malik selaku pihak yang terlibat, penculikan ini adalah sebuah strategi “atas restu Jenderal Soedirman” untuk memaksa pemerintah menghentikan perundingan dengan Belanda (Elson, 2001: 53, lihat juga Roeder, 1969: 106).

Penangkapan Syahrir ini membuat Presiden Soekarno marah. Ia segera mengultimatum penculik agar Syahrir segera dibebaskan. Reaksi keras pemerintah telah membuat terkejut para penculik sehingga dalam waktu yang tidak lama, Syahrir dibebaskan.

Peristiwa ini kemudian berlanjut. Soeharto yang oleh karena posisinya yang strategis, mau tidak mau ikut terlibat pada sebuah permainan politik. “Bisa dimaklumi, sebagai Komandan Resimen yang berkedudukan di ibukota saya menjadi rebutan mereka yang bertentangan,” tulis Soeharto dalam otobiografinya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 36).

Menolak Perintah Presiden Soekarno

Setelah kasus penculikan Syahrir, Soeharto mendapat perintah dari Presiden Soekarno untuk menangkap atasannya, Soedarsono. Mengenai proses penyampaian perintah ini, setidaknya ada 2 versi yang berbeda beredar.

Versi pertama adalah yang ditulis Roeder dalam bukunya *The Smiling General*. Menurut Roeder, setelah konflik meruncing, Soeharto diperintah untuk menghadap Presiden Soekarno di Keraton Yogyakarta. Soeharto pun datang menghadap. Pertemuan ini adalah kali pertama Soeharto bertemu dengan Soekarno. Meskipun demikian, Roeder menggambarkan pertemuan tersebut setidaknya telah menjadi gambaran bagaimana kedua belah pihak akan terlibat dalam sejumlah kontroversi di masa depan (Roeder, 1969: 106). Di satu sisi, Soekarno mewakili sosok presiden yang percaya diri, ekspresif, serta figur pemimpin yang penuh dengan misi politik juga selalu dikagumi rakyat, sementara di lain pihak, Soeharto adalah seorang prajurit yang setia pada kewajiban, hormat pada atasan, dan berpikiran lurus ke depan.

Pada pertemuan itu, Soekarno secara singkat memberikan gambaran terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi dan memerintahkan Soeharto untuk menangkap Soedarsono yang dianggap terlibat dalam penculikan Syahrir. Soeharto yang merasa menjadi bawahan Soedarsono, merasa keberatan untuk melaksanakan perintah itu.

Menurut etika militer, tidak pada tempatnya jika seorang bawahan menangkap atasannya langsung. Oleh karena itu, ia menolak melaksanakan perintah itu, kecuali jika Presiden Soekarno memberikan surat perintah tertulis atau memberikan perintah kepadanya melalui Panglima Besar TRI Jenderal Soedirman. Hal ini membuat Presiden Soekarno marah. Menghadapi kekerasan kepala Soeharto ini, ia berucap, “Apakah kamu sadar, saya ini Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang. Lagipula Jenderal Soedirman terlibat dalam *affair* ini. Kita sekarang berada dalam keadaan darurat” (Roeder, 1969: 107). Soeharto tak bergeming. Namun demikian, untuk menenangkan hati Presiden Soekarno, ia berjanji untuk senantiasa menjaga pemerintahan dari segala upaya penggulingan kekuasaan.

Julukan “Opsir Koppig”

Berbeda dengan yang ditulis Roeder, versi kedua berdasarkan pengakuan Soeharto yang termuat dalam otobiografinya, ia menerima perintah dari Soekarno tidak secara langsung melainkan melalui pesan yang dibawa oleh seseorang bernama Sundjojo.

Waktu itu ia sedang berada di Markas Resimen Wiyoro ketika Sundjojo yang dikenal Soeharto sebagai Ketua Pemuda Patuk, datang menemuinya. Sundjojo menjadi utusan Istana Negara membawa pesan dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI (Presiden). Melalui Sundjojo pula ia memperoleh penjelasan tentang keadaan yang sedang terjadi dan memintanya untuk menahan Mayor Jenderal Soedarsono. “Sungguh gila gagasan itu! Mana ada seorang bawahan harus menangkap atasannya sendiri secara lang-

sung, apalagi tak ada bukti tertulis!” demikian pikir Soeharto saat itu (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 37).

Tak lama kemudian muncul seorang yang datang membawa surat perintah dari Presiden Soekarno. Isinya sama seperti apa yang telah diutarakan Sundjojo. Setelah bingung beberapa saat, Soeharto memutuskan untuk mengembalikan surat perintah itu kepada Presiden Soekarno dan meminta agar surat tersebut diberikan kembali kepadanya melalui Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Sundjojo yang merasa kesal lalu balik ke istana. Ia lalu melaporkan hasil pertemuannya dengan Soeharto kepada Presiden Soekarno. Melalui percakapan telepon dengan Sundjojo, Soeharto tahu ia diberikan julukan “Opsir *Koppig*” (Opsir Keras Kepala) oleh Presiden Soekarno.

Menurut kesaksian Dayno, salah satu pendiri Kelompok Pathuk, Soekarno lalu sempat memintanya untuk menyadarkan Soeharto agar tidak mendukung Tan Malaka. Saat itu, menurut versi cerita yang lain, markas Soeharto sering menjadi tempat rapat bagi kelompok Tan Malaka. “Kamu harus menyadarkan Soeharto. Dia harus menentukan sikap jangan ikut Tan Malaka,” ujar Soekarno pada Dayno (Eros Djarot *dkk.*, 2006: 46).

Soeharto Bohong

Pada intinya, versi cerita yang berbeda ini memiliki kesamaan, yaitu Soeharto menolak diberi perintah menangkap Mayor Jenderal Soedarsono, jika perintah tersebut diberikan tanpa melalui Jenderal Soedirman. Bagi Elson, penolakan ini ditafsirkan sebagai upaya Soeharto untuk bertindak hati-hati dan terlebih dahulu mencari tahu di mana posisi Panglima Besar Jenderal Soedirman berdiri. Baru setelah mengetahui bahwa gerakan ini tidak didukung oleh Jenderal Soedirman, Soeharto lalu berani mengambil langkah selanjutnya (Elson, 2001: 55).

Hal ini tercermin pada otobiografinya, di mana setelah Sundjojo kembali ke istana, Soeharto pergi menemui Mayor Jenderal Soedarsono, bukan untuk menangkapnya melainkan untuk mengundangnya datang ke Markas Wiyoro. Alasan yang dikemukakan Soeharto saat itu adalah adanya berita sekelompok orang yang tergabung dalam laskar rakyat bermaksud menculik Soedarsono. Merasa keselamatannya terancam, Soedarsono menyanggupi undangan dari Soeharto.

Petang harinya Soedarsono menepati janjinya datang ke Markas Resimen III Wiyoro. Setibanya di sana, Soedarsono menunjukkan sebuah telegram yang isinya meminta agar ia pergi menghadap Panglima Besar. Hanya sesaat ia di Wiyoro, dengan alasan akan pergi menghadap Jenderal Soedirman, Soedarsono pergi dengan dikawal satu peleton anggota Resimen III. Setelah Soedarsono pergi, Panglima Besar Jenderal Soedirman menelepon Soeharto meminta agar Soedarsono jangan sampai meninggalkan Wiyoro. Soeharto terkejut. Ia merasa telah ditipu oleh Soedarsono.

Malamnya Soedarsono kembali ke Markas Wiyoro. Ia membawa rombongan yang ternyata tahanan politik yang dibebaskan oleh Soedarsono dari Rumah Tahanan Wirogunan. Kepada Soeharto, Soedarsono berkata bahwa ia akan menemui Presiden Soekarno besok untuk menyampaikan surat dari Jenderal Soedirman. Soeharto tahu ia sedang dibohongi namun ia diam saja, berpura-pura tidak tahu. "Ah, keterlaluhan atasan saya ini, dikira saya tidak mengetahui persoalannya. Saya mau *diapusi* (Jawa: dibohongi - *ed.*). Tidak ada jalan lain selain balas *ngapusi* dia," batin Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 38).

Soedarsono Ditangkap

Menurut Elson, Soeharto merasa yakin bahwa Soedarsono sedang merencanakan sesuatu yang buruk saat mengetahui Soedarsono dan kawan-kawannya sedang mempersiapkan konsep surat (yang menurut klaim Soedarsono atas sepengetahuan Jenderal

Soedirman) yang rencananya akan dimintakan tanda tangan kepada Presiden Soekarno keesokan harinya. Isi surat itu antara lain: Membubarkan Kabinet Syahrir, Menyerahkan kekuasaan Hankam dari Soekarno kepada Soedirman, Pendirian “Dewan Kepemimpinan Politik”, serta Pembentukan Kabinet Baru. Kecurigaan Soeharto semakin bertambah saat mengetahui Soedarsono meminta A.K. Yusuf untuk menghubungi Tawangmangu (tempat Tan Malaka ditahan) dan juga memerintahkan penculikan Hatta dan Amir Syarifuddin (Elson, 2001: 56).

Malam itu juga, Soeharto menghubungi istana, mengabarkan tentang rencana yang disusun oleh Kelompok Soedarsono, meminta agar pihak Istana bersiap menggagalkan dan menangkap Soedarsono sementara ia sendiri akan mengamankan Istana dari gangguan pihak luar.

Tanggal 3 Juli 1946, Soedarsono dan kelompoknya ditangkap oleh barisan pengawal presiden saat mencoba menjalankan rencananya. Sebuah keberhasilan taktik, menurut Roeder, yang menyebabkan kelompok Soedarsono dapat ditangkap tanpa menembakkan sebutir peluru. Soeharto telah menjalankan siasatnya, tanpa harus kehilangan muka di hadapan atasannya (Soedarsono) dan sekaligus tidak melanggar kewajibannya sebagai prajurit untuk melindungi negara dan pemerintahan dari upaya penggulingan kekuasaan (Roeder, 1969: 108).

“Peristiwa 3 Juli” adalah kali pertama Soeharto mendemonstrasikan kemampuan diplomasinya yang mampu menilai situasi sulit dengan hati-hati, sebelum akhirnya mengambil keputusan yang menguntungkan. Soeharto belajar bagaimana pentingnya tetap tenang dalam tekanan, bahkan jika perlu menggunakan bantuan dari pihak-pihak antagonis hingga saat-saat terakhir (Elson, 2001: 57). Suatu keputusan yang tepat, datang pada saat yang tepat. Sebuah pelajaran yang kemudian sangat membentuk karakternya di masa depan ...

- 6 -

Agresi Militer Belanda I & Perjanjian Renville

*“Saya, sebagai perwira muda saat itu sadar tidak akan
melibatkan diri ke dalam politik.”*

- **Soeharto** (Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

PERTENGAHAN tahun 1946, Inggris mulai menarik pasukannya dari Indonesia. Hal ini berarti para pejuang Indonesia tinggal berhadapan dengan pasukan Belanda. Dengan penuh semangat, didorong oleh keinginan yang tak ingin dijajah kembali oleh bangsa asing, para pejuang berupaya sekuat tenaga untuk mengusir pasukan Belanda dari Tanah Air. Upaya perjuangan diplomasi juga terus dilakukan walaupun mendapat tentangan dari beberapa pihak radikal.

Perjanjian pertama terjalin pada tanggal 25 Maret 1947, yang dikenal dengan nama Linggarjati. Meskipun dinilai merugikan Indonesia, namun kedua belah pihak, khususnya pihak RI, merasa menyetujui perjanjian itu adalah opsi terbaik yang dimiliki saat itu.

Untuk sesaat, “adu senjata” antara RI dan pasukan Belanda terhenti. Kesempatan ini digunakan oleh militer RI untuk sekali lagi berkonsolidasi menyatukan kekuatan. Jenderal Soedirman, bersama Urip Soemoharjo, berupaya menyatukan TRI bersama laskar-laskar perjuangan rakyat lainnya ke dalam satu wadah yang bersatu. Maka pada tanggal 3 Juni 1947 dibentuklah Tentara Na-

sional Indonesia (TNI) yang ditetapkan dengan Ketetapan Presiden.

Ditandatangani perjanjian Linggarjati meningkatkan kekecewaan terhadap Pemerintahan Syahrir. Sebagai akibatnya, Syahrir menyerahkan mandatnya dan Amir Syarifuddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru. Sementara itu pada saat yang nyaris bersamaan, bau mesiu yang keluar dari moncong senjata Belanda semakin tercium. Militer RI harus mempersiapkan diri menghadapi pasukan Belanda yang menunjukkan gejala ingin merobek-robek perjanjian yang telah mereka sepakati.

Agresi Belanda Pertama

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionilnya yang pertama, yang dikenal dengan nama Agresi Militer I. Belanda bergerak menyerang dari segala penjuru melalui darat, laut, dan udara. Kota Yogyakarta, pusat pemerintahan RI, menjadi target utama dalam aksi militer ini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah RI menjadikan Yogyakarta sebagai daerah militer khusus dengan Urip Soemoharjo sebagai gubernur militer. Letkol Soeharto bersama dengan Sultan Yogyakarta HB IX, termasuk di antara sepuluh orang staf pembantunya. Salah satu tugas Soeharto adalah terjun di pertempuran Ambarawa dan turut berperan dalam menahan serangan Belanda yang ingin memasuki Yogyakarta dari Semarang.

Di luar perhitungan Belanda, aksi ini menimbulkan reaksi keras di dunia internasional. Atas desakan berbagai negara, PBB memasukkan masalah ini ke dalam agenda sidang Dewan Keamanan. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB menyerukan agar kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata dan menyelesaikan perseteruannya di meja perundingan. Seruan ini kemudian diteruskan Jenderal Soedirman kepada seluruh jajaran TNI.

Mematuhi perintah Jenderal Soedirman, Soeharto memerintahkan pasukannya untuk menahan tembakan sembari menanti

hasil perundingan selanjutnya. Meskipun berada dalam kondisi gencatan senjata, pihak RI terus meningkatkan kewaspadaan. Dalam rangka memperbaiki kondisi setelah TNI dipukul mundur, didirikan sebuah lini depan baru yang berpusat di Kedu. Soeharto, bergiliran bersama komandan resimen lainnya, bergantian bertugas sebagai Komandan Front Kedu Utara pada bulan September dan Oktober 1947.

Kabinet Amir Syarifuddin Jatuh

Kabinet Amir Syarifuddin yang baru saja terbentuk, menghadapi tugas pertama mereka menyusun delegasi menuju perundingan yang dilaksanakan di akhir tahun 1947 di atas kapal perang Amerika, "Renville". Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1948. Anehnya, pimpinan delegasi Belanda dipegang oleh R. Abdul Kadir Widjoatmodjo, seorang "pengkhianat" pribumi. Tercatat pula beberapa nama Indonesia pada delegasi Belanda, di antaranya Tengku Zulkarnaen dan Mr. Dr. Soumokil (kelak terlibat dalam pendirian gerakan Republik Maluku Selatan).

Seperti telah diduga, perundingan ini menimbulkan akibat yang merugikan Indonesia. Daerah kekuasaan RI di pulau Jawa menjadi sepertiga dari luas sesungguhnya. Belanda menuntut TNI mundur dari Garis van Mook, yakni garis di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda pada saat Agresi Militer I. Rakyat serta tentara yang setia kepada RI kemudian memasuki daerah-daerah teritori RI yang sempit. Kota Yogyakarta seketika menjadi padat karena banyaknya pendatang yang mengungsi.

"Kami harus menyediakan atap untuk berteduh dan ruangan untuk berbaring bagi mereka yang berdatangan. Rumah-rumah jadi bertambah penghuninya. Asrama-asrama jadi padat. Gedung-gedung sekolah juga dipakai untuk tidur. Gudang-gudang dipakai untuk berhias. Malahan ada pendatang yang harus tidur di gerbong kereta api karena rumah-rumah sudah sesak dengan pendatang,"

rekam Soeharto tentang keadaan saat itu (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 48).

Segera terjadi kekacauan di mana-mana. Kehidupan rakyat juga semakin susah. Bahan pangan mulai berkurang. Pembatasan di segala bidang, termasuk di militer, mulai dilaksanakan. Kekecewaan terhadap kabinet Syarifuddin semakin menjadi saat rencana "Re-Ra" (Rekonstruksi-Rasionalisasi) yang diajukan oleh kabinet ini ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 1948. Walaupun Jenderal Soedirman dan Jenderal Urip Soemoharjo telah secara langsung menyampaikan rasa keberatan mereka, namun rencana ini tetap harus dijalankan. Banyak anggota TNI yang merasa kecewa dengan munculnya pengurangan jumlah anggota. Selain itu juga dilakukan penurunan pangkat militer. Hal ini berlaku juga pada Jenderal Soedirman yang diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal dan Letnan Jenderal Urip Soemoharjo menjadi Mayor Jenderal.

Kekacauan Akibat Rencana "Re-Ra"

Seperti menunggu waktu, akhirnya Kabinet Syarifuddin dibubarkan diganti dengan Kabinet Hatta. Meskipun demikian, pergantian kabinet ini tidak serta-merta membatalkan rencana "Re-Ra". Rasionalisasi menimbulkan rasa tidak suka di dalam tubuh militer karena dianggap menurunkan semangat juang. Semakin hari, semakin banyak pihak yang menentang rencana ini. Ironisnya, Amir Syarifuddin, yang notabene penyebab munculnya kebijakan ini, tiba-tiba saja berdiri sebagai oposisi yang menyuarakan paling keras ketidaksetujuannya terhadap "Re-Ra".

Kondisi perpolitikan Indonesia semakin kacau. Penculikan dan penembakan terhadap tokoh militer, politik, serta masyarakat semakin sering terjadi. Belum lagi eksodus besar-besaran pasukan Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah sebagai akibat perjanjian Renville yang mengharuskan mereka meninggalkan daerah Jawa Barat yang telah dikuasai Belanda, berpotensi menajamkan permusuhan antar

divisi (Elson, 2001: 63). Belakangan, Amir Syarifuddin membuat sensasi dengan menyatakan kepada umum bahwa dirinya adalah seorang komunis dan bergabung dengan Muso, tokoh komunis yang baru saja pulang dari Rusia.

Kekacauan ini membuat Soeharto tidak berselera untuk turut-serta dalam segala keruwetan dan cenderung memilih bersikap netral, dalam keadaan yang serba tidak menguntungkan. Pengalamannya pada Peristiwa 3 Juli tampaknya telah menghasilkan sebuah pelajaran agar senantiasa bertindak hati-hati dalam situasi yang tidak menentu. Pada akhirnya, di periode ini mulai tampak karakter khas Soeharto dalam menerjuni dunia politik seperti yang diutarakannya, “Saya, sebagai perwira muda saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik. Saya membaca berbagai peristiwa politik itu, dan dengan diam-diam saya menganalisisnya” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 50).

Menikah di Suasana Perang

Pernikahan mereka tidak didahului oleh perasaan cinta namun sekadar witing tresna jalaran saka kulina.

- **Retnowati Abdulgani-Knapp**, penulis *Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President* -

KEADAAN negara yang serba tak menentu akibat perang membuat Soeharto menghabiskan masa mudanya tanpa kehidupan percintaan. Tak pernah secara serius ia memikirkan rencana untuk menikah atau bahkan sekadar menjalin hubungan pertemanan dengan seorang wanita. Masa-masa rehat menjelang perundingan Renville tanpa sengaja telah memberinya kesempatan untuk memikirkan kembali kehidupan berkeluarga.

Di akhir tahun 1947, Soeharto mengunjungi keluarga Prawirowiharjo yang telah pindah dari Wuryantoro ke Yogyakarta. Ia tidak menduga, kunjungannya kali ini yang bermaksud bersilaturahmi pada keluarga pamannya akan membawanya memasuki suatu fase kehidupan baru.

“Harto, sekarang kamu telah dewasa. Usiamu akan menginjak 27 tahun. Bibi mengkhawatirkan masa depanmu. Di desa kita, laki-laki seusiamu rata-rata sudah menikah dan memiliki satu orang anak,” ujar Ibu Prawirowiharjo.

Awalnya, Soeharto tak terlalu memedulikan hal ini. “Saat ini kami sangat sibuk di resimen. Revolusi belum lagi berakhir.

Belanda bisa saja sewaktu-waktu menyerang. Tak bisakah kita menunggu setelah semuanya usai?" tolak Soeharto secara halus. Bagaimanapun, selama ini bibinyalah yang telah menggantikan Sukirah memainkan peran ibu bagi dirinya. Ia tak ingin keluarga bibinya itu menjadi kecewa karena penolakannya.

"Pernikahan tidak boleh dihalangi oleh perjuangan. Pernikahan adalah hal yang penting," desak bibinya lagi. Mau tidak mau hal ini membuat Soeharto mulai berpikir. Pernikahan dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban. Cepat atau lambat dirinya pasti harus melalui fase ini dalam kehidupannya.

Merasa ada kebenaran dalam kata-kata bibinya, Soeharto menjadi bingung. Selama ini peperangan telah membuatnya jauh dari romantika cinta. Dibutuhkan sepasang manusia berjenis kelamin berbeda untuk membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan. Sedangkan dirinya sendiri belum memiliki gambaran siapa kiranya yang dapat mendampingi kehidupannya kelak.

Diserang kebingungan seperti itu, Soeharto bertanya, "Tapi siapa yang akan menjadi pasangan saya? Saya belum memiliki calon."

"Kamu ingat Siti Hartinah, teman satu kelas adikmu Sulardi waktu sekolah dulu?"

Soeharto mengangguk. Wajahnya terlihat ragu. Saat itu kehidupan masyarakat Jawa masih kental dalam nilai-nilai konvensional yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Siti Hartinah adalah putri dari Wedana, yang bertugas di Mangkunegaran, Keraton Solo. Terbesit rasa rendah diri manakala "anak desa" sepertinya ingin meminang seseorang yang mewarisi darah biru.

"Saya ingat. Tapi apakah dia mau? Bagaimana dengan orangtuanya? Mereka berasal dari keluarga ningrat ..." ujar Soeharto dengan suara melemah.

Ibu Prawiro tersenyum mengerti melihat reaksi anak muda di depannya.

“Jangan khawatir. Bibi kenal seseorang yang dapat membantu kita bertemu dengan keluarga itu,” yakinnya kemudian. Sekali lagi Soeharto mengangguk.

Pertemuan Kembali dengan Calon Istri

Maka begitulah atas bantuan seorang perantara, keluarga Prawirowiharjo dapat bertemu dengan keluarga RM Tumenggung Soemoharjomo dalam sebuah upacara yang dikenal dalam budaya Jawa sebagai *nontoni*. Bapak dan Ibu Prawirowiharjo mendampingi anak angkat mereka untuk menemui putri Soemoharjono dan Hatmanti.

Meskipun telah berkali-kali terlibat dalam pertempuran yang menegangkan, tak urung Soeharto sedikit merasa keder menghadapi pertemuannya yang pertama setelah bertahun-tahun tak berjumpa dengan Siti Hartinah. Dalam hatinya, ada ketakutan bila Siti Hartinah tidak menyukainya.

Namun kenyataan berbicara lain. Pertemuan itu berlangsung lancar. Siti Hartinah telah banyak mendengar kisah tentang Soeharto dari temannya sesama anggota palang merah. Wanita yang berselisih usia dua tahun dengan Soeharto itu pun tak merasa keberatan menerima Soeharto sebagai suaminya. Kedua keluarga pun mencapai kata sepakat dalam menentukan waktu pernikahan.

Solo, 26 Desember 1947, Soeharto berangkat dari kota Yogyakarta menuju Solo dengan mengendarai kendaraan dinas. Ia mengenakan pakaian pengantin dengan sebilah keris di punggungnya. Ia berangkat ditemani Sulardi yang sepanjang perjalanan terus menerus menggodanya.

Pernikahan berjalan dengan meriah di sore hari. Banyak orang datang menghadiri pernikahan itu. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga dan teman-teman pengantin wanita. “Keluarga Pak Soemoharjomo cukup terpandang dan disegani di kota ini,” tulis Soeharto.

Malamnya, seperti layaknya adat Jawa, diadakan *slamatan*. Tak banyak cahaya yang dapat digunakan selama berlangsungnya upacara *slamatan* ini. Situasi perang membuat semua orang berhati-hati. Ada kemungkinan Belanda melancarkan serangan melalui udara. Oleh karena itu digunakanlah lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan.

Hanya tiga hari setelah pernikahannya, Soeharto “memboyong” istrinya ke kota Yogyakarta. Tempat di mana Siti Hartinah memulai kehidupannya yang baru sebagai istri dari Komandan Resimen. Kehidupan mereka sebagai pasangan suami-istri terbilang cukup harmonis. Jauh dari permasalahan-permasalahan yang mengundang perpecahan meskipun seperti kebanyakan orang Jawa saat itu, pernikahan mereka tidak didahului oleh perasaan cinta namun sekadar *witing tresna jalaran saka kulina* (cinta karena terbiasa/hidup berdekatan).

Siti Hartinah, “Sumber Kekuatan” Soeharto?

Masyarakat Jawa percaya bahwa “kekuatan” atau kesuksesan hidup bersumber pada kekuasaan kosmis. Untuk memperoleh *pamor*, seseorang harus berupaya memperoleh *wahyu* yang diturunkan oleh kekuatan kosmis tersebut melalui berbagai cara, antara lain dengan menjalani berbagai laku dan upaya ritual lainnya. *Wahyu* itu sendiri seringkali tidak langsung turun pada yang bersangkutan namun dapat juga melalui orang terdekatnya. Dalam kasus Soeharto, banyak orang meyakini bahwa *wahyu* tersebut diperoleh Soeharto melalui Siti Hartinah. Kematian *Ibu Tien* di tahun 1996, dipercaya telah menurunkan *pamor* Soeharto (Retnowati Abdulgani-Knapp, 2007: 30-31). Terbukti, hanya 2 tahun setelah kematian Ibu Negara, Soeharto dipaksa turun dari jabatannya sebagai presiden.

Siti Hartinah atau kelak saat menjabat sebagai Ibu Negara dikenal dengan sapaan “Ibu Tien”, adalah wanita yang berkarakter kuat meskipun dalam kesehariannya cenderung menunjukkan

sikap sebagai seorang yang pendiam. Lahir pada tanggal 23 Agustus 1924, sebagai anak kedua dari delapan bersaudara, ia dikenal cukup aktif dalam berbagai organisasi. Di saat kehidupan wanita Jawa lainnya masih dikungkung oleh nilai-nilai lama yang membatasi pergaulan wanita dalam kehidupan sosial, Siti Hartinah sebagai anak seorang wedana melibatkan dirinya pada *Fujinkai*, satu-satunya organisasi wanita yang diperbolehkan beroperasi pada masa penjajahan Jepang. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, ia bergabung dengan Laskar Wanita dan juga Palang Merah Indonesia.

Sebagai seorang istri pejabat militer, ia dikenal aktif menopang karier suaminya dengan mendirikan Ikatan Kesejahteraan Keluarga Hankam (IKKH) dan menjadi ketuanya. Sebagai seorang *First Lady*, ia kemudian dikenal sebagai penyokong berdirinya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Yayasan Harapan Kita.

Pernikahannya dengan Soeharto, menghasilkan enam orang anak; terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan. Anak pertama lahir pada tanggal 23 Januari 1949 dan diberi nama Siti Hardijanti Hastuti atau Tutut. Selanjutnya lahir Sigit Harjojudanto pada tanggal 1 Mei 1951, Bambang Trihatmodjo pada tanggal 23 Juli 1953, Siti Hediati Harijadi (Titiek) pada tanggal 14 April 1959, Hutomo Mandala Putra (Tommy) pada tanggal 15 Juli 1962, dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) pada tanggal 13 Agustus 1964.

Mengapa Siti Hartinah menerima pinangan Soeharto? Menurut Retnowati Abdulgani-Knapp (2007) mungkin saja ia “memiliki insting untuk sukses”. Semasa hidupnya, ia merefleksikan kehidupan wanita Jawa yang kuat dan berperan sebagai pilar keluarga.

Di satu sisi Siti Hartinah adalah sosok ibu yang sempurna namun di sisi yang lain, sebagai Ibu Negara ia tak luput dari sorotan dan kritik publik. Julukan “*Mrs. Ten Percent*” lekat pada dirinya untuk menggambarkan dugaan orang terhadap *fee* yang didapatkannya dari sejumlah proyek di masa Orde Baru (Retnowati

Abdulgani-Knapp, 2007: 30). Seperti juga suaminya, kehidupan Ibu Tien Soeharto diwarnai oleh kemisteriusan. Bahkan penyebab kematiannya yang tiba-tiba sempat menimbulkan desas-desus yang tak menentu dalam masyarakat. Meski demikian, setelah pernikahan yang dijalani dengan sederhana, karier suaminya secara mantap berjalan menuju kesuksesan. Seperti apa kilap karier militer Soeharto setelah menikah?

-8-

Pemberontakan Madiun

*"Dan saya, kalau akan dihancurkan, tidak akan menyerah begitu saja.
Saya akan melawan!"*

- **Muso** kepada Soeharto
(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

PERSELISIHAN antara pihak yang setia kepada pemerintah dengan pihak oposisi makin memuncak di pertengahan tahun 1948. Kondisi ini dirasa cukup membingungkan bagi perwira muda seperti Soeharto. Pengalamannya saat terlibat "Peristiwa 3 Juli" dulu membuatnya lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. Memilih jalan netral adalah satu-satunya cara yang aman baginya dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat menimpanya.

Di saat yang sama, konflik semakin meruncing. Pihak oposisi yang (lucunya) dipimpin oleh Amir Syarifuddin, terus berupaya memengaruhi berbagai pihak, termasuk pihak militer, untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Tak ayal perpecahan internal terjadi di dalam tubuh militer. Mereka yang merasa kecewa dengan solusi damai antara pemerintah dengan Belanda dan juga kebijakan Re-Ra yang ditetapkan Presiden 2 Januari 1948, akhirnya memilih bergabung dengan kelompok oposisi.

Terbentuknya FDR

Amir Syarifuddin yang didukung oleh PKI, Partai Buruh, dan Pesindo kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR di Surakarta. Bergabung dengan kelompok ini adalah orang-orang sosialis, seperti Setiadjit, Abdul Madjid, dan Tan Ling Djie. Perlawanan pihak oposisi ini makin menghebat manakala Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sejak tahun 1926 tinggal di Rusia kembali ke Indonesia. Kedatangan Muso di kota Yogyakarta pada bulan Agustus 1948 ini membuat FDR semakin yakin dengan langkahnya menentang pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, mereka menyelenggarakan rapat besar di tempat terbuka untuk menyerang kebijakan pemerintah.

Dengan memanfaatkan kekecewaan di kalangan militer, sedikit demi sedikit mereka dapat merangkul “orang-orang bersenjata”. Ada berita sebagian besar pasukan di Divisi Panembahan Senapati Surakarta, dengan komandannya Letnan Kolonel Suadi bersama komandan batalion Mayor Suharto, Mayor Slamet Rijadi, Mayor Sunitioso, dan Mayor Sudigdo, telah dikuasai oleh kelompok ini. Akibatnya sering terjadi bentrokan dengan Divisi Siliwangi yang loyal kepada pemerintah, yang saat itu memang sedang hijrah ke Jawa Tengah.

Hal ini tak lepas dari pengamatan Soeharto. Saat kembali dari Jawa Timur dan singgah di kota Surakarta untuk suatu kepentingan, ia ditahan oleh pasukan Siliwangi. Senjatanya dilucuti dan diinterogasi. Bingung dengan perlakuan yang diterimanya, ia menurut saja sewaktu dibawa ke markas Siliwangi. Untunglah di sana ia bertemu dengan kawannya, Kolonel Sadikin. Ternyata ada kesalahan. Pasukan Siliwangi mengira Soeharto sebagai Mayor Suharto, salah satu komandan batalion dari Divisi Panembahan Senapati. Setelah kesalahpahaman diluruskan, ia lalu dibebaskan. Pengalaman ini setidaknya memberikan gambaran bagi Soeharto tentang kondisi saat itu. Telah terjadi perpecahan di kalangan militer

dan Soeharto memilih untuk menahan diri, menanti di mana Panglima Besar Soedirman berpihak.

PKI Menguasai Madiun

Sementara itu, konflik antara Siliwangi dan militer-militer pro-FDR di Surakarta berujung pada terusnya kelompok anti-pemerintah ini ke wilayah timur. Pertengahan September, setelah Surakarta dikendalikan oleh Siliwangi, angkatan bersenjata dari Pesindo yang berafiliasi dengan PKI menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Di kota ini mereka membangun basis kekuatan baru dan mendeklarasikan berdirinya negara baru pada tanggal 18 September 1948. Sumarsono, pemimpin Pesindo diangkat menjadi gubernur militer daerah Madiun (Elson, 2001: 67).

Pengkhianatan di masa revolusi ini telah mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan, "Pilih Muso dengan PKI-nya atau pilih Soekarno-Hatta!"

Sementara itu, kondisi kesehatan Panglima Besar Soedirman yang tidak begitu baik memaksanya untuk menyerahkan tanggung jawab penyelesaian masalah deklarasi Madiun ini kepada Nasution dalam kapasitasnya sebagai kepala staf. Secara khusus, sebelumnya, Soedirman telah meminta kepada Soeharto untuk meyakinkan Letnan Kolonel Suadi Komandan Divisi Panembahan Senapati agar jangan sampai mengikuti FDR yang menentang pemerintah (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 52).

Setelah memperoleh perintah itu, barulah Soeharto merasa yakin Soedirman tidak mendukung gerakan Madiun. Ia lalu pergi ke Surakarta untuk menemui Suadi. Jelas, Panglima Besar tidak menghendaki adanya pertumpahan darah di antara pasukannya. Menurut kisahnya, Soeharto tak dapat menemui Suadi di Surakarta sehingga ia memutuskan mencari ke Wonogiri. Di Wonogiri inilah ia bertemu dengan Suadi. Tanpa basa-basi, Soeharto menyampaikan permintaan Panglima Besar Soedirman kepada Suadi yang kemudian mengajaknya melihat sendiri kondisi di Madiun.

Soeharto Bertemu Muso

Tiba di Madiun, Soeharto dipertemukan dengan seseorang yang mengenakan kemeja putih dan berkopiah. Ternyata orang itu adalah Muso. Menurut otobiografinya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 53), Soeharto mencoba meyakinkan Muso agar menghentikan pertikaianya dengan pemerintah. “Apakah tidak baik kalau kita tinggalkan permusuhan di antara kita ini dan bersatu menghadapi Belanda?” pinta Soeharto kepada Muso.

“Saya kembali ke Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai. Tetapi masalahnya, saya tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Saya tidak percaya lagi pada Belanda. Rupa-rupanya Soekarno dan Hatta tidak senang kepada saya. Bahkan saya akan dihancurkan. Dan saya, kalau akan dihancurkan, tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan melawan!” jawab Muso.

Setelah berdiskusi dengan Muso, Soeharto pulang ke Yogyakarta untuk melaporkan hasil pengamatannya kepada Jenderal Soedirman.

Mengenai kunjungan ke Madiun ini, terdapat dua versi cerita yang berbeda selain yang termuat dalam otobiografi Soeharto (Elson, 2001: 68). Versi pertama adalah versi Salim Said, penulis *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49*, yang melalui hasil wawancaranya dengan Soeharto menyatakan bahwa sebenarnya Soeharto telah mencapai kesepakatan bersama Muso untuk menghentikan pertikaian dengan “kondisi-kondisi tertentu”. Namun sayangnya Soeharto gagal kembali ke Yogyakarta sebelum Madiun diserang oleh pasukan yang setia pada pemerintah (Elson, 2001: 68).

Sedangkan versi kedua adalah cerita dari Sumarsono yang mengaku ikut serta mendampingi Soeharto mengelilingi kota Madiun. Menurut Sumarsono, Soeharto mendapati kota Madiun dalam keadaan damai. Tidak terjadi upaya pemberontakan di kota itu. Bahkan pihak Muso sangat menginginkan perundingan damai

dengan pemerintah di Yogya. Hanya saja, setelah Soeharto kembali ke Yogya informasi yang diberikannya tidak digubris oleh pemerintah karena pemerintah terlanjur mencap gerakan itu sebagai pemberontakan komunis yang berbahaya (Elson, 2001: 68).

Aksi Pembersihan

Lepas dari apa yang sebenarnya terjadi, upaya Soedirman untuk mencegah terjadinya saling bunuh di antara pasukannya gagal. Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Soebroto memimpin pasukan Divisi Siliwangi untuk menyerbu kota Madiun. Tanggal 30 September 1948, pemberontakan Madiun berhasil dipadamkan. Muso sendiri tewas pada tanggal 31 Oktober.

Aksi pembersihan terhadap anggota sayap kiri ini juga meluas di beberapa daerah, seperti Surakarta dan Yogyakarta. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penyerbuan Madiun, Soeharto memimpin anak buahnya melakukan upaya pembersihan di Wonosari dan Wonogiri. Para simpatisan PKI dilucuti sehingga dengan demikian Kabinet Hatta dapat kembali menjalankan pemerintahan dengan tenang.

Elson (2001) sekali lagi menandai keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa Madiun ini sebagai sebuah penonjolan karakter dari “Soeharto sang ahli yang cermat mengamankan, berubah menjadi Soeharto sang prajurit profesional.” Ada kecenderungan dari pribadi Soeharto untuk terlebih dahulu bersikap menunggu dalam mengamati setiap konflik, hingga akhirnya menjadi jelas pertimbangan kekuatan di antara pihak yang bertikai.

Setelah kasus Madiun, masih di tahun 1948, prahara yang lebih besar menanti Soeharto ...

-9-

Agresi Militer II Belanda

"Maka dengan sendirinya saya tidak bisa mencampuri apa yang dilakukan di kota itu. Saya sebagai komandan brigade hanya mempersiapkan pertahanan di luar kota, minus kota Yogyakarta."

- **Soeharto** pada Agresi Belanda II
(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

APA yang ditakutkan benar-benar terjadi. Belanda menunjukkan tanda-tanda ingin membatalkan perjanjian Renville. Pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda mengirimkan surat kepada Komisi Tiga Negara untuk memberitahukan bahwa mereka tak dapat melanjutkan perundingan dengan Indonesia.

Hal ini menimbulkan kecemasan bagi L.N. Palar, wakil RI di PBB. Palar kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan masalah Indonesia-Belanda ke dalam agenda pertemuan mereka.

Serangan Fajar di Maguwo

Niat buruk Belanda akhirnya terbukti. Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionol kedua mereka yang dikenal dengan nama Agresi Militer II Belanda. Aksi ini sebenarnya sudah diperhitungkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia

(APRI). Saat itu telah muncul keyakinan bahwa pihak Belanda sengaja menjadikan masa perundingan dengan Indonesia sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu guna menyusun kekuatan.

Meskipun telah diperhitungkan, tetap saja serangan Belanda kedua kalinya setelah proklamasi kemerdekaan RI ini mengejutkan pihak RI. Apalagi saat itu TNI baru saja kehilangan salah satu tokoh seniornya, Jenderal Urip Soemohardjo yang meninggal secara tiba-tiba di bulan November 1948.

Kota Yogyakarta, yang waktu itu menjadi pusat pemerintahan RI, adalah target utama Agresi Militer II Belanda. Pukul 5.30 Soeharto terbangun oleh suara dentuman bom yang berasal dari Lapangan Udara Maguwo, berada 6 kilometer sebelah timur kota Yogyakarta. Segera ia menghubungi Letnan Maya Retna yang saat itu sedang bertugas, untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan.

Maguwo bertubi-tubi dijatuhi bom. Tak ada perlawanan yang berarti ketika Belanda akhirnya menguasai lapangan udara itu. Sekitar 900 prajurit Belanda diterjunkan dengan menggunakan parasut. Serbuan kilat ini juga didukung oleh mendaratnya Brigade Marinir Belanda.

Yogya Jatuh ke Tangan Belanda

Letnan Kolonel Soeharto yang bertanggung jawab menjaga keamanan pinggiran kota Yogyakarta berusaha menghambat gerak laju Belanda yang bermaksud masuk ke pusat kota. Saat itu sebagian besar kekuatan TNI sedang dipusatkan di luar kota. Akibatnya hanya ada segelintir saja kekuatan militer yang bertahan di Yogyakarta.

“Saya menyadari tugas yang berat itu dalam keadaan tanpa pasukan,” kenang Soeharto, “Saya masih juga berusaha menghambat pasukan musuh yang bergerak. Maksud saya memberi kesempatan kepada pemerintah di kota untuk melakukan bumi hangus.”

Waktu itu kota Yogyakarta berada dalam tanggung jawab Komando Militer Kota (KMK) yang dipimpin oleh Letkol Latif Hendraningrat. “Maka dengan sendirinya saya tidak bisa mencampuri apa yang dilakukan di kota itu. Saya sebagai Komandan Brigade hanya mempersiapkan pertahanan di luar kota, minus kota Yogya,” terang Soeharto.

Praktis untuk menghambat serangan Belanda, Soeharto hanya mengandalkan dua seksi dari brigadenya, dibantu dengan beberapa anggota polisi dan resimen mahasiswa. Menurut cerita Soeharto saat itu hanya ada satu kompi saja untuk mengadakan perlawanan terhadap musuh. Sedangkan di kota hanya ada satu kompi, pengawal kompi brigade, dan pengawal presiden.

Kurangnya tenaga militer serta kepanikan atas serangan dadakan membuat kota Yogyakarta dengan mudah jatuh ke tangan Belanda. Dilaporkan dalam serangan ini Belanda hanya kehilangan satu orang prajurit dan tiga orang luka-luka. Pukul 2 siang, kota Yogyakarta telah dapat dikuasai oleh pihak *aggressor*. Untuk kepentingan perlawanan selanjutnya, TNI memilih mundur sementara ke luar Yogyakarta bersama Panglima Besar Jenderal Soedirman yang baru saja mengalami pembedahan paru-paru. Belanda lalu menangkap pemimpin sipil Republik, termasuk Soekarno-Hatta. Sultan HB IX urung ditangkap karena menolak untuk menemui Mayjen. J.K. Meijer.

Nasution Menyalahkan Soeharto

Mengenai mudahnya pasukan Belanda memasuki kota Yogyakarta ini sempat menuai kritik dari Nasution yang menilai Soeharto “lamban dalam menjalankan perintah dan tidak tegas” (Elsan, 2001: 71). Meskipun Soeharto mengklaim pasukannya telah dengan sengaja diundurkan ke Pos Purworejo namun muncul penyesalan dan perasaan bersalah dalam diri Soeharto. Dalam otobiografinya ia menyebutkan, “Sewaktu tembak-menembak itu saya sungguh prihatin, bagaimana kecewanya rakyat ibukota Yogyakarta

menyaksikan Belanda dengan mudah masuk ke tengah kota. Mereka tentu tidak akan tahu bahwa saya tidak punya pasukan ...” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 58).

Mundur dari Yogyakarta adalah keputusan berat yang harus diambil Soeharto. Ini berarti ia meninggalkan istrinya, Siti Hartinah, yang sedang hamil tua. Keadaanlah yang memaksa Soeharto untuk keluar dari Yogyakarta, bergerilya bersama pasukannya. Ia lalu mundur ke Gunungpiring untuk kemudian mendirikan markas baru di Bibis, yaitu di rumah kepala desa bernama Harjowiyadi.

Saat itu, nasib para pejuang sangat bergantung pada sokongan yang diberikan oleh rakyat. Mereka hidup dari sumbangan penduduk setempat. Sebagai gantinya, para pejuang juga menawarkan tenaganya untuk membantu penduduk di segala bidang, seperti bertani atau membangun rumah.

Letak markas baru ini yang tak jauh dari Gua Selarong, tempat Pangeran Diponegoro memusatkan kekuatannya melawan penjajahan kolonial Belanda, membuat Soeharto merasa sedikit tenang. Kadang kala di malam hari, ia pergi ke Gua Selarong untuk menjalankan laku spiritual, berharap memperoleh inspirasi menghadapi musuh yang sama, Belanda (Roeder, 1969: 119).

Tutut Lahir

Atas perintah Jenderal Soedirman dan koordinasi Kolonel A.H. Nasution yang saat itu dipercaya memimpin komando di seluruh Jawa, serta wakilnya T.B. Simatupang, Soeharto bersama pasukannya kemudian menjalankan siasat perang gerilya dengan mendirikan kantung-kantung gerilya (*weh르크riesse*). Ketika sedang berada di markas baru inilah Soeharto mendengar bahwa istrinya telah melahirkan anak pertama mereka pada tanggal 23 Januari 1949, seorang putri, yang kemudian diberi nama Siti Hardijanti Hastuti (Tutut). Tutut kemudian kelak menjadi pendamping setia ayahnya di dunia politik, terutama setelah Ibu Tien wafat.

Kelahiran anak pertamanya ini tentu saja menghadirkan rasa senang sekaligus cemas bagi Soeharto. Bagaimanapun, sebagai seorang suami yang baru saja menjadi seorang ayah, ada keinginan yang kuat untuk mengunjungi keluarga yang ditinggalkannya di wilayah musuh. Soeharto berpikir keras menemukan jalan kembali ke Yogyakarta.

-10- Serangan Umum 1 Maret 1949

“Otak saya seakan-akan berputar, cari akal, bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI”

- **Soeharto** tentang SU 1 Maret 1949
(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

SEPERTINYA bulan Maret menjadi bulan yang paling banyak mendatangkan “hoki” bagi Soeharto. Di bulan ini, paling tidak ada dua kejadian (berbeda tahun) yang memiliki nilai historis tinggi dalam melambungkan kariernya.

Kejadian pertama adalah saat Soeharto berperan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang arti penting dari peristiwa ini dipercaya telah membakar semangat juang militer Indonesia yang sebelumnya sempat padam disiram oleh Agresi Belanda II. Efek lain adalah memberikan “modal” argumentasi bagi delegasi-delegasi yang mewakili Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Terpukulnya Belanda dari kota Yogyakarta telah membuka mata dunia internasional tentang keberadaan TNI sekaligus menyudutkan perwakilan Belanda di meja perundingan.

Peristiwa penting kedua dalam bulan Maret adalah ketika Soeharto, dengan berbagai cara yang diyakini oleh beberapa orang

sebagai sebuah “kudeta merangkak”, berhasil memperoleh limpahan Supersemar yang kelak akan mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, Serangan Umum 1 Maret 1949 telah menjadi ajang yang tepat bagi Soeharto untuk menunjukkan ke-trampilannya sebagai seorang pelaksana lapangan yang pandai melakukan manuver militer. Tidak seperti disangka orang, Soeharto memang benar-benar terlibat atau bahkan berperan besar dalam pelaksanaan serangan ke kota Yogyakarta ini.

Kontroversi menyeruak manakala Soeharto kelak dalam otobiografinya menunjukkan “seolah-olah” telah menjadi satu-satunya tokoh yang paling berjasa dalam merancang SU 1 Maret 1949. Hal ini juga tergambar dari film *Janur Kuning* yang diproduksi pada masa Orde Baru. Aksi kesombongan “*one man show*” ini tentu saja kemudian mengundang rasa tidak suka, terutama karena Soeharto dianggap telah mengecilkan peran penting tokoh-tokoh lain yang terlibat.

Soeharto Mengaku Sebagai Penggagas SU 1 Maret 1949

Dalam otobiografinya yang banyak diributkan orang, Soeharto berkisah tentang betapa dirinya merasa bersalah dengan terpukuhnya TNI dari kota Yogyakarta, “Otak saya seakan-akan berputar, cari akal, bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 58).

Hasil perenungannya berujung pada sebuah kesimpulan tentang pentingnya mengadakan serangan balasan secepat mungkin ke ibukota. Soeharto sadar bahwa Yogyakarta merupakan ibukota Republik. Apa pun yang terjadi di ibukota akan sangat besar pengaruhnya terhadap perlawanan di daerah lain dan juga pandangan dunia luar terhadap Indonesia.

Soeharto kemudian mulai membangun pasukan-pasukan di sekeliling kota Yogyakarta. Di sebelah barat ia menunjuk Mayor

Ventje Sumual untuk memimpin. Sementara di sebelah utara, terdapat sedikit masalah karena pangkatnya lebih rendah dari Komandan Militer Akademi Kolonel Djatikusumo. Sebagai gantinya, ia meminta Mayor Kasno untuk memimpin pertempuran MA. Di selatan dan timur ia mengandalkan Batalion Soedjono yang baru saja tiba dari Purworejo. Sedangkan untuk kota ia menyerahkan koordinasi serangan pada Letnan Marsudi dan Letnan Amir Murtono.

Selesai berhitung dengan kekuatannya, ia lalu menyusun rencana untuk melakukan serangan umum yang pertama. "Maksud saya bukan untuk menduduki, melainkan untuk menunjukkan kepada rakyat dan kepada Belanda bahwa TNI masih ada," ujar Soeharto sedikit beralasan mengenai kegagalan serangan pada tanggal 30 Desember. Kegagalan ini tidak menyurutkan semangat Soeharto. Semua sektor terus diperintahkan melakukan penyerangan. Tujuan penyerangan ini bukanlah untuk menduduki daerah namun sekadar memperlemah kekuatan musuh (Dwipayana & Ramadhan, 1989: 60).

Setelah berbagai penyerangan kecil yang dilakukan di bulan Desember, Januari, dan Februari, Soeharto lalu mulai memikirkan untuk melancarkan sebuah serangan umum yang mengejutkan pihak Belanda. Rupanya, Soeharto merasa jengah dengan berita palsu serta propaganda yang digembar-gemborkan pihak musuh yang mengabarkan bahwa perlawanan TNI makin melemah. Soeharto terobsesi untuk menghancurkan kebohongan Belanda. Tujuan serangan umum ini, menurut Soeharto, adalah politis. Dunia luar perlu mengetahui jika TNI masih mampu melakukan perlawanan. Dengan penuh tekanan, ia menyampaikan bahwa serangan ini bukan untuk menduduki kota karena menurutnya hal itu bukanlah bagian dari taktik gerilya.

Jalannya Serangan

Sistem *Wehrkreise* yang digunakan telah memberikan keleluasaan bagi setiap Komandan *Wehrkreise* untuk melakukan inisiatif. Hal ini dimanfaatkan oleh Soeharto untuk menguji kemampuannya melalui sebuah serangan umum. Akhir bulan Februari, Soeharto bersiap untuk memimpin penyerangan. Setiap anggota TNI diminta untuk mengenakan janur kuning sebagai tanda pengenal. Namun belum sempat komando dibunyikan telah terdengar suara tembakan di penghujung malam. Rupanya, salah satu anak buahnya, Letnan Komarudin, telah salah paham mengenai waktu serangan umum yang telah ditentukan. Ia melakukan serangan lebih cepat dari waktu semestinya.

Serangan pendahuluan yang tidak disengaja ini menjadi berkah bagi Soeharto. Pasukan Belanda mengira serangan ke-esokan paginya hanyalah serangan serupa, dalam skala kecil dan tidak berbahaya. Pukul 06.00 bersamaan dengan bunyi sirene yang menandai berakhirnya jam malam, pasukan Soeharto menyerbu kota Yogyakarta dari segala penjuru. Sebelumnya, beberapa anggota pasukan telah menyusup ke dalam kota. Dalam keadaan masih mengantuk, tentara Belanda dibuat kocar-kacir. Hanya dalam waktu yang singkat, bendera merah putih telah berkibar di Malioboro. Rakyat pun riuh memekikkan teriakan “Merdeka!”.

Sesuai perkiraan, Kolonel van Langen, komandan tentara Belanda di Yogyakarta lalu meminta bantuan dari Brigade Gajah Merah di Semarang. Begitu pasukan yang dipimpin oleh Kolonel van Zanten tiba di Yogyakarta, Soeharto memerintahkan pasukannya mundur.

Hanya dua belas jam Yogyakarta dikuasai TNI namun Soeharto merasa cukup puas. Berita tentang keberhasilan TNI merebut kota Yogyakarta ini pun kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui radio. Dunia internasional menjadi tahu bahwa TNI masih ada.

Siapa Penggagas SU 1 Maret 1949 Sebenarnya?

Membaca kisah Serangan Umum 1 Maret 1949 versi Soeharto, kita tak akan menemukan nama-nama tokoh militer seperti Nasution (saat itu memegang komando TNI di penjurul pulau Jawa), T.B. Simatupang (wakil dari Nasution), Bambang Sugeng (Panglima Divisi III), bahkan juga tak ada sekali pun nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX (penguasa keraton Yogyakarta yang disegani oleh Belanda). Berbagai sumber yang memuat kisah Serangan Umum 1 Maret ini menunjukkan adanya indikasi penonjolan diri yang berlebihan oleh Soeharto dengan menghilangkan peran dari tokoh-tokoh tersebut. Seakan-akan ingin menegaskan dirinya sebagai penggagas tunggal Serangan Umum 1 Maret, Soeharto menulis, "Waktu itu tidak ada komunikasi antar-pimpinan TNI. Pak Dirman (Jenderal Soedirman - *ed.*) sudah berada di dekat Jawa Timur. Mungkin sudah di Pacitan. Mungkin sudah di Desa Sobo. (Sedangkan) Komando Panglima Divisi ada di Ngangkrik, Magelang. Kita membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa sampai ke sana." (Dwipayana & Ramadhan, 1989: 60)

Anehnya, dalam biografi Soeharto versi Roeder (1969), dengan tegas dikatakan bahwa sebelum menjalankan Serangan Umum 1 Maret, Soeharto kerap kali menyusup ke dalam keraton untuk bertemu dan berdiskusi dengan Sultan. Dalam kesempatan itu, Soeharto dan Sultan yang berpangkat kolonel kemudian sepakat untuk menjalankan sebuah rencana yang mereka sebut sebagai "Serangan Umum". Kesaksian ini diperkuat oleh Hendrobujono yang saat itu menjadi *abdi dalem* keraton. Ia mengaku sering mengantarkan Soeharto menemui Sultan setelah sebelumnya Soeharto menyamar sebagai petani yang membawa sayuran ke keraton (Roeder, 1969: 120).

Saat itu Sultan merupakan satu-satunya figur di Yogyakarta yang disegani oleh pihak Belanda. Belanda tidak berani memasuki keraton secara sembarangan karena mengetahui bahwa Sultan merupakan simbolisasi dari kekuatan rakyat. Menyakiti Sultan

berarti juga membangkitkan perlawanan dari seluruh rakyat Yogyakarta yang hingga kini terkenal patuh pada rajanya. Dengan dasar pertimbangan inilah yang mungkin membuat Sultan lolos dari penangkapan Belanda di saat Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta justru ditangkap dan dibuang ke luar Jawa.

Peran keraton dalam serangan umum ini tampak pada beberapa laporan Belanda yang mengatakan bahwa pasukan Republik berpusat di lingkungan keraton. Beberapa orang bahkan melepaskan tembakan dari pucuk pohon dalam keraton (Elson, 2001: 81). Belanda juga melaporkan, pengejaran yang dilakukan terhadap para pejuang Republik terhenti saat para pejuang itu menghilang di lingkungan keraton. Berdasarkan bukti-bukti ini, bagi Elson akan lebih dapat diterima oleh akal bila menganggap Sultanlah sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret. Baginya, sangat tidak mungkin ide serangan ini dilontarkan oleh Soeharto yang saat itu masih terhitung sebagai perwira yunior dengan pengalaman terbatas. Aspek diplomatis dari tujuan penyerangan ini tentunya lebih mungkin dihasilkan dari pemikiran seseorang yang memiliki wawasan luas, memahami sisi lain dari politik, serta kegiatan militer, seperti yang dimiliki oleh Sultan HB IX (Elson, 2001: 79).

Sanggahan, tidak secara terang-terangan, dimuat Soeharto dalam otobiografinya. Soeharto menolak bahwa penyusupannya ke keraton dilakukan sebelum dilangsungkannya Serangan Umum 1 Maret. Menurutnya, penyamaran yang ia lakukan ke dalam keraton dilakukan pada bulan Mei 1949, yaitu untuk membicarakan masalah penyerahan kekuasaan oleh Belanda. "Jadi sesudah Serangan Umum 1 Maret 1948," tegas Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 66).

-11-

Dampak Serangan Umum 1 Maret 1949

“Overste Soeharto, kalau Overste tidak mendukung saya, mandat akan saya kembalikan.”

- **Sri Sultan HB IX** marah kepada Soeharto yang menolak penyerahan kekuasaan Belanda (Roeder, 1969) -

TERLEPAS dari siapa sebenarnya yang menggagas ide Serangan Umum 1 Maret 1949 ini, peran Soeharto telah mengundang berbagai pujian. Dunia internasional memberikan tekanan yang keras pada Belanda untuk segera mengakhiri upaya mereka mempertahankan kolonialismenya di Indonesia. Salah satu negara yang paling keras menyuarakan ancamannya adalah Amerika Serikat, yang tak segan untuk memberikan sanksi politik juga finansial kepada Belanda.

Di dalam negeri, efek serangan ini benar-benar luar biasa. Para pejuang di daerah lain seperti menemukan gairah baru dan semakin terinspirasi untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Beberapa pemimpin negara boneka, kemudian mengubah sikap mereka, berbalik mendukung Republik. Para pemimpin sipil yang dibuang di Bangka semakin membulatkan tekad mereka untuk menolak bekerjasama dengan Belanda. Nasution mencatat, setelah dilangsungkannya Serangan Umum 1 Maret, perjuangan gerilya semakin meningkat, bahkan juga dilakukan di siang hari.

Atas hasil gemilang ini, Jenderal Besar Soedirman dalam suratnya kepada Nasution memberikan pujian kepada Soeharto dengan sebutan, “bunga pertempuran” (Tim PDAT, 1998: 66).

Menolak Penyerahan Kekuasaan Oleh Belanda

Belanda yang telah kehilangan dukungan dari sekutu terkuatnya, Amerika Serikat, lalu merasa putus asa melanjutkan misi mereka di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1949, dilangsungkanlah Perjanjian Roem-Royen yang isinya antara lain menegaskan kesepakatan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, pembebasan pemimpin Republik – termasuk Soekarno-Hatta, penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta, dan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk menyelesaikan permasalahan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Pengalamam buruk di masa lampau telah mengikis kepercayaan pihak militer kepada Belanda. Jalan diplomasi tidak lagi dipercaya sebagai solusi untuk mengakhiri kolonialisme. Untuk itu, para pejuang gerilya terus melanjutkan serangan-serangan mereka kepada pasukan Belanda. Menurut sebuah laporan intelijen Belanda, pada bulan Juni telah bertemu beberapa petinggi militer, seperti Djatikusumo, Nasution, Soeharto, dan para Komandan *Wehrkreise* di Jiwosari untuk menggencarkan perjuangan tanpa memedulkan hasil dari diplomasi politik oleh elite sipil.

Mungkin dengan alasan ini pula Soeharto menolak menerima penyerahan secara formal kota Yogyakarta oleh Belanda. Dalam bukunya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 66) ia menulis,

“Saya tidak merasa bahwa Belanda berkuasa di Yogya. Sebab itu saya berpendirian, kalau belanda akan meninggalkan Yogya, ya, tinggalkan sajalah. Saya tidak mau diadakan upacara serah terima secara resmi dari Belanda kepada Indonesia. Saya tidak memandang Belanda berkuasa di sini ...”

Penolakan ini membangkitkan amarah Sultan. Raja Yogya itu lalu menulis kepada Soeharto, “*Overste* Soeharto, kalau *Overste* tidak mendukung saya, mandat akan saya kembalikan.”

Menyamar untuk Bertemu Sultan

Merasa perlu menjelaskan alasan penolakannya kepada Sultan, maka ia lalu menyamar masuk ke keraton untuk bertemu empat mata dengan penguasa Jogja itu. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Soeharto alasan penolakannya. Lebih lanjut juga ia menolak bila penyerahan kekuasaan diberikan kepada Brigade Mobil Polisi yang dipimpin oleh Jen Mohammed. Menurutnya, sebagai Komandan Perang daerah Yogyakarta, ia beserta pasukannya lah yang harus mengemban tanggung jawab ini. Maka dilangsungkanlah penarikan mundur pasukan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949 dengan damai.

Pasukan TNI dan Polisi berbaris memasuki kota Yogyakarta. Hal ini mendatangkan kesempatan bagi Soeharto untuk melepaskan kerinduannya pada sang istri dan putri mereka. Tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Sebelas hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Juli, Soeharto atas nama Sultan, menyerahkan secara simbolis tanggung jawab keamanan kota kepada Jen Muhammed.

Peran Soeharto semakin sentral dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Meskipun sempat diterpa isu rivalitasnya dengan Djatikusumo, perwira keturunan keraton Solo, mengenai siapa yang akan memegang komando daerah di Yogyakarta, Soeharto terus mendapatkan kepercayaan dari Sultan untuk mengamankan wilayah ibukota. Soeharto dipercaya oleh Sultan untuk melucuti angkatan-angkatan yang keberadaannya tidak jelas di Yogyakarta. Di antara angkatan itu adalah KRIS yang dipimpin oleh Ventje Sumual. Dalam lain kesempatan, ia juga melakukan pembersihan atas aktivitas-aktivitas yang mencurigakan dari golongan sayap kiri, PKI. Peningkatan peran yang dialami oleh Soe-

harto ini juga diperkuat oleh berbagai laporan Belanda yang semakin sering menyebut namanya di pertengahan tahun 1949.

Bagi Elson, era perjuangan gerilya ini mungkin sekali menjadi penyebab terbentuknya pandangan “merendahkan politisi sipil oleh pemimpin militer”. Mengutip pernyataan Reid, Elson mengatakan bahwa “rasa hormat militer terhadap pemerintah sipil sangat melemah pada masa ini (Orde Baru), dan hasilnya terlihat nyata sejak saat itu” (Elson, 2001: 94). Kelak akan terbukti, munculnya beberapa konflik antara pemimpin militer dengan politisi sipil, satu di antaranya, yaitu yang terjadi di tahun 1965-1966, telah mengganggu jalan Soeharto menuju ke tampuk kekuasaan.

Membujuk Jenderal Soedirman Kembali ke Yogyakarta

Sepertinya ketidakpercayaan terhadap hasil perundingan yang dijalankan oleh kaum politisi sipil dengan pihak Belanda bukan satu-satunya milik Soeharto. Meskipun keadaan pemerintahan RI telah pulih kembali, namun Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap menolak kembali ke Yogyakarta. Ia lebih memilih untuk bertahan di markas gerilyanya di dekat Wonosari. Meskipun Sultan dan Kolonel Gatot Soebroto juga secara khusus telah memintanya kembali ke Yogyakarta, namun Jenderal Soedirman yang masih curiga terhadap niat Belanda, memilih untuk bertahan di luar Yogyakarta sembari bersiap-siap menghadapi serangan musuh.

Merasa khawatir dengan kondisi fisik Soedirman yang semakin lemah karena sakitnya, Sultan sebagai Menteri Koordinator meminta Soeharto menjemput (dalam istilah Soeharto, “membujuk”) Sang Jenderal kembali ke Yogyakarta. Pilihan yang jatuh kepada Soeharto untuk “membujuk” Jenderal Soedirman ini mungkin disebabkan prestasi Soeharto dalam perang gerilya yang juga telah memperoleh pengakuan dari Soedirman. Soeharto sendiri dalam berbagai kesempatan di otobiografinya menunjukkan rasa hormat yang besar bagi Panglimanya. Jika ada orang yang benar-

benar dikagumi selama hidupnya, orang itu tentulah Jenderal Soedirman.

Tanggal 8 Juli Soeharto berangkat menemui Soedirman. Meskipun mengklaim bahwa dirinya tidak memiliki kedekatan hubungan dengan Soedirman, *tokh* Soeharto berhasil meyakinkan Panglimanya itu untuk kembali ke Yogyakarta. Tanggal 9 Juli Jenderal Soedirman dengan ditandu berangkat ke Yogyakarta. Rombongan Jenderal Soedirman tiba di Kali Opak pada tanggal 10 Juli dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang telah dipersiapkan oleh TB Simatupang.

Setibanya di Yogyakarta, Soedirman dieluk-elukan rakyat di sepanjang jalan. Soedirman yang memang merasa tidak ada kecocokan dengan politisi sipil (sebagian disebabkan karena rasa kecewanya kepada Soekarno yang menyalahi janjinya semula akan ikut bergerilya bila Belanda melancarkan serangannya ke Yogyakarta) bermaksud menghindari pertemuan dengan Soekarno dan ingin langsung bergabung dengan pasukan yang telah menunggunya. Atas usul Soeharto, Soedirman akhirnya mau bertemu dengan Soekarno. Turun dari *jeep*, Soedirman lalu dipeluk oleh Soekarno. Soeharto mencatat peristiwa ini, “Mulanya Panglima Besar kita tidak mau berbuat begitu, tetapi barangkali dipandanginya tidak baik bila menolak, dipandanginya perlu dilakukan sekalipun untuk sandiwara ...” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 71).

Setelah bertemu dengan Presiden, Jenderal Soedirman pergi ke alun-alun untuk melaksanakan upacara bersama pasukan kehormatan. Upacara itu ternyata upacara terakhir bagi Sang Panglima. Tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Soedirman wafat. Soeharto memimpin upacara pemakamannya dari Magelang ke Yogyakarta.

Tanggal 27 Desember 1949, hasil perjanjian KMB menetapkan kedaulatan negara Republik Indonesia Serikat. Wakil mahkota Belanda menyerahkan kedaulatan kepada wakil Indonesia, Sultan HB IX. Saat itu pula kedudukan Soeharto telah semakin kuat di

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Satu lagi anak tangga menuju kekuasaan telah dilampaui olehnya ...

-12- Menumpas Pemberontakan Andi Aziz

“Kahar tidak pernah menepati janjinya. Dia akan banyak menimbulkan masalah di daerah itu.”

- **Soeharto** tentang penunjukan Kahar Muzakkar
(Roeder, 1969) -

TAHUN 1950-1959 adalah masa yang penuh ketidakpastian bagi Indonesia. Hasil perundingan KMB telah membuat Indonesia terpecah menjadi enam belas negara bagian. Secara otomatis, hal ini memunculkan ancaman bagi persatuan nasional. Meskipun hanya dalam beberapa minggu negara-negara bagian lain dari RIS meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia, namun tetap saja muncul segelintir orang yang menolak untuk bergabung dengan RI. Akibatnya, di beberapa daerah muncul pemberontakan-pemberontakan yang disulut oleh bekas pasukan bentukan Belanda, seperti KNIL/KL, bekas laskar gerilya yang menolak bergabung dengan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), maupun pemberontakan yang bersifat kedaerahan seperti Permesta, PRRI, DI/TII dan sebagainya.

Selain itu, juga muncul keretakan dalam tubuh Angkatan Darat. Perkembangan keadaan telah membuat Angkatan Darat ter-

pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kumpulan militer “profesional” yang menginginkan tentara menjadi pasukan teknis, efisien, dan berukuran kecil, sementara kelompok kedua terdiri dari bekas anggota PETA atau angkatan lainnya yang berpengalaman dalam pertempuran fisik di masa revolusi namun takut tersingkir oleh rencana rasionalisasi TNI (Elson, 2001: 113). Masalah ini diperparah dengan bergabungnya beberapa kesatuan pada pemberontakan-pemberontakan di daerah.

Secara tidak sengaja, masa yang penuh ketidakpastian ini telah menyediakan banyak kesempatan bagi Soeharto untuk lebih meningkatkan karier militernya di masa mendatang. Sebagai perwira muda yang berpengalaman dalam pertempuran dan tidak (belum) tertarik untuk menekuni bidang politik (kemungkinan karena rasa traumanya akan pengalaman masa lalu yang nyaris menyeretnya terlibat dalam kelompok Tan Malaka di Peristiwa 3 Juli), Soeharto memperoleh kepercayaan untuk menyelesaikan gejolak di beberapa tempat yang pada akhirnya turut mengangkat namanya di jajaran Angkatan Darat. Pada masa ini jugalah Soeharto mulai belajar bagaimana membangun bisnis yang menguntungkan dengan memanfaatkan jaringan serta koneksi strategis yang dimilikinya.

Pemberontakan Andi Aziz

Pada tahun 1950, RIS tinggal terbagi menjadi empat negara bagian, yaitu Republik Indonesia yang dominan menjalankan pemerintahan RIS, Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan Negara Indonesia Timur. Sejak semula hasil perundingan KMB memang hanya digunakan pihak RI untuk mempermudah memperoleh pengakuan kedaulatan dengan menerima bentuk negara serikat, untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan rencana ini di Negara Indonesia Timur, sebuah negara bagian yang besar dan terkenal kedekatannya dengan pihak Belanda, pemerintah RIS bermaksud

menambah jumlah pasukan APRIS di Makassar yang saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Junus Mokoginta yang hanya dibantu oleh beberapa staf dan Polisi Militer dalam jumlah terbatas.

Kedatangan APRIS yang merupakan wujud dari TNI ini menimbulkan ketidaksukaan pada pasukan KNIL di Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Azis, seorang putra Bugis. Atas perintah Menteri Kehakiman Indonesia Timur, Dr. Soumokil, Kapten Andi Aziz kemudian menahan Letnan Kolonel Achmad Junus Mokoginta dan melucuti senjata milik Polisi Militer.

Kapten Andi Azis lalu pada tanggal 5 April 1950 mengklaim menguasai Makassar dan mengirimkan ancaman agar pasukan TNI tidak mendarat di tanah Makassar. Pemerintah RIS di Jakarta (yang telah kembali menjadi pusat pemerintahan) melalui Soekarno pada tanggal 13 April 1950 menyatakan Andi Azis sebagai pemberontak. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah RIS lalu mencoba jalur negosiasi dengan mengundang Andi Azis datang ke Jakarta. Karena lewat pada masa yang telah ditentukan belum memenuhi panggilan, maka pemerintah RIS membentuk satu pasukan ekspedisi yang terdiri dari Brigade XVIII/Divisi I Jawa Timur yang dipimpin Letnan Kolonel Suprpto Sukowati dan Letnan Kolonel Warrouw, Brigade Mataram/Divisi III Jawa Tengah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, serta Batalion I dari Brigade XIV/Siliwangi Jawa Barat yang dipimpin oleh Kapten Bohar Ardikusuma. Selain itu turut serta satu batalion yang dipimpin oleh Mayor Andi Matalatta. Sebagai pimpinan pasukan ekspedisi ini, ditunjuk Letnan Kolonel A.E. Kawilarang.

Insiden Penembakan Letnan Yan Ekel

Dengan penuh rasa bangga, walaupun hanya sedikit waktu yang dimiliki untuk mempersiapkan pasukannya, Soeharto berangkat dan ditempatkan di kota Makassar. Terjadi sedikit perubahan rencana karena Andi Azis pada tanggal 16 April 1950 menyatakan menyerah dan bersedia datang ke Jakarta. Misi pasukan

menjadi berubah mengamankan daerah Makassar. Soeharto bertanggung jawab memimpin Sektor Makassar yang meliputi Kota Makassar, daerah pantai Jeneponto hingga Gunung Lampobattang, dan beberapa daerah di sekitarnya.

Selain menghadapi KNIL, pasukan Soeharto juga dibebani tugas untuk mengkoordinir pasukan-pasukan gerilya lokal yang belum bergabung dalam APRIS. Tugasnya ini kemudian mengakibatkan munculnya perselisihan dengan satu batalion KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) dan pasukan Mobil Brigade Ratulangi (MBR) yang menolak untuk dimasukkan dalam APRIS meskipun secara umum mereka adalah pasukan yang pro-Republik. Arief Rate pimpinan pasukan KGSS dan MBR tewas dalam perselisihan ini. Oleh Roeder, kematian pahlawan lokal Andi Rate ini kemudian dianggap menjadi penyebab tumbuhnya rasa sakit hati penduduk Makassar terhadap “orang-orang Jawa” (Roeder, 1969: 126).

Dengan KNIL, setelah melalui beberapa pertempuran kecil, disepakati adanya garis demarkasi antara APRIS dan KNIL. Untuk sementara keadaan Makassar menjadi tenang. Namun keadaan memanas setelah pada tanggal 1 Agustus 1950 Letnan Yan Ekel anggota TNI dari luar daerah yang sedang cuti dan tidak memahami kondisi di Makassar secara tidak sengaja melanggar garis demarkasi. Ia lalu ditembak mati oleh KNIL.

Hal ini menimbulkan kemarahan di antara pasukan APRIS-TNI. Segera berkobar pertempuran. Puncaknya terjadi tanggal 5 Agustus, saat Soeharto baru saja kembali dari kunjungannya ke Jakarta, markasnya dikepung oleh pasukan gabungan KNIL/KL. Serangan ini dapat diredam oleh Soeharto. Merasa marah dengan serangan kejutan ini, Soeharto lalu merancang sebuah serangan balik pada tanggal 7 Agustus yang berujung pada kekalahan pasukan KNIL.

Keinginan gencatan senjata lalu dilontarkan oleh KNIL dan disambut baik oleh Letnan Kolonel Kawilarang. Soeharto yang merasa berulang kali dikecewakan oleh hasil perundingan di masa

lalu, menganggap permintaan ini hanya sebagai tipuan semata. Ia enggan untuk menerima tawaran gencatan senjata. Tampaknya mulai terbentuk pribadi Soeharto yang keras tanpa kompromi menghadapi setiap upaya yang dinilainya mengancam keselamatan negara. "Saya curiga terhadap mereka. Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, saya tidak bisa begitu saja percaya pada ajakan damai itu," pikir Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 80).

Setelah diyakinkan oleh Letnan Kolonel Kawilarang bahwa KNIL benar-benar menginginkan gencatan senjata, akhirnya Soeharto bisa menerima. Dalam kesepakatan yang dilakukan di City Hotel Makassar, senjata pasukan KNIL dilucuti dan diizinkan meninggalkan Makassar pada akhir Agustus. Dengan ini maka Negara Indonesia Timur lalu bergabung ke dalam Negara Kesatuan RI yang telah diresmikan berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1950.

Kekhawatiran Soeharto tentang Kahar Muzakkar

Mengenai kepergian Soeharto pada akhir Juli hingga awal Agustus ke Jakarta, selain untuk mengantarkan pulang istrinya yang baru berkunjung ke Makassar, ternyata juga untuk membicarakan penunjukan Kahar Muzakkar oleh pemerintah pusat yang rencananya akan diterjunkan ke tanah kelahirannya untuk membantu Soeharto bernegosiasi dengan kelompok gerilya yang masih menolak untuk dimasukkan ke dalam APRIS. Soeharto, pribadi yang keras dan di masa lalu telah menunjukkan keberaniannya mengutarakan pendapat yang berlawanan dengan atasannya, menolak rencana itu. Berdasarkan pengalamannya berjuang bersama di Yogyakarta, Soeharto merasa tidak tepat mengirimkan Kahar kembali ke Makassar.

"Kahar tidak pernah menepati janjinya. Dia akan banyak menimbulkan masalah di daerah itu," Soeharto beralasan (Roeder, 1969: 127). Namun pemerintah tetap bersikeras dengan keputusannya. Kahar Muzakkar kemudian memegang komando militer di Sulawesi Selatan setelah Soeharto dan pasukannya ditarik dari

Makassar. Di kemudian hari, tepatnya pada tahun 1952, apa yang ditakutkan oleh Soeharto menjadi kenyataan. Kahar Muzakkar mengobarkan pemberontakan dan dibutuhkan waktu sepuluh tahun untuk benar-benar memadamkan pemberontakan itu.

Semasa tinggal di Makassar ini, Soeharto mengenal keluarga Habibie, di mana salah seorang anaknya, yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie yang saat itu berusia empat belas tahun, kelak akan menggantikannya sebagai presiden. Keluarga Habibie tinggal di rumah seberang markas Brigade Mataram. Soeharto amat senang mengunjungi keluarga itu. Ibu Habibie yang asli Jawa, biasa menghibur kerinduan Soeharto beserta anak buahnya terhadap kampung halaman. Suatu hari, datang kabar bahwa Bapak Habibie kena serangan jantung saat sedang melaksanakan shalat Isya. Jiwanya tidak dapat diselamatkan. Dengan penuh kesedihan, Soeharto bersama anak buahnya membantu pemakaman. Hubungan Brigade Mataram dengan keluarga Habibie makin erat manakala salah seorang perwiranya, Kapten Subono, menikah dengan kakak B.J. Habibie.

Ekses Rasionalisasi Tentara yang Berkepanjangan

"Saya pikir telah terjadi sesuatu yang terlalu overacting ..."

- **Soeharto** tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

NASUTION, yang banyak memegang peranan di militer RI setelah wafatnya Jenderal Soedirman, kemudian mulai melakukan beberapa perbaikan dalam tubuh TNI. Isu utama masih di seputar upaya untuk merasionalisasi dan reorganisasi kekuatan militer Republik. Indonesia kemudian dibagi menjadi 7 wilayah Tentara Teritorium (TT), sebuah konsep yang menyerupai *Wehrkreise* di masa gerilya, yaitu: TT-I Medan, TT-II Palembang, TT-III Bandung, IV-Semarang, TT-V Malang, TT-VI Banjarmasin, dan TT-VII Makassar. Tujuan dari pembentukan TT ini adalah untuk meregulerkan struktur komando agar tak ada lagi loyalitas terpecah dan komando ganda yang membingungkan dalam daerah-daerah tertentu (Elson, 2001: 105).

Sebagai Panglima TT-IV, yang dulunya dikenal dengan nama Divisi Diponegoro, Gatot Soebroto diminta untuk merasionalkan jumlah brigadennya, dari delapan menjadi lima. Pada September 1950, terbentuklah kelima brigade, yaitu: Brigade N di Slawi

yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Bachrum, Brigade O di Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Brigade P di Solo dengan komandannya Mayor Suharto, Brigade Q di Salatiga di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Yani, dan Brigade R di Pati yang dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Sarbini.

Brigade O yang dipimpin oleh Soeharto kemudian berganti nama menjadi Brigade Pangeran Mangkubumi. Daerah kerja brigade ini meliputi Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Wates, dan Wonosari. Di sela-sela tugasnya yang baru ini, jumlah keluarga Soeharto bertambah dengan lahirnya anak kedua, seorang putra, yang diberi nama Sigit Haryoyudanto pada tanggal 1 Mei 1951.

Masalah Pelik Rasionalisasi Tentara

Masa bertugas di Jawa Tengah ini dikenangnya sebagai masa-masa sulit di mana banyak muncul pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah. Masalah paling pelik yang dialaminya adalah saat diperintahkan merasionalisasi batalion yang tergabung di Brigade Pragola. Saat itu, di Salatiga dibentuk Brigade Pragola di bawah komando Letnan Kolonel Ahmad Yani. Brigade ini terdiri dari Brigade Pragola I yang dipimpin oleh Soeharto dan Brigade Pragola II di bawah arahan Letnan Kolonel Sarbini. Secara total Brigade Pragola tersusun atas tiga batalion asli TNI, tiga batalion bekas KNIL, tiga batalion bekas Laskar Hisbullah, dan Batalion Maladi Jusuf (bekas Pesindo yang beraliran kiri). Soeharto mencatat betapa berat tugasnya yang harus menyusun 9 batalion menjadi 4 batalion. "Betapa sulitnya tugas itu! Bukan karena teknisnya, melainkan faktor psikologislah yang mempersulit, yakni harus mengorbankan banyak perwira," tulis Soeharto dalam otobiografinya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 83).

Namun rupanya apa yang terjadi kemudian membantu Soeharto dalam melakukan seleksi alami. Dua batalion dari Brigade Pragola, yaitu Batalion 423 dan Batalion 426, diindikasikan terlibat

dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan S.M. Kartosuwiryo yang bermaksud mendirikan Negara Islam. Keterlibatan kedua batalion (yang banyak dihuni oleh bekas anggota pasukan Hizbullah) ini terungkap setelah ditemukan dokumen yang mengaitkan kedua batalion tersebut dengan gerakan DI/TII dari tubuh Mayor TII Mughny yang mati tertembak oleh TNI. Segera dilakukan tindakan tegas dengan memeriksa komandan batalion 423 Mayor Basuno. Tanpa diduga, Mayor Basuno tewas ditembak oleh anak buahnya sendiri yang berada di bawah pengaruh DI/TII. Pemeriksaan terhadap Batalion 426 gagal karena Komandan Batalion 426, Mayor Munawar dan Kapten Sofyan menolak saat dipanggil menghadap Panglima Diponegoro.

Soeharto bersama Batalion 424 bergerak ke Kudus untuk melucuti Batalion 426. Dalam sebuah rencana penyergapan yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 1951, Kapten Sofyan berhasil lolos dengan membawa tiga kompi pasukannya yang terdiri dari tiga ratus orang ditambah dua kompi pasukan dari batalion lain di Magelang yang dipimpin oleh Kapten Alip. Mereka lalu menuju Klaten yang menjadi daerah basis pemberontakan.

Mengejar Pemberontak ke Klaten

Untuk melakukan pengejaran terhadap pemberontak, dilakukan konsolidasi kekuatan militer. Dibentuklah sebuah gugus tugas Operasi Merdeka Timur V (OMT-V) yang pada awalnya dipimpin oleh Letnan Kolonel M. Bachrum. Pada bulan Januari 1952, pimpinan komando OMT-V dialihkan kepada Soeharto setelah Letnan Kolonel M. Bachrum diangkat menjadi Panglima Diponegoro menggantikan Gatot Soebroto.

Segera dilakukan upaya untuk menghambat gerakan pemberontak yang menuju Klaten. Angkatan Udara dilibatkan dalam pengejaran ini hingga mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi para pemberontak. Meskipun demikian upaya ini belum juga berhasil mengakhiri perlawanan Kapten Sofyan yang berkali-kali

dapat meloloskan diri dalam pertempuran. Soeharto mencatat terjadi pertempuran hebat pada tanggal 25 Januari 1952 di Simo, Boyolali. Sofyan yang licin, terluka parah. Pemberontak tercerai-berai oleh serangan ini. Beberapa dapat ditangkap sementara sisanya melarikan diri ke Jawa Timur. Sementara itu, Kapten Alip terbunuh pada tanggal 30 Januari. Dengan demikian, berakhir pula pemberontakan Batalion 426.

Upaya perbaikan dilakukan setelah berakhirnya pemberontakan Batalion 426. Berdasarkan Instruksi KSAD Nasution tanggal 5 Januari 1952, Brigade Pragola berubah nama menjadi Resimen Infantri 14 dan bermarkas di Salatiga. Di tahun 1952 ini juga Soeharto mendapat kabar soal kematian ayahnya, Kertosudiro, akibat malaria. Bersama istrinya, ia lalu pulang ke Kemusuk untuk menghadiri pemakaman. Sedikitnya porsi kisah kematian sang ayah yang tertuang dalam otobiografi Soeharto memancing Elson untuk melanjutkan dugaannya tentang siapa sebenarnya ayah kandung Soeharto. "Tampaknya sangat aneh Soeharto tidak diberi tahu mengenai kondisi parah ayahnya; reaksi Soeharto terhadap kematian ayahnya juga sepiantas lalu, dingin, dan tanpa emosi," tulis Elson, "Sikapnya yang dingin mungkin menandakan Soeharto mulai menyadari bahwa Kertosudiro bukanlah ayah aslinya ..." (Elson, 2001: 112).

Peristiwa 17 Oktober 1952

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rencana reorganisasi dan rasionalisasi militer yang dicanangkan oleh Nasution kemudian membuat kalangan militer terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pro, termasuk Nasution, memandang bahwa reorganisasi dan rasionalisasi (perampingan) dibutuhkan agar militer terlihat lebih efisien, rasional, modern dan profesional. Umumnya kelompok yang pro ini adalah bekas didikan KNIL. Sementara itu, kelompok yang kontra, dipimpin oleh Kolonel Bambang Supeno, merasa bahwa kebijakan Nasution itu

berarti juga mengancam keberadaan kalangan prajurit atau perwira rendahan, dan juga mantan laskar rakyat yang tidak memperoleh pendidikan untuk menjadi “tentara profesional”. Kelompok ini didukung oleh bekas anggota PETA dan laskar rakyat (Tim PDAT, 1998: 85).

Keluhan dari Bambang Supeno ini kemudian membuat anggota parlemen (yang merupakan representasi politisi sipil yang didominasi oleh orang-orang yang berasal dari negara boneka bentukan van Mook) turut menyoroti kebijakan rasionalisasi ala Nasution. Hal ini tak pelak menimbulkan kekecewaan dalam diri Nasution yang merasa sakit hati atas tuduhan-tuduhan anti-patriotisme, alat imperialisme dan tuduhan telah diperalat partai (Tim PDAT, 1998: 87). Untuk menghadapi semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Nasution menyampaikan sebuah petisi yang ditandatangani bersama tujuh Panglima Daerah dan delapan pejabat teras Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) kepada Presiden Soekarno di Istana Negara. Isinya antara lain menuntut agar Presiden membubarkan parlemen. Sementara Nasution menemui Presiden, di luar istana telah menanti barisan demonstran dari kalangan rakyat dan AD yang dipimpin oleh Letnan Kemal Idris. terlihat beberapa meriam diarahkan moncongnya ke arah Istana Negara.

Efek dari peristiwa ini Nasution dicopot dari posisinya sebagai KSAD. Terjadi pula perpecahan dalam tubuh militer di beberapa daerah. Soeharto yang mulai terbiasa menghadapi perpecahan dalam tubuh militer, berdasarkan pengalamannya di masa lalu, tampaknya mencoba memosisikan dirinya secara netral. Selain itu kesibukannya menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah serta rasa ketertarikannya yang sedikit terhadap masalah-masalah politik membuatnya tak ambil pusing atas peristiwa 17 Oktober 1952. Meskipun demikian, tak urung Soeharto menyampaikan kritik dalam otobiografinya, “Saya sama sekali tidak mengerti peristiwa apa itu sebenarnya, sementara saya sibuk dengan meng-

hadapi pemberontakan. Melihat peristiwanya, saya pikir telah terjadi sesuatu yang terlalu *overacting* ...”

Tidak jelas berdiri di pihak mana Soeharto dalam menyikapi peristiwa ini. Namun Elson memperkirakan, ia memiliki rasa simpati yang besar terhadap kelompok anti-rasionalisasi (Elson, 2001: 114).

Menjadi Atasan Untung di Solo

Di sekitar tahun 1952-1953, TNI masih berada dalam situasi yang penuh kewaspadaan mengingat gangguan keamanan dari DI/TII terutama di daerah Jawa Barat masih mengancam. Dengan dibantu oleh peran serta aktif rakyat, operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI dapat menghancurkan kekuatan utama DI/TII di bulan November 1952.

Sementara itu, pada tanggal 1 Maret 1953, Soeharto ditunjuk untuk memimpin Resimen 15 di Solo yang baru saja kehilangan komandannya, Mayor Kusmanto, pada operasi penumpasan pemberontakan Batalion 426. Menanggapi pemindahan ini, Soeharto merasa “kejatuhan sampur” dan menganggapnya sebagai sebuah kepercayaan untuk “memperbaiki Resimen 15” (Dwipayana & Ramadhan, 1989: 86).

Di masa itu, daerah Surakarta terkenal dengan kekuatan “kiri”-nya. Soeharto secara khusus mencatat bahwa pengaruh pertentangan politik (khususnya komunis) telah merasuki tubuh militer. Hampir sebagian besar perwira Resimen 15 memiliki anggapan bahwa setiap perwira sudah seharusnya ikut berpolitik. Mereka yang tidak berpolitik diibaratkan seperti *kip zonder* (ayam tanpa kepala). Sebagai seorang militer yang tidak menaruh minat pada politik, Soeharto beranggapan bahwa pengaruh politik dalam militer hanya akan memperlemah daya tempur satuan (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 87).

Hal yang merisaukan Soeharto, satu batalion yang tergabung dalam resimennya, yaitu Batalion Digdo yang bermarkas

di Kleco telah memperoleh pendidikan politik ideologis dari seorang komunis senior yang cukup punya nama, Alimin. Dua di antara anggota batalion itu adalah Untung dan Suradi yang kelak namanya dikenal karena terlibat Gerakan 30 September. "Karena itu tidak sulit bagi saya untuk menerka siapa yang berada di belakang G 30 S/PKI setelah saya mendengar siaran lewat radio bahwa yang memimpin gerakan itu adalah Untung," tulis Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 86).

Kerasnya suasana di Solo, yang jauh berbeda dengan suasana damai yang biasa ia dapatkan di Yogyakarta, membuat Soeharto merasa perlu untuk memfokuskan perhatiannya pada pasukan di bawah komandonya. Suhu politik jelas-jelas mendominasi para tentara di Solo. Selama berada di sini, Soeharto hanya berhasil menyingkirkan sebagian saja dari pertikaian ideologi yang terjadi di dalam militer (Roeder, 1969: 128).

Masa berdinamika di Solo juga dimanfaatkan oleh Soeharto untuk melakukan aktivitas-aktivitas baru seperti mengikuti kursus militer, bergabung dengan anggota Klub Bridge, dan juga mengikuti kursus penerbangan di Aero Club. Hal yang menarik adalah ia mencoba merintis sebuah koperasi yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat prajurit serta mencukupi kesejahteraan bagi keluarga mereka. Sebagai seorang prajurit, Soeharto tentu merasakan sulitnya hidup berkeluarga di masa itu. Apalagi ia sendiri mengalami pertambahan jumlah keluarga dengan lahirnya anak ketiga yang diberi nama Bambang Trihatmojo pada tanggal 23 Juli 1953.

- 14 -

Memegang Komando Divisi Diponegoro

*“Kamu Soeharto, seorang tentara!
Masalah politik itu urusan saya. Serahkan kepada saya!”*
- **Soekarno** marah pada Soeharto
(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

TIGA tahun lamanya Soeharto tinggal di tanah kelahiran Siti Hartinah, Solo. Pada awal tahun 1956, ia ditarik ke Jakarta untuk menjadi bagian Staf Umum Angkatan Darat (SUAD). Hanya dalam hitungan bulan saja ia di sana untuk kemudian kembali ke Divisi Diponegoro (TT-IV) sebagai Kepala Staf.

Sementara Soeharto berkutat di seputar kariernya di daerah, di pusat telah terjadi beberapa perubahan politik yang penting, di mana Soeharto yang saat itu belum memiliki peran penting tidak terlibat di dalamnya. Perpecahan di tubuh Angkatan Darat masih terus terjadi meskipun sedikit lebih solid dari sebelumnya dengan adanya Piagam Yogyakarta.

Nasution yang sempat dicopot kedudukannya sebagai KSAD akibat peristiwa 17 Oktober 1952, kembali menduduki posisinya pada bulan November 1955. Sempat terjadi suasana tegang saat Pasukan Siliwangi berencana melakukan “kudeta” dan berupaya menangkap Nasution (Tim PDAT, 1998: 107). Namun upaya ini dapat digagalkan. Zulkifli Lubis, salah seorang tokoh militer yang

pernah menjabat sebagai wakil KSAD, dianggap terlibat dalam gerakan ini dan dipecat dari keanggotaan militernya. Pertikaian antara Soekarno dan Nasution pun untuk sementara mereda seiring dengan kesamaan pendapat mereka terhadap peran parlemen yang semakin lama dinilai semakin tidak efektif. Diwarnai dengan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo, pemerintah pun beralih dari demokrasi yang dikendalikan oleh parlemen menjadi demokrasi terpimpin.

Mempertahankan Posisi Netral

Ketidakterlibatan Soeharto dalam suhu politik yang memanas di Jakarta, selain karena posisinya yang belum cukup strategis dan karena memang tidak memiliki hubungan yang erat dengan para pemimpin tinggi negara (Roeder, 1969: 129), juga disebabkan karena ia (pada saat itu) tidak memiliki ambisi politik. Dikatakan oleh Elson bahwa ketidakpeduliannya ini bukan disebabkan oleh karena kenaifannya terhadap politik (Elson, 2001: 118). Ini diperkuat oleh penjelasan Soeharto, "Saya sendiri memilih sebagai seorang prajurit Sapta Marga. Dan memang saya tidak memiliki ambisi politik. Tetapi itu tak berarti saya tidak punya pandangan politik." (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 90)

Soeharto menjalankan perannya sebagai Kepala Staf di Divisi Diponegoro dalam waktu yang relatif singkat. Pada tanggal 3 Juni 1956 ia diangkat menjadi pejabat sementara Panglima Diponegoro menggantikan Kolonel M. Bachrum. Tanggal 1 Januari 1957, ia secara resmi menjadi Panglima Diponegoro dengan pangkat kolonel.

Sebagai seorang panglima, Soeharto menunjukkan sikap loyalnya kepada pemerintah meski diyakini beberapa kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan "aroma haluan kiri", tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Bersamaan dengan naiknya Soeharto ke kursi Panglima Diponegoro, terjadi krisis di beberapa daerah di Sumatera. Semua daerah, kecuali Medan,

menyatakan perlawanannya terhadap pemerintah RI. Beberapa perwira terlibat dalam dewan-dewan daerah itu, yang kabarnya juga didukung oleh para Panglima Daerah. Tanggal 14 Maret 1957 dideklarasikan SOB (Keadaan Darurat Perang). Puncak dari krisis ini adalah terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berpusat di Bukittinggi, sebagai pemerintahan tandingan.

Di awal tahun 1958 ini pula muncul gerakan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi yang diproklamirkan oleh Letkol Ventje Sumual, bekas teman seperjuangan Soeharto di Yogyakarta. Ketika pemerintah memutuskan mengirim pasukan untuk membebrantas pemberontakan PRRI, Soeharto menjadi Panglima di Jawa yang paling bersemangat untuk mengirimkan pasukan. Tercatat ia selama tahun 1958 telah mengirim sekitar enam batalion ke daerah Sumatera Barat. Termasuk di dalamnya, dua orang kepercayaannya selama di Divisi Diponegoro, Yoga Sugama dan Ali Moertopo. Hal ini tentu saja mengundang perhatian yang positif dari pemerintah pusat mengingat para panglima lain di daerah Jawa, menunjukkan sikap ragu-ragu dalam mengirimkan pasukan (Elson, 2001: 140). Hal ini mungkin saja disebabkan oleh rasa enggan untuk saling bertempur melawan sesama rekan di kemiliteran.

Mengamati Kegiatan-kegiatan Komunis

Semasa berperan sebagai Panglima Diponegoro, Soeharto mencatat adanya pergerakan yang “luar biasa” dari kegiatan-kegiatan komunis di Jawa Tengah. “Pada masa itu saya melihat kegiatan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin hari semakin bertambah besar,” kenang Soeharto (Dwipayana & Ramadhan, 1989: 90).

Dalam satu kesempatan ketika Presiden berkunjung ke Semarang, Soeharto bermaksud menyampaikan kekhawatirannya kepada Soekarno. Namun tanggapan yang didapatkan justru mengecewakan, “Kamu Soeharto, seorang tentara! Masalah politik itu

urusan saya. Serahkan kepada saya!” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 91). Meskipun mengaku telah lega karena keinginannya untuk menyampaikan *unek-uneg* yang terpendam dalam dadanya telah tercapai, namun kebencian terhadap kaum komunis tetap bertahan di hatinya.

Keadaan politik di Indonesia, sebuah negara yang masih relatif muda dan sedang mencari bentuk yang pas dalam menjalani kehidupan politiknya, kemudian mengalami perubahan. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah membuat Indonesia kembali pada UUD 45 sekaligus mengukuhkan peran dominan Presiden (dan juga Angkatan Darat) dalam menjalankan roda pemerintahan. Angkatan Darat kini menjadi partner yang penting bagi Soekarno. Terbukti seperti kursi kabinet terisi oleh kekuatan AD.

Tersangkut Masalah Korupsi

Tak dapat dipungkiri, masa menjabat sebagai Panglima Diponegoro adalah salah satu masa yang paling menyenangkan bagi karier (juga kehidupan) Soeharto. Selain karena kelahiran anak keempatnya, Siti Hediati Haryadi pada tanggal 14 April 1959, pemberlakuan SOB berarti memberikan kewenangan hampir tak terbatas pada pemegang kendali di daerah. Hal ini berarti membuka kesempatan baginya untuk melakukan hal-hal lain di bidang ekonomi dan keuangan. Dukungan juga diperoleh dari Hadisubeno Sosrowerdoyo, Walikota Semarang yang antikomunis.

Satu hal yang dikatakan oleh Soeharto menjadi sorotan utama saat dirinya menjabat sebagai Panglima adalah kesejahteraan rakyat. “Saya merasakan betapa besar hutang budi saya kepada mereka,” pikir Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 89). Dengan alasan itulah ia kemudian mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembangunan Territorium Empat (YPTE) sebagai wadah untuk berbagai usaha di bidang ekonomi dan keuangan. Untuk menjalankan rencananya ini, ia dibantu oleh

kawan-kawannya, di antaranya adalah Letnan Kolonel Munadi, Mayor Sudjono Humardani, dan Bob Hasan.

Pada masa awal berdirinya, yayasan yang mengandalkan dana dari pungutan atas kepemilikan barang dan jasa serta bantuan dari perusahaan-perusahaan besar, seperti Pabrik Rokok Kudus, di daerah Jawa Tengah ini memiliki dana sebesar lebih dari empat ratus ribu rupiah. Dan hanya dalam kurun waktu setahun, mereka mampu menggemukakan kantung rupiah mereka menjadi enam belas juta rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis untuk ukuran masa itu (Elson, 2001: 132). YPTE lalu memulai investasinya ke perusahaan-perusahaan swasta dan untuk lebih memperkuat jaringannya maka diadakan kerjasama dengan para pebisnis berdarah Cina seperti Bob Hasan dan Liem Sioe Liong, keduanya kelak menjadi pengusaha kelas kakap di masa Orde Baru.

Kegiatan bisnis YPTE kemudian ternyata berkembang menjadi ilegal. "Sebagai penguasa perang di Jawa Tengah, saya menyakiskan rakyat kekurangan makan karena panen yang gagal." Dengan alasan itulah maka Soeharto berinisiatif melakukan barter gula dengan beras Thailand via Singapura. "Kita biarkan rakyat Jawa Tengah kelaparan atau kita usahakan agar rakyat bisa makan bubur dengan minuman tanpa gula?" ujar Soeharto kepada Gubernur serta para kepala daerah lainnya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 92). Kasus barter ini rupanya melanggar peraturan pemerintah saat itu. Apalagi seorang pengusaha swasta, Bob Hasan, ikut terlibat di dalamnya (Elson, 2001: 134).

Apa yang tidak diceritakan oleh Soeharto dalam otobiografinya, ia kemudian tersangkut masalah korupsi. Kritik sipil yang dialamatkan kepada Nasution tentang semakin lebarnya kesempatan untuk melakukan korupsi di tubuh militer setelah diberlakukannya SOB, telah "memaksa" Nasution untuk melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap setiap kegiatan yang menyimpang. Kemudian keluar sebuah instruksi yang melarang anggota TNI

mengambil bagian dalam mencari laba bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dengan TNI.

Barter ilegal Soeharto rupanya telah tercium juga oleh markas besar TNI di Jakarta. Pada tanggal 18 Juli 1959, dibentuk sebuah kelompok inspeksi Angkatan Darat yang bertugas menyelidiki masalah barter ilegal ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa YPTE menyimpan dana sebesar Rp 42.174.300,00 (Elson, 2001: 147). Nasution yang pada awalnya bermaksud menjatuhkan sanksi tegas terhadap Soeharto urung melakukannya setelah Gatot Soebroto turut campur dalam masalah ini.

“Dibuang” ke SSKAD

Bagaimanapun Soeharto tak dapat menghindari akibat dari kegiatan barter ilegalnya. Ia lalu dicopot dari posisinya sebagai Panglima Diponegoro dan diperintahkan, pada tanggal 1 November 1959, mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung.

Proses serah-terima jabatan kepada penggantinya, Letnan Kolonel Pranoto Reksosamudro, yang dilakukan tanpa melalui upacara resmi, menurut Ibu Tien, telah menimbulkan rasa sakit hati dalam diri Soeharto (Elson, 2001: 148). Apalagi santer terdengar kabar yang mengatakan bocornya kasus barter ilegal ini disebabkan oleh laporan dari Pranoto. Yoga Sugama menilai pergeseran ini sebagai sesuatu yang telah direncanakan. Tak lama setelah Soeharto dipindahkan, dilakukan upaya pembersihan terhadap rekan-rekan setianya. Yoga Sugama dan Ali Moertopo segera menyusul disingkirkan dari divisi. Begitu pula dengan Sudjono, Hernomo, dan Sutanto (Elson, 2001: 151). Ini juga berarti berakhir pula “bisnis-bisnis” Soeharto di Semarang.

Setelah menjalani kehidupan yang menyenangkan di Semarang, Soeharto lalu terhempas dalam keadaan yang kurang sesuai dengan kehendaknya. Ia mengalami masa-masa yang sulit di awal pendidikannya. “Mula-mula saya merasa mendapat kesulitan

dalam pendidikan ini ...,” kenang Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 94). Kemalangannya bertambah saat ia diusulkan menjadi ketua senat di SSKAD. Usulan ini ditentang oleh D.I. Pandjaitan yang mengetahui *record* buruk Soeharto semasa di Diponegoro. Merasa aibnya dibuka, Soeharto merasa kesal terhadap Pandjaitan (Eros Djarot, *dkk.*, 2006: 30).

Sebagai catatan, di masa bersekolah di SSKAD ini Soeharto pertama kali bertemu dengan Kolonel Suwanto, Komandan SSKAD yang pro-Amerika. Di kemudian hari berdasarkan penuturan Anton Ngenget, seorang mantan agen CIA, Soeharto dikabarkan menjalin kedekatan hubungan dengan CIA (Eros Djarot *dkk.*, 2006: 29).

Rentetan kejadian ini cukup memukul sisi psikologis Soeharto meskipun tak cukup untuk membuatnya terpuruk. Bangkit dari masa-masa sulit, Soeharto justru menjadikan masa ini sebagai titik balik untuk melakukan perenungan. Permainan politik nyaris mengakhiri karier militernya. Adakah dendam Soeharto menjadikan dirinya lebih berambisi dalam kehidupan politik di masa mendatang?

Panglima Komando Mandala

"Sampai-sampai pada suatu ketika saya berpikir selintas untuk berhenti saja dari kedinasan dan pindah tempat kerja, menjadi supir taksi atau menjadi petani ..."

- **Soeharto** menceritakan keputusasaannya terhadap keadaan politik dalam negeri (Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

LEPAS dari masa pendidikannya di Bandung pada tanggal 17 Desember 1960, Soeharto menemukan kondisi perpolitikan Indonesia sudah memasuki situasi ke arah persaingan yang tak sehat. Demokrasi Terpimpin yang kini dianut oleh pemerintah memungkinkan kekuasaan yang tak terbatas dimiliki oleh Presiden.

"PKI terus mengipas-ipas Bung Karno. Dan orang-orang yang ada di sekitar Presiden itu tak ada yang berani menyampaikan pendapat mereka yang berlainan." Lebih lanjut Soeharto mencatat, "Ada perselisihan yang tajam antara Angkatan Darat, golongan Islam yang anti-komunis, dan golongan nasionalis yang anti-komunis di satu pihak, dengan apa yang dinamakan golongan 'progresif revolusioner' alias PKI di pihak lain." (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 111)

Soeharto Merasa Frustasi

Soeharto, sebagai anak didik Suwanto, kemudian semakin meyakini tekadnya untuk membawa Angkatan Darat untuk berhadapan dengan pengaruh komunis yang semakin meluas (Elson, 2001: 155). Rasa muaknya terhadap PKI semakin menjadi manakala Presiden Soekarno menunjukkan gejala kedekatannya dengan partai ini. Rupanya, sistem Demokrasi Terpimpin yang telah menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan di pemerintahan disadari Soekarno akan menimbulkan rasa keterikatan yang berlebihan. Untuk menyeimbangkannya, dibutuhkan suatu kekuatan besar lainnya yang dianggap akan mampu membantunya bila sewaktu-waktu terjadi perpecahan pendapat dengan Angkatan Darat. Pilihan jatuh pada PKI, satu partai yang solid dan memiliki dukungan massa dalam jumlah yang banyak (Crouch, 1986: 44).

Dengan ambisi pribadinya merangkul semua kekuatan dalam dirinya melalui konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan sipil dengan militer. Hal ini menimbulkan pertentangan dalam diri Angkatan Darat. “Perang Dingin” memperebutkan Soekarno pun terjadi. Ditambah dengan buruknya kondisi perekonomian negara yang terpukul oleh tingginya inflasi serta ditelantarkannya infrastruktur ekonomi yang berpengaruh terhadap produktivitas di segala sektor, telah membawa Indonesia masuk ke dalam situasi yang genting.

Menghadapi hal ini, dan mungkin juga terdorong oleh perasaannya menjadi “orang buangan” di militer, membuat Soeharto menyerukan rasa keputusasaannya. “Sampai-sampai pada suatu ketika saya berpikir selintas untuk berhenti saja dari kedinasan dan pindah tempat kerja, menjadi supir taksi atau menjadi petani ...” demikian suatu hari ia berkata pada temannya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 112). Menyadari kondisi psikologis suaminya yang sedang terpuruk, Ibu Tien lalu membujuk suaminya, “Saya tidak

menikahi seorang supir taksi, saya menikahi seorang prajurit” (Elson, 2001: 107).

Sejarah menunjukkan, bahwa Soeharto kemudian bangkit dari keterpurukan dan menjadikannya sebagai sebuah titik balik yang mengantarkan dirinya menuju puncak. Kesempatan kedua bagi Soeharto datang saat ia ditunjuk membantu KSAD Nasution sebagai Deputy I (Operasi). Dalam menjalankan tugasnya ini ia dibantu oleh mantan anak buahnya di Diponegoro, Ali Moertopo.

Panglima Komando Mandala

Pintu menuju kesuksesan akhirnya menghampirinya saat Soeharto dipercaya Nasution untuk menjadi Komandan Cadangan Umum Angkatan Darat (CADUAD) pada bulan Maret 1961. Soeharto yang saat itu berpangkat brigjen, terpilih karena di masa lalu ia menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah, tidak berambisi, patuh, dan juga tidak berbahaya.

Soeharto berperan sebagai panglima dengan dibantu oleh Kolonel Ahmad Wiranatakusumah, Amirmachmud, dan Kolonel Rukman sebagai stafnya. Di satuan ini pula ia berkesempatan “reuni” dengan teman-teman serta mantan anak buahnya di Diponegoro seperti Munadi, Sruhardoyo, Ali Moertopo, dan juga Hernomo. Misi CADUAD saat itu ialah melatih unit tempur terkuat dari tiga Kodam di Jawa (Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya) untuk menjadi pasukan cadangan yang sewaktu-waktu dapat difungsikan bila ada kebutuhan mendesak. Tugas Soeharto makin bertambah tatkala ia dipercaya menjadi pemimpin di Komando Pertahanan Udara (Kohanudad) pada tanggal 1 Oktober 1961.

Di akhir tahun itu, ketegangan antara RI dengan Belanda memuncak menyusul niat Belanda yang ingin mendirikan negara baru di Irian yang berada di bawah kendali Belanda. Hal ini berarti Belanda mengingkari perjanjian KMB. Soekarno meradang karenanya. Tanggal 17 Agustus 1961, RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Bulan Desember 1961, tepatnya tanggal 19, Soekarno memaklumkan Trikora (Tri Komando Rakyat), yaitu: (1) Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua, buatan Belanda-kolonial, (2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia, dan (3) Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Segera dibentuk sebuah struktur komando (bernama Komando Mandala) untuk merebut kembali Irian Barat. Presiden mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin, dengan Nasution sebagai wakilnya, Ahmad Yani sebagai kepala staf, dan Soeharto sebagai pelaksana operasi. Soeharto menanggapi kepercayaan ini dengan penuh kebanggaan, “Kejadian ini merupakan suatu tantangan, tetapi juga kehormatan yang luar biasa bagi prajurit Sapta Marga. Saya tahu, kemampuan saya dicoba, dan tentunya disorot orang banyak juga. Tetapi saya senang sekali menerima tantangan ini” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 103).

Mendapat Promosi

Tanggal 1 Januari 1962, pangkat Soeharto dinaikkan menjadi Mayor Jenderal dan secara resmi menjadi Panglima Komando Mandala sejak tanggal 23 Januari 1962. Sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Operasi A yang dijalankan oleh Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Sebagai bagian dari operasi ini terjadi sebuah pertempuran laut yang terkenal, yaitu Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran itu, Komodor Laut Yos Sudarso tenggelam bersama dengan kapalnya MTB Macan Tutul pada tanggal 15 Januari 1962.

Untuk melancarkan tugasnya di Irian, Soeharto secara resmi juga diangkat menjadi Deputy Wilayah Indonesia Timur menggantikan Ahmad Yani. Markas Besar Komando Mandala di dirikan di Makassar. Dari perintah atasannya, Soeharto ditargetkan telah mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1962.

Penunjukan dirinya sebagai Panglima Komando Mandala ini menandai berakhirnya kekelaman karier militer Soeharto yang selama ini berjalan biasa-biasa saja. Segera sosok Soeharto menjadi sosok populer yang sering menghiasi surat kabar di Jakarta. Seorang militer yang memiliki wajah yang bersih, murah senyum, rambut berombak tersisir ke belakang, tapi selalu menjadi “momok bagi Belanda”, begitu pers menjulukinya. Prestasinya di Serangan Umum 1 Maret diangkat ke permukaan. Sungguh keadaan yang menyenangkan bagi Soeharto.

Strategi kawasan perang diterapkan oleh Soeharto. Komando Mandala Darat tetap dipegang oleh dirinya sementara Komando Mandala Laut diserahkan pada Laksamana Sudomo, sedangkan Komando Mandala Udara diberikan kepada Komodor Leo Watimena. Turut serta dalam pasukan Soeharto adalah dua nama yang kemudian erat kaitannya dengan Soeharto, yaitu Mayor Untung yang menjabat sebagai Komandan Gerilya Irian Barat dan Mayor Benny Moerdani sebagai prajurit komando.

Rencana Operasi Militer

Soeharto memutuskan untuk melemahkan kekuatan musuh dengan menggunakan taktik infiltrasi dengan menyusupkan pasukan ke Irian dari udara, darat, dan laut. Diharapkan pasukan musuh terkecoh sehingga menarik seluruh pasukannya dan berfokus pada garis depan untuk menghadapi pasukan penyusup ini. Ini berarti markas induknya menjadi lemah sehingga dengan mudah diserang oleh gabungan pasukan CADUAD, brigade lintas udara (PARA) dan KKO.

Di tengah rencana pembebasan Irian, Soeharto mengalami suatu peristiwa yang semakin mengukuhkan dirinya di mata Soekarno sebagai perwira *koppig* (keras kepala). Di satu sisi ia terkenal karena kepatuhan dan loyalitasnya, namun di sisi yang lain ia tak jarang pula menunjukkan sikap *ngeyel* (Jawa: suka membantah).

Muhammad Yamin, dalam sebuah sidang kabinet, meminta agar pihak militer RI menenggelamkan kapal Belanda demi tujuan politik. Usulan ini kemudian disetujui oleh Presiden. Dalam sebuah pertemuan, Soekarno meminta Soeharto untuk melaksanakan perintah ini. Reaksi pertamanya adalah tidak suka. "Aneh-aneh saja," pikir Soeharto saat itu (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 105).

Merasa usulan tersebut akan merusak rencananya, Soeharto berargumen, "Ini hanya akan merusak rencana saja. Dengan begitu Belanda akan menjadi lebih siap (menghadapi serangan)."

"Ini untuk kepentingan politik," tegas Muhammad Yamin.

"Sudah sebelas tahun kita tidak berhasil. Lalu mau merusak rencana yang dipercayakan pada saya untuk melakukan operasi militer?" jawab Soeharto.

Jawaban ini tentu saja secara implisit menyuarakan rasa ketidakpercayaannya terhadap segala upaya non-militer yang ditempuh untuk membebaskan Irian Barat. Sebelumnya, dalam diri Soeharto telah tampak adanya keraguan terhadap upaya perundingan yang diprakarsai politikus sipil dalam upaya mencari penyelesaian masalah dengan Belanda. Mungkin saja hal ini yang membuatnya melakukan upaya militerisasi dalam kekuasaan politik saat menjabat sebagai presiden. Hal ini pulalah yang kelak membuatnya berdiri berseberangan dengan Nasution, seorang tokoh militer senior yang menganggap tidak perlu adanya campur tangan militer dalam politik sipil.

Akhirnya diputuskan untuk membatalkan rencana penenggelaman kapal Belanda karena dinilai akan merusak rencana yang telah ditetapkan oleh Panglima Komando Mandala. Pelaksanaan penyusupan lalu dijalankan. Seperti perkiraan semula, musuh tertipu oleh muslihat Soeharto. Semua pasukan musuh dikerahkan untuk menyambut tentara Indonesia di Kaimana. Kekuatan musuh menjadi terpecah. Hal ini membuat Biak menjadi lemah. Tanggal 12 Agustus 1962 Soeharto merencanakan sebuah pukulan besar-besaran dari darat, udara, dan laut dengan nama Operasi

Jayawijaya. Namun di tengah jalan, ia memperoleh perintah pembatalan operasi ini karena melalui PBB, Belanda telah menyatakan menyerah atas desakan Amerika. Tanggal 16 Agustus 1962 tercapai “Persetujuan New York” tentang penyerahan Irian Barat kepada RI.

Lahirnya Tommy

Menanggapi hal ini, Soeharto menyambutnya dengan sukacita, “Saya panjatkan syukur kehadiran Yang Mahakuasa, bahwa Operasi Jayawijaya tidak sampai perlu kita jalankan. Saya tahu bahwa operasi ini akan meminta korban jiwa dan harta yang amat besar.” Soeharto merasa menyerahnya pihak Belanda sebagai rasa takut setelah melihat kekuatan pasukan yang dipimpin olehnya. Ia membandingkan serangan yang akan dilakukannya dengan kejadian Jepang dan Rusia di Wladivostok di tahun 1905. Sedangkan menurut Elson, hal ini terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, mundurnya pihak Belanda disebabkan oleh desakan Amerika Serikat yang merasa takut bila ternyata pihak RI kalah akan menyebabkan berpindahnya kekuasaan pemerintahan di Indonesia ke tangan orang-orang komunis (Elson, 2001: 171). Saat itu di Indonesia tengah terjadi upaya perebutan simpati di antara dua kubu, yaitu antara pihak militer dan pihak komunis.

Bersamaan dengan tugasnya sebagai Panglima Komando Mandala, di pertengahan tahun 1962, Soeharto memperoleh dua kabar yang bertolak belakang. Kabar sedih datang saat ia menerima kabar tentang wafatnya Jenderal Gatot Soebroto di bulan Juni. Satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1962, kabar gembira diterima oleh Soeharto tentang kelahiran putranya yang diberi nama Hutomo Mandala Putra untuk mengenang tugasnya sebagai komandan pembebasan Irian Barat.

Predikat Soeharto sebagai panglima perang yang tangguh meningkat tajam setelah berakhirnya tugas di Komando Mandala. Bersama dengan rekan-rekannya dalam jajaran kepemimpinan pa-

sukan, ia memperoleh tanda jasa Bintang Dharma. Sementara itu, pasukan yang terlibat (termasuk Benny Moerdani dan Untung) memperoleh kenaikan pangkat atas jasa-jasa mereka. Dan untuk meraih simpati yang lebih dalam di antara sesama militer, ia kemudian mendirikan Yayasan Anak Yatim Trikora, sebuah yayasan yang ditujukan untuk merawat keluarga-keluarga yang kehilangan suami dan ayah dalam peperangan.

- 16 -

Konfrontasi Setengah Hati

"Indonesia telah dikentuti."

- **Soekarno** (Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

KEBERHASILAN di Irian barat tidak serta merta memunculkan kekompakan dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Bahkan masa "bulan madu" Soekarno dengan Nasution, dua tokoh yang membidani lahirnya Dekrit 5 Juli 1959, untuk kedua kalinya (yang pertama saat peristiwa 17 Oktober) harus berakhir.

Sebenarnya gelagat ketidakcocokan di antara keduanya telah tercium sebelum berlangsungnya operasi pembebasan Irian Barat. Namun secara nyata, perpecahan keduanya mulai tampak saat Presiden Soekarno menemukan banyaknya manuver politik yang dilakukan oleh Nasution untuk menghambat gerak ideologi Nasakom yang diusung olehnya. Ketidakloyalan Nasution mengakibatkan Soekarno mencari jalan untuk menyingkirkan Nasution (Tim PDAT, 1998: 136).

Jenderal Ahmad Yani, yang dianggap lebih patuh dan moderat, kemudian diangkat menjadi KSAD pada tahun 1962. Menurut Crouch, hal ini memunculkan persaingan yang tajam antara Yani dan Nasution (Crouch, 1986: 85). Lebih lanjut Crouch mengatakan hal ini mengakibatkan Nasution merasa "dipukul dari belakang"

oleh kawannya sendiri. Implikasi dari perpecahan ini adalah terbaginya Angkatan Darat menjadi dua kubu yang hampir-hampir sama kuatnya.

Selain itu, mulai muncul konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara berkaitan dengan tenggelamnya kapal Indonesia dalam operasi pembebasan Irian Barat. Angkatan Darat menilai Angkatan Udara gagal memberikan perlindungan udara terhadap kapal tersebut. Berkaitan dengan khusus ini, AD lalu berhasil memaksa mundur KSAU Surjadarma yang kemudian digantikan oleh Omar Dhani, seorang Soekarno's sejati (Crouch, 1986: 89).

Menjadi Pangkostrad

Diwarnai oleh berbagai konflik di tubuh Angkatan Darat, pada bulan Februari 1963, dibentuk kembali satuan cadangan umum yang kini berganti nama menjadi Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Soeharto resmi diangkat menjadi panglimanya pada tanggal 1 Mei 1963. Ia kini menjadi salah satu jenderal senior di negeri yang sedang mengalami ketidakstabilan politik.

Meskipun oleh sebagian orang, termasuk Anton Ngenget (lihat Eros Djarot, *dkk.*, 2006: 30), Kostrad hanya dianggap sebagai kesatuan afkiran (pembuangan) bagi anggota TNI AD yang dianggap sudah tidak pantas berada di kesatuan, namun justru dari kesatuan inilah Soeharto mampu menanjakkan kariernya hingga kemudian akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia.

Tidak seperti anggapan sementara orang yang mengatakan rendah atau kurang bergengsinya posisi Kostrad pada masa itu, peran yang dimainkan Soeharto sebagai Panglima Kostrad justru menunjukkan kenyataan yang berkebalikan. Dalam berbagai kesempatan, setiap kali KASAD Jenderal Ahmad Yani berhalangan menjalankan tugasnya (saat itu Yani aktif berpergian ke luar negeri dalam rangka tugas kemiliteran), Mayor Jenderal Soeharto-lah

sebagai Panglima Kostrad yang kemudian menggantikan tugas-tugasnya.

Kepercayaan yang lebih banyak diperolehnya saat ia diangkat sebagai Kepala Deputy Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi), sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh Yani untuk melakukan penilaian atas kinerja serta menilai penghargaan, penempatan, dan promosi bagi para perwira. Hal ini menurut Elson menjadikan posisi Soeharto sebagai orang penting dalam penentuan posisi dan tugas para perwira senior (Elson, 2001: 174).

Lahan subur baru telah tersedia bagi Soeharto. Kostrad memberi Soeharto basis kelembagaan untuk mengembangkan jaringan bisnis (dan intelijen) yang menguntungkan bagi dirinya pribadi di masa mendatang (Elson, 2001: 175). Soeharto lalu kembali pada bisnis lamanya, mengembangkan sumber pendapatan yang menguntungkan bagi Kostrad dengan membangun Yayasan Kesejahteraan Sosial Dharma Putra pada tanggal 28 April 1964. Waktu membuktikan bahwa di kemudian hari, yayasan dan para anggotanya terlibat dalam bidang-bidang bisnis yang semakin berkembang, seperti transportasi, produksi film, industri, dan proyek intensifikasi pangan. Bahkan disinyalir juga terlibat dalam penyelundupan bahan primer dari Sumatera Utara ke Singapura (Elson, 2001: 176).

Soekarno: “Indonesia Telah Dikentuti”

Bersamaan dengan pengangkatan Soeharto sebagai Pangkostrad, isu-isu nekolim (neo-kolonialisme dan imperialisme) genjar ditiupkan di dalam negeri. Sebagai awalnya, terbongkar keterlibatan CIA pada pemberontakan PRRI di Sumatera pada tahun 1958.

Kebencian Soekarno pada pihak Barat semakin menjadi saat ia mendengar adanya kabar yang mengatakan akan dibentuknya Negara Federasi Malaysia. Soekarno merasa negara baru ini tak ubahnya proyek neo-kolonialisme Inggris. Sebelumnya, Indonesia

telah menjalin kontak persahabatan dan saling bekerjasama dengan para gerilyawan di Brunei dan beberapa daerah lainnya yang menuntut kemerdekaan. Hal ini tak lepas dari politik konfrontasi yang dianut oleh pemerintah saat itu. Dalam sebuah kesempatan di tahun 1960, Soekarno berpidato pada Sidang Majelis Umum di PBB dengan judul *To Build the World a New*. Pada pidatonya itu, Soekarno menyatakan bahwa untuk menata dunia kembali, dibutuhkan satu perjuangan total dan frontal melawan kekuatan negara-negara imperialis dan kapitalis Barat. Dan perjuangan itu hanya bisa dilakukan dengan satu konfrontasi (Tim PDAT, 1998: 147). Sebagai wujud nyatanya, Soekarno lalu mendirikan lembaga tandingan PBB yang disebut CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*).

Untuk menyelesaikan masalah Malaysia-Indonesia ini maka diselenggarakan pertemuan antara Soekarno dengan pemerintah Malaysia yang diwakili oleh Tengku Abdul Rachman Putera di Tokyo pada bulan Juni 1963. Namun ternyata sebulan setelah pertemuan tersebut, Tengku Abdul Rachman Putera menandatangani dokumen pembentukan Federasi Malaysia. Hal ini membuat Soekarno marah dan menyebut, “Indonesia telah dikentuti.”

Perundingan di Manila tak cukup membantu untuk menghadirkan kedamaian di antara dua belah pihak. Maka pada tanggal 16 September 1963, terbentuklah Federasi Malaysia. Aksi ini kemudian diikuti oleh pernyataan politik Indonesia yang memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia. Kampanye “Ganyang Malaysia” segera berkobar di Jakarta. Dengan berapi-api, Soekarno (saat itu telah ditetapkan sebagai Presiden Seumur Hidup oleh MPRS) menggaungkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) dalam sebuah apel besar pada tanggal 3 Mei 1964. Dwikora itu berbunyi: (1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan (2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Serawak dengan menggagalkan pembentukan negara boneka Malaysia.

Dari Komando SIAGA ke KOLAGA

Kemudian dibentuk Komando Siaga (KOGA) yang dipimpin oleh KSAU Omar Dhani. Menanggapi hal ini, sedikit sinis Soeharto mengutarakan pendapatnya, “Rupanya mereka punya keyakinan bahwa yang bisa memimpin perang bukan hanya Angkatan Darat saja, tetapi juga angkatan lainnya.” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 114) Pernyataan ini tentu saja sedikit banyak telah menggambarkan bagaimana saat itu muncul semacam persaingan antar angkatan dalam tubuh militer. Tanggal 2 September 1964, ditetapkan susunan KOGA dengan Laksamana (U) Omar Dhani sebagai panglima dengan Laksamana (L) Mulyadi dan Brigjen A. Wiranatakusumah sebagai wakilnya, dan Komodor (U) Leo Watimena sebagai kepala staf. Sebelumnya, pada tanggal 23 Agustus 1964, bertepatan dengan ulang tahun ke-41 Ibu Tien, lahir anak keenam dan diberi nama Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek).

Sementara itu, pelaksanaan operasi KOGA kemudian mengalami “kekacauan” dalam istilah Soeharto. Elson menyebutkan, perencanaan yang kurang matang telah menyebabkan serangkaian kegagalan (Elson, 2001: 184). Kesan menyombongkan diri tersirat pada komentar Soeharto tentang kegagalan-kegagalan yang dialami oleh pasukan Omar Dhani, seperti yang termuat dalam otobiografinya, “Waktu itu baru saja dijalankan operasi seperti pola ‘Trihora’ dengan infiltrasi dan menerjunkan pasukan dan sebagainya dengan pesawat. Tetapi infiltrasi itu tidak ada yang berhasil, bahkan pesawatnya masuk laut. Dengan ini terbukti bahwa melaksanakan tugas serupa ‘Trihora’ itu tidak segampang seperti yang dikira ...” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 115).

Didorong oleh rasa malu yang ditimbulkan oleh kegagalan-kegagalan itu maka dibentuklah sebuah komando baru dengan nama Komando Mandala Siaga (KOLAGA) pada tanggal 28 Februari 1965. Kali ini, dengan mempertimbangkan pengalamannya di Irian

Barat, nama Soeharto masuk sebagai wakil panglima, bersama Laksamana (L) Mulyadi, di bawah pimpinan Omar Dhani.

Soeharto lalu berkunjung ke Kalimantan Utara dan Sumatera Utara dan segera melakukan evaluasi terhadap kekacauan-kekacauan yang menurutnya menjadi sumber kegagalan infiltrasi. Seperti saat di Komando Mandala dulu, ia berencana untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di Malaysia yang pro-Republik. Meski dalam pernyataannya Soeharto selalu menunjukkan sikap mendukung Dwikora, namun menurut Elson, dalam tubuh militer terdapat keraguan untuk meneruskan kampanye konfrontasi dengan Malaysia ini (Elson, 2001: 179). Bahkan menurut Crouch, tak ada tanda-tanda yang menunjukkan Soekarno ingin membawa permasalahan ini menjadi lebih besar lagi (Crouch, 1986: 60). Mungkin saja strategi konfrontasi ini dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara (Crouch, 1986: 61).

Apa pun alasannya, politik konfrontasi telah menyeret Indonesia kepada situasi ekonomi yang kurang menyenangkan. Inflasi yang menggila dan harga-harga yang melambung naik telah menyuarakan jeritan rakyat di dalam negeri. Di saat yang bersamaan, pemerintah telah menjauhkan dirinya dari bantuan sebesar 50 juta dolar yang akan dikucurkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Politik luar negeri pemerintah segera memalingkan wajahnya ke poros Peking-Jakarta. Sebuah situasi yang sangat kondusif bagi berkembangnya partai yang mengakarkan dirinya pada rakyat kelas bawah, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).

- 17 -

Menjelang Pertumpahan Darah

*“Presiden Soekarno bukan lagi orang yang sama dengan
Bung Karno muda ...”*

- **Roeslan Abdulgani** (dalam Retnowati
Abdulgani-Knapp, 2007) -

KEADAAN dalam negeri belum juga mereda. Rakyat Indonesia yang kelaparan semakin terbakar oleh kampanye anti-Malaysia. Panggung politik juga semakin panas. Pemerintah mengambil langkah menjauh dari Barat dan mendekatkan dirinya pada China. Sementara itu, Uni Soviet, walaupun terkesan masih “malu-malu” turut mendukung gerakan revolusioner di dalam negeri.

Soekarno yang saat itu telah dianggap menjadi salah seorang pemimpin Dunia Ketiga, pada tanggal 1 Januari 1965 melalui Menteri Luar Negeri Soebandrio dengan resmi mengumumkan pernyataan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Soekarno Terlalu *Overconfident*

Kekacauan dalam negeri serta berbagai perpecahan dalam tubuh pemerintah, menurut Retnowati Abdulgani, turut berkontribusi oleh ketidakcakapan Soekarno menanggapi situasi negara saat itu. Menurutny, seiring dengan bertambahnya usia Soekarno

dan terlalu lamanya ia berkuasa, telah membuat Soekarno menjadi *overconfident* (Retnowati-Abdulgani-Knapp, 2007: 40). Bahkan Roeslan Abdulgani, salah satu tokoh yang dekat dengan Presiden saat itu, mengatakan bahwa, “Presiden Soekarno bukan lagi orang yang sama dengan Bung Karno muda di tahun 30-an dan juga bukan figur Bung Karno dewasa di tahun 50-an yang selalu bertindak realistik dan hati-hati.”

Kritik pada Soekarno cenderung diarahkan pada ambisinya menyatukan semua unsur nasionalis, agama, dan komunis, yang dipadukan dengan unsur militer, ke dalam satu kesatuan pemerintahan yang berada di bawah kendali dirinya. Kritik ini terutama ditujukan pada kedekatannya dengan PKI.

Kesibukan pesaing utamanya, yaitu Angkatan Darat, menangani masalah konfrontasi dengan Malaysia telah dimanfaatkan secara baik oleh PKI untuk mendekatkan diri dengan Soekarno. Kepandaian PKI untuk menerjemahkan politik konfrontasi Soekarno berbanding lurus dan memiliki signifikansi terhadap menguatnya posisi PKI dalam percaturan politik dalam negeri (Tim PDAT, 1998: 147).

Ekspansi PKI

Sebelumnya, meskipun menjadi salah satu partai dengan dukungan terbesar saat itu, PKI masih menjadi “anak tiri” dalam kabinet dengan hanya menyertakan dua orang wakilnya, yaitu Dipa Nusantara Aidit dan Lukman sebagai Wakil Ketua MPRS dan DPRGR. Namun seiring dengan manuver politik yang dilakukannya, PKI kemudian semakin menancapkan pengaruhnya dengan diangkatnya Soebandrio dan Leimena sebagai anggota presidium. Hal ini diikuti pula dengan pengangkatan para simpatisan PKI di akhir tahun 1963 sebagai anggota kabinet, seperti Achmad Astrawinata sebagai Menteri Kehakiman dan Njoto sebagai Menteri *Land Reform*.

Merasa dirinya mendapat porsi yang lebih kuat di pemerintahan, PKI mulai berani melancarkan aksi-aksi yang cenderung radikal. Pada tahun 1964, dengan alasan mendukung kampanye anti-nekolim dan berlindung di balik Undang-Undang *Land Reform*, dilakukanlah perampasan harta milik perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika di Indonesia. Aksi ini kemudian berlanjut dengan aksi sepihak para petani PKI berupa perampasan secara paksa tanah-tanah milik tuan tanah besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang umumnya dimiliki oleh orang-orang Partai Nasional Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Tak ayal kampanye *land reform* ini mulai meminta korban nyawa.

Walaupun aksi ini tidak memperoleh dukungan secara resmi dari pemerintah, namun juga tak ada larangan yang tegas untuk menghentikannya. Merasa mendapat angin, PKI hingga awal tahun 1965 memulai aksinya di tingkat pemerintahan. Partai Murba, salah satu partai kecil “komunis nasional” dengan pengaruh besar di pemerintahan, disingkirkan. Rivalitas sebagai sesama partai komunis dimenangkan oleh PKI. Dengan tuduhan bermaksud melemahkan pemerintahan dengan usulannya mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) serta mungkin juga dicurigai telah memperoleh dukungan dari Angkatan Darat, Partai Murba dibekukan pada tanggal 6 Januari 1965. Wakil mereka di kabinet, yaitu Adam Malik (kelak menjadi Wakil Presiden RI) yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh pelan-pelan dikebiri perannya oleh PKI.

Kontroversi Angkatan Kelima

Langkah paling berani diambil oleh PKI saat mereka mulai membunyikan genderang perang di muka pesaingnya, Angkatan Darat. Anggota-anggota kabinet yang berasal dari militer yang anti-PKI disebutnya sebagai “kapitalis-kapitalis birokrat”. Mereka mulai menyoroti gaya hidup para pejabat militer, terutama dari

kalangan Angkatan Darat, yang dinilainya gemar berfoya-foya dan bersenang-senang dengan wanita di saat rakyat sedang kelaparan.

Selain itu, tokoh-tokoh PKI dengan dipimpin oleh D.N. Aidit gencar memperingatkan pemerintah tentang adanya “beberapa bagian” di dalam militer yang dengan sengaja mengarahkan negara memasuki situasi darurat perang (SOB). SOB menurut PKI hanya akan menghadirkan kesempatan bagi pihak militer untuk melancarkan aktivitas mereka yang korup.

Namun di antara sekian banyak kabar yang ditiupkan oleh PKI, manuver yang paling membuat pihak militer kebakaran jenggot adalah ketika PKI mulai merayu Presiden agar membentuk Angkatan Kelima (di luar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian) yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Usulan ini dipercaya berasal dari ide Perdana Menteri Cina, Chou En Lai, yang juga menjanjikan akan menyumbangkan seratus ribu pucuk senjata ringan secara cuma-cuma (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 116). Tampaknya PKI menyadari, apabila terjadi adu kekuatan, kemenangan tidak akan berpihak pada mereka.

Posisi Angkatan Darat makin terjepit saat Soekarno telah mengambil alih usulan ini seolah-olah berasal dari dirinya sendiri (Crouch, 1986: 94). Penuh kehati-hatian, Yani, komandan tertinggi AD dan penguasa *de facto* militer di Indonesia, menyatakan dukungannya untuk mempersenjatai “... tidak hanya satu atau dua bagian dari masyarakat, tetapi seluruh rakyat Indonesia” (Crouch, 1986: 95). Pernyataan ini berkesan diplomatis, dengan maksud tersembunyi. Artinya, AD merasa jika dibutuhkan, semua rakyat Indonesia, tidak hanya buruh dan tani, dapat dipersenjatai untuk keperluan perlindungan negara. Pendapat yang identik juga dikemukakan oleh Nasution. Sebuah penolakan halus untuk menghindari rasa sakit hati dari Soekarno.

Pihak Angkatan Darat juga menyatakan keberatannya dengan usulan yang diajukan PKI melakukan nasakomisasi di segala bidang, termasuk dalam tubuh militer.

Kesal karena usulannya memperoleh tantangan dari Angkatan Darat, PKI lalu pamer kekuatan pada perayaan ulang tahunnya yang ke-45 pada bulan Mei 1965. Di hadapan massa dan para tamu undangan, di antaranya adalah Soekarno dan Le Duc To pemimpin Vietnam Utara, D.N. Aidit membanggakan jumlah anggota partainya yang mencapai tiga juta orang. Jumlah itu belum termasuk dua puluh juta orang anggota dari organisasi-organisasi yang juga bergerak di bawah PKI.

“Dokumen Gilchrist” dan Isu Dewan Jenderal

Di tengah pertentangan yang begitu kencang, terhembus kabar adanya Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta terhadap Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Isu ini terutama didukung oleh temuan “Dokumen Gilchrist” yang bertanggal 24 Maret 1965. Gilchrist adalah nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Sir Andrew Gilchrist. Namanya tertera di sebuah dokumen yang ditemukan di rumah Bill Palmer, seorang importir film Amerika, yang diobrak-abrik oleh Pemuda Rakyat. Surat yang ditemukan itu merupakan surat rahasia dari Gilchrist yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Isinya antara lain mengabarkan tentang adanya suatu operasi bersama antara dirinya dengan Duta Besar Amerika untuk menjatuhkan Soekarno. Juga disebutkan adanya bantuan dari “*our local army friends*”. Hal ini mengindikasikan adanya sekelompok orang di kemiliteran yang bersekongkol dengan pihak asing. Dokumen ini kemudian dijadikan alasan bagi PKI untuk melemparkan tuduhan tentang adanya Dewan Jenderal yang bersiap melakukan *coup d’etat*.

Isu Dewan Jenderal diperkuat dengan beredarnya rekaman rapat Dewan Jenderal. Dalam rekaman itu terdengar suara Mayor Jenderal S. Parman yang sedang menguraikan rencana Dewan

Jenderal untuk menggulingkan Soekarno serta mengambil-alih kekuasaan. Dalam rekaman itu juga dibacakan susunan kabinet yang akan dibentuk setelah pengambilan kekuasaan. Nama-nama jenderal yang kemudian terbunuh dalam peristiwa G 30 S masuk di dalam susunan kabinet. Selain itu, juga disebut-sebut nama Brigjen Sukendro (Ia kemudian selamat dari penculikan karena pada saat Gerakan 30 September dilancarkan, ia sedang berada di Peking).

Melalui Soebandrio Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI), rumor ini lalu sampai di telinga Soekarno yang kemudian merasa perlu untuk memperoleh klarifikasi atas kabar tersebut. Pada tanggal 26 Mei 1965, Presiden mengadakan rapat dengan mengundang keempat panglima dari angkatan bersenjata. Dalam rapat tersebut Presiden menanyakan perihal kebenaran berita tentang keberadaan Dewan Jenderal. Oleh Yani dijelaskan bahwa tidak ada Dewan Jenderal sebagaimana yang dimaksud. Yani mengaku menyuruh S. Parman dan Sukendro untuk menjalin relasi dengan Kedutaan Inggris dan Amerika Serikat, namun bukan untuk tujuan melakukan kudeta. Diakui pula oleh Yani, ada sebuah dewan jenderal, yaitu Wanjakti, sebuah badan yang bertugas menilai dan mempromosikan perwira-perwira militer ke jabatan yang lebih tinggi.

Dubes AS Diganti “Marshall of CIA”

Meskipun telah disanggah oleh Yani, namun kabar di seputar Dewan Jenderal ini terus saja berhembus. Soekarno tidak sepenuhnya percaya atas keterangan Yani. Apalagi Yani mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhannya. Ketidaksetujuan atas terbentuknya Angkatan Kelima, serta berbagai tindakan tegas AD dalam menghambat perkembangan PKI membuat Soekarno mulai berpikir untuk mencopot Yani dari kedudukannya sebagai Panglima Angkatan Darat. Mungkin bukti dari ketidakpatuhan Angkatan Darat tercermin dari dukungannya terhadap terbentuknya sebuah golongan fungsional, Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan

Karya), yang disokong oleh Angkatan Darat (serta angkatan-angkatan lainnya).

Pertengahan tahun 1965 merupakan saat-saat yang menegangkan di mana Angkatan Darat dan PKI berada dalam kondisi siaga, saling berhadapan, seperti layaknya duel dua koboi dalam kancah perpolitikan Indonesia. Masing-masing saling menunggu, membiarkan lawannya untuk menarik pelatuk terlebih dahulu.

Kegentingan kondisi politik akibat adanya rumor Dewan Jenderal semakin parah saat Duta Besar AS Howard Jones digantikan oleh Marshall Green pada bulan Mei. Duta besar yang baru ini dikenal Soekarno sebagai "*Marshall of CIA*". Reputasinya saat menjatuhkan Perdana Menteri Korsel Syngman Rhee membuat Soekarno waspada. Walaupun pada akhirnya Soekarno mau menerima kehadiran Green, namun dalam sebuah acara penyerahan kuasa sebagai duta besar yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni, Soekarno menyampaikan pidato yang menyerang kebijakan luar negeri AS. Hal ini kelak diakui oleh Green membuatnya marah dan berniat meninggalkan tempat berlangsungnya acara, namun diurungkannya (Harsutejo, 2003: 54).

Soekarno Jatuh Pingsan

Sumbu permusuhan mulai dinyalakan saat terdengar kabar Presiden Soekarno jatuh pingsan pada tanggal 5 Agustus. Tersiar kabar bahwa usia Bung Karno tidak akan bertahan lama karena menderita stroke. Hal ini diyakini telah menggerakkan niat PKI, yang ketakutan akan nasib partainya bila Presiden wafat dan AD mengambil alih kekuasaan, untuk memadukan kepentingan mereka dengan berbagai kelompok Angkatan Bersenjata, mulai dari perwira menengah-bawah yang tidak puas hingga kaum loyalis Soekarno di Angkatan Udara (Elson, 2001: 196).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat itu di dalam Angkatan Darat telah terjadi perpecahan, di mana ada sekelompok perwira muda yang terutama berasal dari Divisi Diponegoro merasa

kecewa terhadap gaya hidup serta tindak tanduk para pimpinan AD (Kelompok Yani) di Jakarta yang gemar berfoya-foya, menumpuk kekayaan dengan korupsi, serta bersenang-senang dengan wanita. Yani sendiri telah menjadi semacam karikatur dari perwira Diponegoro yang “rusak”, yang memiliki kekayaan luar biasa, dua istri, rumah-rumah seperti istana, beberapa mobil, hubungan-hubungan dengan orang Amerika dan bakat untuk politik (Crouch, 1986: 123).

Dalam perpecahan ini, tidak jelas di mana posisi Panglima Kostrad Soeharto. Kebiasaannya yang tidak banyak bicara membuat orang menilai dirinya berada dalam posisi netral. Namun bila ditilik dari gaya hidupnya yang sederhana, sama halnya dengan Nasution, jelas ia tidak berada dalam kelompok Yani. Hal ini pula yang mungkin membuat namanya tidak masuk dalam daftar jenderal yang harus diculik.

Dengan rentetan kejadian di tahun 1965, Indonesia seperti sedang digiring memasuki suatu peristiwa yang menjadi klimaks dari konflik-konflik yang terbangun sebelumnya. Akhirnya, terjadilah sebuah tragedi nasional yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September.

-18- Kesaksian Soeharto tentang Gerakan 30 September

“Percayalah, Pak Ban. Vonis buat saya itu hanya sandiwara”
- **Letkol Untung** kepada Soebandrio sesaat sebelum dieksekusi mati
(Harsutejo, 2003) -

SEBAGAI Panglima Kostrad, Soeharto ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan perayaan peringatan Hari Angkatan Bersenjata yang rencananya akan digelar pada tanggal 5 Oktober 1965. Ada kabar bahwa perayaan kali ini akan diselenggarakan besar-besaran untuk menandingi perayaan ulang tahun PKI ke-45 yang sebelumnya telah diperingati pada bulan Mei.

Berkaitan dengan tugasnya itu, pada tanggal 30 September dan hari-hari sebelumnya, Soeharto sedang sibuk mempersiapkan pasukan yang datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk keperluan baris-berbaris pada tanggal 5 Oktober.

Dikunjungi Kolonel Latief

Pukul 9 hingga tengah malam, Soeharto bersama istrinya berada di Rumah Sakit Gatot Soebroto menunggu Tommy yang dirawat karena terkena tumpahan sup panas. “Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latief berjalan di depan *zaal* tempat Tommy dirawat,” kenang Soeharto (Dwipayana dan

Ramadhan, 1989: 118). Tengah malam, istrinya meminta Soeharto pulang ke rumah mereka di Jalan Haji Agus Salim karena putri bungsu mereka yang baru berumur satu tahun sendirian di rumah hanya ditemani oleh seorang pembantu. Maka Soeharto pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, karena terlalu lelah, ia langsung tertidur.

Sekitar pukul 4.30, tanggal 1 Oktober, Soeharto terbangun karena datangnya Hamid Syamsuddin, seorang kameramen yang bekerja untuk TVRI. Dari Hamid, Soeharto mengetahui ada bunyi tembakan di beberapa tempat. Pukul 5, datang tetangganya, Mashuri, yang mengabarkan hal yang sama. Dengan dahi berkenyit, Soeharto berupaya mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum pukul 6, akhirnya Soeharto mengetahui ada beberapa pejabat tinggi Angkatan Darat yang telah diculik oleh sekelompok pasukan tak dikenal.

Cepat Soeharto berpakaian. Melalui Letkol Sadjiman, Soeharto menitipkan pesan pada Umar Wirahadikusumah (kelak menjadi Wakil Presiden RI), "Segera kembali sajalah, dan laporkan kepada Pak Umar, saya akan cepat datang di Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat." Saat menuju Kostrad, Soeharto melihat ada pasukan (liar) yang berjaga di sekitar Monas, Lapangan Merdeka, di Jalan Merdeka Timur. Di Kostrad, dari petugas piket ia memperoleh kabar bahwa Presiden sedang tidak berada di Istana Merdeka, melainkan berputar ke arah Halim.

Firasat Soeharto

Pukul 7 lebih beberapa menit, Soeharto mendengarkan siaran berita di Radio Republik Indonesia (RRI) mengenai Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung. "Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI, malahan

pernah menjadi anak didik tokoh PKI, Alimin" (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 119).

Dalam berita itu dikatakan, Letkol Untung, Komandan Batalion Resimen Cakrabirawa yang bertugas sebagai pasukan pengawal istana, telah mengambil langkah-langkah untuk menggagalkan usaha kudeta oleh Dewan Jenderal yang disponsori oleh CIA. Soeharto lantas berpikir. Apa yang dikatakan oleh Untung adalah tidak benar. Ia meyakini tidak ada yang namanya Dewan Jenderal. Gerakan Untung, baginya adalah sebuah gerakan kup untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, "Dan pasti didalangi PKI" (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 121).

Diketahui ada enam jenderal yang berhasil diculik oleh Kelompok Untung, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri Panglima Angkatan Darat), Mayor Jenderal Soeprapto (Deputi II), Mayor Jenderal Harjono, M.T. (Deputi III), Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I), Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan (Asisten IV), dan Brigadir Jenderal Sutojo Siswomiharjo (Oditur Jenderal Angkatan Darat). Satu jenderal, yaitu A.H. Nasution (Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan) berhasil lolos dari penyergapan. Namun putrinya yang baru berumur lima tahun, Ade Irma Suryani, terluka parah kena tembakan. Kelompok Untung juga membawa ajudan Nasution yang bernama Pierre Tendean yang menyamar sebagai Nasution.

Mengamankan Monas

Soeharto lantas memberi perintah kepada Letkol Ali Moertopo dan Brigjen Sabirin Mochtar untuk membawa komandan batalion pasukan yang berada di sekitar Monas. Ada kecurigaan, pasukan tersebut (kelak diketahui sebagai pasukan Batalion 454/Diponegoro dari Jawa Tengah dan Batalion 530/Brawijaya dari Jawa Timur) telah dimanfaatkan Untung untuk mendukung Gerakan 30 September. Oleh karena komandan kedua pasukan tersebut

sedang ke Istana, maka yang datang menghadap ke Soeharto adalah wakil komandan dari masing-masing batalion.

Dalam otobiografinya, Soeharto bercerita tentang kedatangan Kapten Kuntjoro dari Batalion 454 dan Kapten Suradi (mungkin maksudnya Kapten Soekarbi - *ed.*). Keduanya menjelaskan bahwa kehadiran pasukan mereka di seputar Monas adalah untuk melindungi Presiden dari Dewan Jenderal yang ingin melakukan kup (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 120). Oleh Soeharto, keduanya diberitahu bahwa isu tersebut adalah tidak benar. Keduanya lalu diperintahkan untuk mengembalikan pasukan ke Kostrad. “Ini merupakan pemberontakan,” tegas Soeharto, “saya beri batas waktu sampai pukul 6 sore. Kalau sampai pukul 6 sore nanti tidak segera kembali ke Kostrad, berarti kalian sudah berhadapan dengan pasukan saya.”

Setelah keduanya pergi, Soeharto lalu mengadakan rapat staf yang di antaranya dihadiri oleh Yoga Sugama, Wahono, Djoko Basuki, Sruhardjo, dan Achmad Wiranatakusumah. Hasil rapat itu adalah menyimpulkan bahwa Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Untung merupakan kup perebutan kekuasaan secara paksa dan oleh karena itu harus dilawan. Seluruh peserta rapat setuju dengan rumusan itu.

Sementara itu sebagian besar pasukan yang ada di Monas kemudian kembali ke Kostrad, kecuali sebagian kecil pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Mayor Sukirno (teman Untung) yang pada akhirnya juga menyingkir ke Halim. Dengan demikian, Soeharto telah berhasil “menyelamatkan dua batalion yang dilibatkan dalam petualangan Untung dan sekaligus melucuti kekuatan Untung secara halus” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 120).

Mengonsolidasikan Angkatan-angkatan

Soeharto bergerak cepat dengan mengabarkan kepada Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Martadinata, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Sutjipto Judodihardjo, dan Wakil

Angkatan Udara Bidang Operasi Leo Wattimena (saat itu Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani tidak ada di tempat) bahwa untuk sementara Komando Angkatan Darat, seperti biasanya saat Yani berhalangan hadir, dipegang oleh dirinya. Ia meminta semua panglima untuk mengendalikan pasukan masing-masing dan menghindari gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Kostrad. Ia juga menceritakan rencananya untuk melawan kelompok Untung. Dan untuk menghindari pertikaian dan kesalahpahaman antar pasukan, Soeharto meminta agar ketiga angkatan lainnya mendukung upaya yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat. Melalui perbincangan lewat telepon, ketiga wakil dari masing-masing angkatan itu kemudian setuju untuk mendukung Angkatan Darat. Elson mencatat, dukungan yang diperoleh Soeharto dari angkatan-angkatan lainnya ini merupakan bukti bahwa posisinya sebagai Panglima Kostrad sangat dihargai. Selain itu juga, mungkin Soeharto telah menunjukkan kemampuannya yang persuasif dalam meyakinkan para panglima (Elson, 2001: 202).

Selanjutnya, Soeharto juga mengirim utusan untuk menemui Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (Panglima RPKAD) di Cijantung agar turut serta dalam pengejaran dan penyelamatan keenam jenderal yang nasibnya saat itu belum diketahui. Pukul 11 pagi, Kolonel Sarwo Edhie tiba di Kostrad untuk menjalankan perintah Soeharto mengamankan RRI dan fasilitas telekomunikasi. Siang pada tanggal 1 Oktober itu memang digunakan Soeharto untuk berhitung kekuatan serta sibuk memilah-milah mana pasukan yang berpihak pada musuh dan mana pasukan yang setia pada Pancasila.

Sekitar pukul 12 sebelum Sarwo Edhie sempat mengamankan RRI, Untung menyiarkan pengumumannya yang kedua. Dekrit ini berisi penetapan terbentuknya Dewan Revolusi yang bertugas menyusun dan menyelenggarakan otoritas di Indonesia sampai dengan Pemilu. Kabinet dinyatakan demisioner. Diumumkan pula daftar nama-nama mereka yang masuk ke dalam Dewan Revolusi, yang sebagian besar dari mereka tidak mengetahui penunjukan

ini. Hal yang terasa janggal dalam keputusan Untung adalah tidak terteranya nama Soekarno dalam “tatanan pemerintahan baru”. Semua pangkat di atas letnan kolonel, pangkat Untung sebagai pimpinan Dewan Revolusi, dihapuskan.

Presiden Pergi ke Halim

Di lain tempat, Presiden Soekarno yang malam sebelumnya tinggal di kediaman Dewi (istri ketiganya) mengurungkan niatnya ke Istana Negara setelah mendengar kabar adanya pasukan tak dikenal di Monas. Ia lalu mengalihkan tujuan ke Halim, tempat di mana ia sewaktu-waktu dapat diselamatkan melalui pesawat udara bila terjadi kekacauan. Kehadiran Soekarno di Halim ini kemudian mengundang kontroversi karena saat itu Halim dianggap menjadi markas dari kelompok pemberontak menyusul tuduhan atas keterlibatan oknum Angkatan Udara, yang ditegaskan melalui pernyataan radio Panglima Angkatan Udara Omar Dhani yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September merupakan gerakan pembersihan dalam diri Angkatan Darat yang bertujuan melindungi revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi dari serbuan CIA (Elson, 2001: 208).

Di Halim, Soekarno memperoleh laporan dari Brigadir Jenderal Supardjo (salah satu dari perwira militer yang dianggap menjadi otak komplotan penculik) bahwa ada beberapa perwira muda yang telah melakukan aksi terhadap Dewan Jenderal. Soekarno tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan laporan tersebut. Ia hanya meminta agar Supardjo dapat membuktikan keterlibatan para jenderal itu dalam Dewan Jenderal. Suparjo menyanggupi akan segera membawa bukti-bukti yang diminta oleh Presiden. “Kalau kau tidak dapat, aku potong lehermu nanti,” ujar Soekarno pada Supardjo saat itu (Crouch, 1986: 136).

Sosok Brigjen Supardjo sendiri adalah sosok yang sangat dicurigai Soeharto berada di balik Gerakan 30 September. Dari keterangan Umar (Wirahadikusumah), Soeharto mengetahui bahwa

Supardjo berada di Istana sesaat telah terjadinya gerakan. Hal ini sangatlah aneh baginya karena Supardjo harusnya saat itu sedang bertugas di Kalimantan (Elson, 2001: 204).

Antara Soeharto dan Pranoto

Pukul 4, Soekarno yang memperoleh laporan kemungkinan terbunuhnya Yani, kemudian menyelenggarakan rapat di Halim. Presiden mengundang pimpinan angkatan lain untuk membahas siapa yang harus menggantikan kedudukan Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat. Panglima AL R.E. Martadinata mengajukan nama Soeharto namun ditolak karena dianggap Presiden terlalu “keras kepala” (*koppig*). Lalu muncul nama-nama lain seperti Mursjid, Basuki Rachmat, dan Pranoto Reksosamudro. Mursjid ditolak karena “suka berkelahi”, sedang Basuki Rachmat dianggap “tidak sehat” (Crouch, 1986: 137). Atas usul Supardjo, maka dipilihlah Pranoto Reksosamudro, seorang Soekarnoisme yang tidak anti-PKI dan juga diterima oleh Gerakan 30 September (Crouch, 1986: 138).

Segera disusun sebuah pengumuman yang akan disebarluaskan melalui radio tentang keberadaan Presiden yang selamat dan sehat walafiat, serta akan diumumkan pula penunjukan Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana tugas harian Angkatan Darat sementara. Naskah ini kemudian diberikan pada Panglima AL Laksamana Martadinata. Setibanya di RRI, ternyata RRI telah dikuasai oleh Sarwo Edhie dan Martadinata dilarang masuk.

Menjelang petang, Nasution keluar dari persembunyiannya dan datang ke Kostrad dengan ditemani oleh Letkol Hidayat Wirayasonjaya. Dalam memoarnya, diceritakan betapa terharunya Nasution atas penyambutan yang diperolehnya dari kawan-kawannya di Kostrad (Tim PDAT, 1998: 166). Mayor Jenderal Soeharto merangkulnya di depan pintu. Nasution lalu dipapah masuk untuk dirawat oleh Dokter Kostrad. Kehadiran Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata

Nasution di Markas Kostrad adalah sebuah dukungan psikologis dari upaya Soeharto menghadapi perpecahan di tubuh militer.

Pengumuman Soeharto

Petang harinya, bersamaan waktu dengan dikuasainya RRI dan Telkom oleh Sarwo Edhie, Soeharto mengumumkan keberadaan sebuah kelompok yang menamakan dirinya Dewan Revolusi, yang bermaksud melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden. Berikut adalah rekaman pidato Soeharto yang dibacakan oleh Brigjen Ibnu Subroto dan dipancarkan oleh RRI pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 19.00:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Para pendengar sekalian di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu telah terjadi di Jakarta suatu peristiwa yang dilakukan oleh gerakan kontrarevolusioner, yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah 1. Letnan jenderal A. Yani, 2. Mayor Jenderal Soeprapto, 3. Mayor Jenderal S. Parman, 4. Mayor Jenderal Harjono M.T., 5. Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan, 6. Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo.

Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan Kantor Pusat Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi teror mereka.

Dalam pada itu perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Yang Mulia Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat.

Para pendengar sekalian,

Untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah terdapat saling pengertian, bekerjasama dan kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan kontra-revolusioner yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Para pendengar, sebangsa se-Tanah Air yang budiman,

Apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut Dewan revolusi Indonesia. Mereka telah mengambil alih kekuasaan negara atau lazimnya disebut coup dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melempar Kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner, di samping mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.

Para pendengar sekalian,

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan-tindakan mereka itu kontra-revolusioner yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Kami yakin, dengan bantuan penuh dari massa rakyat yang progresif revolusioner, gerakan kontra revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan-leburkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi kita yang tercinta, Bung Karno.

Diharap, masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga serta terus memanjatkan doa ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, semoga Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Bung Karno terus ada dalam lindungan-Nya.

Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhai Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih."

Soeharto Menolak Keinginan Soekarno

Petang itu pula datang Kolonel KKO Bambang Widjanarko ke Kostrad yang hendak melaporkan bahwa Presiden Soekarno berada dalam keadaan sehat di Halim. Selain itu, maksud kedatangannya untuk mengundang Pranoto Reksosamudro untuk menghadap Presiden Soekarno karena telah ditunjuk sebagai Pejabat Panglima Angkatan Darat. Permintaan ini ditolak oleh Soeharto. Sebelumnya, Umar Wirahadikusumah yang juga dipanggil oleh Soekarno dilarang untuk pergi ke Halim. Menurutnya, dalam keadaan yang genting dan penuh ketidakpastian seperti itu, Soeharto tidak menginginkan adanya tambahan jumlah korban jenderal dari pihak Angkatan Darat.

Selain alasan itu, penolakan ini juga didorong oleh kekecewaan Soeharto dan Nasution atas campur tangan pihak lain terhadap Angkatan Darat. Kepada Widjanarko, Nasution menjelaskan, "Kami tak menolak order Presiden, tetapi order itu belum bisa dilaksanakan. Mayjen Soeharto sedang memimpin operasi dan tentulah tak dapat diberhentikan begitu saja. Itu adalah urusan teknis militer yang dihadapi, urusan politik terserah Bapak (Soekarno-*ed.*)" (Tim PDAT, 1998: 168). Sebelumnya, kepada Panglima AL Martadinata dan Panglima KKO Hartono, telah ditegaskan oleh Nasution untuk membela "order tetap" AD (yaitu Soeharto sebagai pengganti Yani) dari intervensi Presiden.

Melalui Widjanarko ini Soeharto berkesempatan meminta Presiden untuk segera diungsikan dari Halim karena rencananya Angkatan Darat akan segera menyerbu ke Halim yang diperkirakan menjadi markas dari Kelompok Untung. Oleh Widjanarko, pe-

san ini disampaikan kepada Dr. Leimena, yang kemudian berhasil membujuk Soekarno untuk keluar dari Halim menuju Istana Bogor.

RPKAD Menyerbu Halim

Penting bagi Soeharto untuk mengeluarkan Soekarno dari Halim. Bagaimanapun, keberadaan Soekarno di Halim telah menghambat laju gerak Soeharto dalam mengejar pemberontak. Bila ia tetap memaksa menyerang Halim, sementara Soekarno masih berada di sana, akan muncul kesan bahwa Soeharto-lah yang menjadi pemberontak. Hal ini diakui oleh Soeharto, "Beliau mesti ada di pihak kita, sedikitnya di wilayah yang kita kuasai ..." (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 125). Malam itu juga, Soeharto memindahkan markas Kostrad ke Senayan karena adanya kabar akan ada pesawat AURI yang akan menjatuhkan bom di Kostrad (Harsutejo, 2003: 67).

Ketegangan memuncak antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Dini hari tanggal 2 Oktober 1965, mengikuti kepergian Soekarno, Panglima AU Omar Dhani dan Leo Wattimena terbang dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules menuju Madiun. Saat berada di pesawat itu, Omar Dhani mendapat kabar bahwa pesawat Jetstar yang memuat Menteri Negara Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang yang baru pulang dari Medan, ditembaki oleh Artileri Serangan Udara (Arsu) AD saat terbang rendah di atas Tanjungpriok. Omar Dhani juga telah mendengar adanya persiapan Kostrad menyerang Halim. Melalui radiogram, ia mengirimkan pesan ke Halim yang berbunyi, "... katakan kepada Mayjen Soeharto agar membatalkan rencananya tentang Halim karena Halim adalah wilayah Angkatan Udara. Jika Jenderal Soeharto tidak menghiraukan ini, ia akan berhadapan dengan Angkatan Udara" (Crouch, 1986: 141).

Nyatanya peringatan ini tidak didengarkan oleh Soeharto. Pada pukul 6 pagi tanggal 2 Oktober, RPKAD pimpinan Sarwo Edhie menyerbu masuk ke pangkalan Halim. RPKAD dapat mengua-

sai PAU tanpa perlawanan. Laksda Sri Mulyono Herlambang dapat meyakinkan RPKAD tak ada pesawat yang terbang ke Kostrad. Diketahui D.N. Aidit telah pergi ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat milik AU. Sementara itu terjadi pertempuran kecil dengan pasukan penjaga serta sisa dari Batalion 454 Diponegoro di Lubang Buaya. Atas peran Sri Mulyono Herlambang, gencatan senjata dapat terwujud. Ia kemudian mengajak Sarwo Edhi untuk menemui Soeharto yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Istana Bogor.

Soeharto Menghadap Presiden

Pukul 11, Soeharto menerima panggilan dari Soekarno untuk datang ke Istana Bogor. Dengan berkendara jip dan dikawal oleh sebuah panser, Soeharto tiba di Istana Bogor pada pukul 14.00. Di sana, selain Soekarno telah hadir Chaerul Saleh, Pranoto, Leo Wattimena, Omar Dhani, dan Sabur. “Maka suasana tegang meliputi kami, maklum di sana ada Omar Dhani yang sudah sangat saya curigai,” ujar Soeharto tentang situasi saat itu (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 129).

Dalam pertemuan tersebut, Soeharto memaparkan bukti-bukti keterlibatan oknum AU atas terjadinya Gerakan 30 September. Ia juga memanfaatkan posisinya untuk mendesak Soekarno memberikan legitimasi melalui pidato di radio terhadap tanggung jawabnya sebagai pemulih keamanan dan ketertiban. Menanggapi pengangkatan Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian AD, Soeharto menulis, “Perasaan saya mengenai pengangkatan Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian menyebutkan tidak *sreg*. Saya kurang percaya padanya. Tetapi saya diam saja” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 131).

Pertemuan antara Soekarno dan Soeharto telah mengakhiri ketegangan di Halim. Pada keesokan harinya, atas bantuan seorang anggota polisi bernama Sukitman yang berhasil meloloskan diri dari kelompok penculik, ditemukan tempat dikuburnya jenazah

para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya, tepatnya di sebuah sumur tua daerah Kebun Karet. Penggalian kembali kubur itu dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober dalam suasana yang emosional. Santer mendengar kabar yang mengatakan bahwa para jenderal itu telah terlebih dahulu disiksa sebelum ditembak mati. Jenazah-jenazah ini kemudian diperiksa oleh tim dokter gabungan dari Angkatan Darat dan Universitas Indonesia. Sayangnya hingga sekarang hasil visum dari tim dokter ini tidak pernah dipublikasikan.

Setelah semalam disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat, jenazah-jenazah itu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata bertepatan dengan Hari ABRI 5 Oktober 1965. Berita-berita yang termuat di media massa kemudian memunculkan kemarahan terhadap PKI yang dianggap menjadi dalang Gerakan 30 September.

- 19 -

Apakah Soeharto Terlibat G 30 S?

“Kami tanyakan waktu itu, apakah mayat para jenderal akan diotopsi secara lengkap atau tidak. Para jenderal yang hadir, termasuk Pak Harto bilang tak usah”

- **Prof. Dr. Arif Budianto** (Surya Lesmana, dkk., (ed.), 2005) -

BANYAK pihak yang mencatat bahwa Gerakan 30 September adalah sebuah “berkah” bagi karier Soeharto. Sebelumnya, nama Soeharto relatif jarang disebut-sebut, namun setelah melalui proses yang berliku namun cukup singkat, nama Soeharto muncul begitu saja ke permukaan.

Sebagai *rising star* yang dilahirkan dari peristiwa berdarah, Soeharto dikenal karena penampilannya di masa-masa dramatis ini. Kemampuannya untuk tetap tenang dan penuh pertimbangan mungkin hanya bisa diimbangi oleh kemampuannya dalam menyesuaikan tindakan dengan kepekaan tinggi terhadap peristiwa yang sedang dialami (Elson, 2001: 215).

Pendeknya, bakat terpendam yang selama ini tidak terlihat oleh orang; seperti keputusan kilatnya mengambil alih komando Angkatan Darat, kemampuan persuasifnya untuk memperoleh dukungan dari angkatan lainnya, serta keberaniannya melawan kehendak Soekarno yang menunjuk Pranoto sebagai Pejabat Panglima AD, benar-benar muncul di saat yang tepat.

Meski demikian dari beberapa fakta yang tercecer dari peristiwa berdarah Gerakan 30 September, terutama fakta-fakta yang terungkap setelah jatuhnya Orde Baru, ditemukan beberapa kejanggalan yang mau tidak mau telah menyeret namanya dan memunculkan dugaan adanya keterlibatan Soeharto dalam gerakan ini.

W.F. Wertheim seperti yang termuat dalam tulisan Crouch menggunakan metode detektif untuk menjelaskan kecurigaan ini. Menurut Wertheim, untuk menduga siapa yang berada di balik Gerakan 30 September dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan: Siapa yang akan mendapat keuntungan dari kejahatan yang terjadi?

Hal yang sama dilontarkan pula oleh David Johnson, Direktur Pusat Informasi Kementerian Pertahanan dan Keamanan AS ketika sedang melakukan penelitian tentang G 30 S (Eros Djarot, *dkk.*, 2006: 10). Jawabnya tentu saja Soeharto (Crouch, 1986: 116). Gerakan 30 September terbukti telah menjadi pembuka jalan baginya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Apalagi menurut Wertheim, ia juga memiliki hubungan-hubungan pribadi dengan tokoh-tokoh utama komplotan.

Letkol Untung yang Naif

Soeharto memang “secara kebetulan” memiliki kedekatan hubungan dengan tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September seperti Untung, Latief, Sjam Kamaruzzaman, dan Supardjo. Keempatnya adalah nama-nama yang dalam buku resmi yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara disebutkan sebagai kader PKI yang disusupkan di tubuh Militer.

Untung adalah anak buah Soeharto semasa di Divisi Diponegoro pada pertengahan tahun 50-an. Mereka sama-sama tergabung dalam Kelompok Pathuk di masa perang kemerdekaan, walaupun tidak bergabung di tahun yang sama. Untung juga termasuk salah satu prajurit yang menerima penghargaan atas keberanian-

nya dalam operasi pembebasan Irian Barat, di bawah komando Soeharto. Kabarnya, di antara keduanya telah terjalin hubungan yang cukup erat. Bahkan saat Untung menikah di tahun 1964 (setahun sebelum meletusnya Gerakan 30 September), Soeharto rela datang menempuh perjalanan jauh Jakarta-Kebumen bersama istrinya. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa pengenalan Untung dengan istrinya justru terjadi berkat jasa Ibu Tien Soeharto (Harsutejo, 2003: 160).

Menurut kesaksian Latief, Soeharto sempat marah ketika tahu Untung dipindahkan menjadi Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa; tampaknya Soeharto ingin mempertahankan Untung dalam jajaran Kostrad (Elson, 2001: 223). Berbeda dengan cerita yang tersebar di masa Orde Baru, di mana Untung ditampilkan sebagai tokoh antagonis yang kejam dan bengis dalam film semi-dokumenter G 30 S/PKI yang diproduksi di masa itu, Letkol Untung dikenal sebagai sosok yang polos dan taat pada agama. Menurut Soebandrio, kepolosannya ini tampak sesaat sebelum dirinya dieksekusi mati di Cimahi tahun 1969, ia masih sempat berpesan, “Percayalah, Pak Ban. Vonis buat saya itu hanya sandiwara” (Harsutejo, 2003: 160). Ia masih juga percaya Soeharto tidak akan mengkhianatnya.

Latief, “Tukang Pukul” Soeharto

Sama halnya dengan Untung, Latief juga pernah menjadi anak buah Soeharto di Divisi Diponegoro. Ia ikut ambil bagian sebagai salah satu Komandan Kompi dalam SU 1 Maret 1949. Soeharto pun hadir saat Latief mengkhitan anaknya. Informasi dari Anton Ngenget, mantan agen CIA, Latief adalah “tukang pukul” Soeharto (Eros Djarot, *dkk.*, 2006: 28).

Saat terjadinya G 30 S, Latief menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri I Kodam Jaya, di bawah Umar Wirahadikusumah. Ia kemudian divonis penjara seumur hidup setelah pledoinya ditolak. Setelah dibebaskan di bulan April tahun 1999, banyak

informasi yang terungkap seputar masalah Gerakan 30 September. Sebagai Komandan Brigif I, ia mengaku menemui Pangkostrad Soeharto dua kali sebelum terjadinya aksi penculikan jenderal. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 28 September 1965 (dua hari sebelum kejadian). Saat itu Latief menanyakan kabar mengenai Dewan Jenderal yang dijawab oleh Soeharto akan segera mencari tahu mengenai keberadaan Dewan Jenderal itu.

Pada tanggal 30 September, Latief didatangi oleh Untung dan Supardjo di rumahnya yang ada di Cawang. Keduanya menipiskan pesan agar Latief melaporkan kepada Soeharto bahwa besok pagi akan ada tujuh jenderal yang akan dihadapkan ke Presiden oleh Resimen Cakrabirawa. Latief lalu pergi menemui Soeharto yang sedang menunggu Tommy di RS Gatot Soebroto. Berbeda dengan keterangan Soeharto yang mengatakan hanya melihat Latief melintas di depan bangsal Tommy, Latief mengaku sempat berbicara dengan Soeharto. Pada kesempatan itu ia melaporkan bahwa besok pagi akan ada tujuh jenderal yang dihadapkan pada Presiden Soekarno. Soeharto lalu bertanya siapa yang memimpin gerakan. "Letkol Untung," jawab Latief. Soeharto hanya manggut-manggut saja tak bersuara. Karena Soeharto diam, Latief lalu pamit pulang (Surya Lesmana, *dkk.*, (ed.), 2005: 82).

Pembelaan diri Soeharto atas keterangan Latief ini ternyata inkonsisten. Setidaknya ada tiga versi kisah pertemuan dengan Latief yang diceritakan kembali oleh Soeharto. Versi pertama, seperti yang ditulis dalam otobiografinya, Soeharto hanya "sempat menyaksikan Kolonel Latief berjalan di depan bangsal tempat Tommy dirawat" (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 118).

Versi kedua adalah versi yang diceritakan Soeharto kepada Arnold Brackman, penulis *The Communist Collapse in Indonesia*. Dalam keterangannya itu, ia mengaku terharu atas perhatian Latief atas musibah yang menimpa anaknya, namun kemudian tersadar bahwa Latief hanya sekedar mengecek keberadaan dirinya. Yang agak kontroversial adalah versi ketiga, yaitu yang dikisahkan Soe-

harto dalam wawancara dengan *Der Spiegel* Jerman (Barat) pada bulan Juni 1970. Menurut Soeharto malam itu Latief datang untuk membunuhnya namun ia mengurungkan niatnya karena tidak berani melakukannya di depan umum (James Luhulima, 2005: 44). Ada hal yang menarik terungkap saat Latief memberikan kesaksiannya di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Dalam pembelaannya itu, Latief sempat menyinggung apa yang disebut oleh Soebandrio sebagai “Skandal Soeharto” (Harsutejo, 2003: 162).

Diceritakan oleh Latief, saat terjadinya Serangan Umum 1 Maret, ia bersama pasukannya mendapat perintah dari Letkol Soeharto untuk menyerang dan menduduki sepanjang Malioboro, mulai dari Stasiun Tugu hingga Pasar Besar dekat Istana Kesultanan Yogyakarta. Melalui pertempuran yang sengit dan memakan banyak korban jiwa, ia berhasil keluar dari kota dan kembali ke markasnya, tempat Soeharto sedang beristirahat menikmati soto babat (Harsutejo, 2003: 162). Fakta inilah yang kemudian oleh Soebandrio digunakan sebagai alasan untuk meragukan peran Soeharto dalam SU 1 Maret.

Supardjo dan Sjam

Nama lain yang terkait erat dengan Soeharto adalah Brigjen Supardjo. Namanya disebut-sebut sebagai salah satu tokoh utama Gerakan 30 September dalam otobiografi Soeharto. Ia berasal dari Divisi Siliwangi.

Menurut pengakuan Latief, Supardjolah yang menyusun nama-nama Dewan Jenderal yang harus diculik oleh pasukan Untung. Bersama Untung, ia adalah motor penggerak Gerakan 30 September. Saat terjadi penculikan, ia menjabat sebagai Panglima Kopur II Kostrad di bawah pimpinan Soeharto. Hubungan keduanya cukup akrab. Hal ini ditunjukkan saat menjabat sebagai Wakil Panglima Kolaga, Soeharto menyempatkan diri mengunjungi Brigjen Supardjo di Kalimantan. Kabarnya, ia termasuk dalam Kelompok Kolonel Suwanto (SESKOAD, dulu SSKAD, Bandung). Ia

dicurigai memiliki hubungan lama dengan CIA dan menjadi pe-tugas Soeharto dalam mencari dana dari luar negeri (Harsutejo, 2003: 166). Dalam catatan resmi, ia dikatakan pernah mendapatkan pendidikan militer di Amerika, yakni di Fort Bragg dan Oki-nawa. Tentu saja hal ini dapat terwujud setelah melalui seleksi yang ketat dari CIA. Maka dari itu, menjadi sangat aneh bila Supardjo kemudian disebut sebagai antek komunis.

Barangkali yang paling misterius adalah sosok Sjam Kama-ruzzaman. Hingga saat ini masih beredar desas desus di kalangan bekas tahanan politik Orde Baru bahwa sebenarnya Sjam Kamaruz-zaman masih hidup. Bahkan ada yang mengaku bertemu dengan-nya di Meksiko (Harsutejo, 2003: 168). Nama asli Sjam adalah Syam-sul Qomar bin Mubaidah. Ia teman seangkatan Soeharto di Ke-lompok Pathuk.

Ketika Soeharto memimpin pelucutan tentara Jepang di Kotabaru, Yogya, Sjam menjadi salah satu anak buahnya. Sekitar tahun 1947, ia berkenalan dengan D.N. Aidit. Hubungan Sjam sangat dekat dengan Aidit maupun Soeharto. Peter Dale Scott menyebut Sjam sering datang dan menginap di rumah Soeharto di Jogja (Harsutejo, 2003: 170). Sedang Soebandrio menuduhnya bekerja sebagai perwira intelijen AD, serta menjadi mitra lokal CIA di Indonesia. Ada kabar ia turut serta mengikuti kursus militer di SESKOAD, Bandung bersama Soeharto.

Tahun 1960-an ia diangkat menjadi Ketua Biro Khusus PKI, suatu jaringan intelijen PKI yang berhubungan langsung dengan D.N. Aidit yang bertujuan mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Tugasnya yang lain adalah membangun sel-sel PKI di tubuh ABRI dan membinanya.

Menurut sebuah sumber yang pernah bekerja sebagai agen CIA, Soeharto mendapat perhatian yang cukup dari Biro Khusus PKI dan dibina melalui Sjam, Untung, dan Latief (Harsutejo, 2003: 172). Namun berbeda dengan pendapat itu, Wertheim menilai Sjam adalah agen AD yang disusupkan ke tubuh PKI, bukan sebaliknya

(Crouch, 1986: 116). Hal ini mungkin menjelaskan mengapa nama Sjam masuk dalam daftar penerima gaji di Kodam Jaya (Harsutejo, 2003: 174). Dengan dasar ini, tumbuh dugaan bahwa misi sebenarnya Sjam adalah melakukan infiltrasi ke tubuh ABRI untuk mencari tahu siapa-siapa yang termasuk 30% personil ABRI simpatisan PKI yang mencoblos lambang palu-arit dalam pemilu tahun 1955. Mereka kemudian direncanakan untuk didepak dan dilenyapkan (Harsutejo, 2003: 174).

Mata Rantai yang Putus

Dalam bukunya, *G 30 S: Sejarah yang Digelapkan*, Harsutejo (2003) memperbandingkan keterlibatan Soeharto pada Peristiwa 3 Juli 1946 dan Gerakan 30 September. Menurutnya, ada kesamaan modus operandi di antara keduanya. Pada Peristiwa 3 Juli, mula-mula Letkol. Soeharto berada dalam satu kubu dengan atasannya Komandan Divisi Mayjen. Soedarsono yang telah menculik PM Syahrir. Mereka menduduki RRI dan Kantor Telepon Yogya pada tanggal 2 Juli 1946. Anehnya, dengan cara yang lihai Soeharto berbalik menangkap kelompok yang mencoba melakukan kudeta. Ketika itu Sjam berperan sebagai intel Batalion X pimpinan Soeharto. Rupanya permainan yang sama diterapkan dalam G 30 S (Harsutejo, 2003: 173).

Jika dugaan ini benar maka terjawablah semua pertanyaan atas kegagalan-kegagalan yang terjadi di seputar peristiwa G 30 S ini. Bisa jadi, Sjam-lah yang menjadi *missing-link* yang dibutuhkan untuk melengkapi berbagai teori untuk mencari siapa dalang dari Gerakan 30 September. Bila dugaan ini benar, terungkap pula alasan mengapa Sjam memerintahkan “Tangkap hidup atau mati” para jenderal yang akhirnya kemudian berujung pada kerugian bagi para pelaku. Sesuatu yang berada di luar rencana semula. Juga menjadi masuk akal apabila D.N. Aidit yang ditangkap hidup-hidup kemudian dihabisi tanpa melalui persidangan. Ini memberikan kesempatan pada Sjam untuk menjadi “juru bicara”

keterlibatan Aidit dan PKI dalam Gerakan 30 September (Harsutejo, 2003: 174). Pada persidangannya di Mahmilub, Sjam memang terkesan “cerewet” untuk ukuran seorang intel. Ia dengan sombong mengakui telah menjadi otak Gerakan 30 September atas perintah Aidit (Harsutejo, 2003: 174). Bisa jadi, melalui Sjam inilah PKI (khususnya Aidit) termakan provokasi yang ditiupkan oleh pihak tertentu.

Benarkah Ada Penyiksaan Sadis?

Dugaan di seputar keterlibatan Soeharto biasanya disertai dengan keterlibatan CIA yang telah meminjam tangan-tangan lokal untuk melaksanakan misinya membasmi komunis serta mendongkel Soekarno dari kursi kekuasaan. Kedekatan Soeharto dengan CIA ini ditengarai dimulai saat dirinya bergabung di SSKAD dan bertemu dengan Suwanto yang memang dikenal telah lama menjadi agen CIA dan menjadi kawan dekat perpanjangan tangan CIA di Angkatan Darat, Guy Pauker (Eros Djarot, *dkk.*, 2006: 41). Hanya saja hingga saat ini tidak ada bukti-bukti yang nyata mengenai keterlibatan Soeharto secara langsung dengan Gerakan 30 September.

Kecurigaan kepada Soeharto juga didasari oleh perbedaan keterangan mengenai kondisi jenazah para Pahlawan Revolusi. Meski tidak menjelaskan secara spesifik, namun dalam pidato yang disampaikannya sesaat setelah pengangkatan ketujuh jenazah (dan juga diulangnya berkali-kali dalam otobiografinya), Soeharto berulang kali menekankan kebiadaban para pelaku penculikan.

Seminggu setelah dikontrolnya media massa oleh Pangkostrad, ramai diberitakan tentang penyiksaan yang dialami oleh para jenderal sebelum menemui ajal. Dikabarkan mereka diiris-iris, dipotong alat kelaminnya, serta dicongkel matanya sebelum ditembak dan dimasukkan di sumur tua Lubang Buaya.

Berita di media massa ini kemudian membakar amarah massa. Mantan anggota CIA yang bertugas di Jakarta saat itu, Ralph

McGhee menyebutkan bahwa berita ini sangat efektif membakar emosi massa. Ini menciptakan iklim kondusif bagi militer untuk melancarkan aksi pembantaian terhadap anggota PKI dan simpatisannya (Eros Djarot, dkk., 2006: 18).

Anehnya, setelah bertahun-tahun diam, keterangan dari salah seorang anggota tim forensik dari UI yang bertugas mengotopsi jenazah para jenderal justru berkebalikan. Adalah Liem Joe Thay (Prof. Dr. Arif Budianto) yang menyebutkan bahwa informasi yang diberikan oleh media massa saat itu tidak sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik. Berikut adalah kesaksiannya:

"Kami periksa penis korban dengan teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja tidak ada. Itu faktanya. Satu lagi: mata yang dicongkel. Memang kondisi mayat ada yang bola matanya copot, bahkan ada yang kotal-katil. Tapi itu karena sudah lebih dari tiga hari terendam, bukan karena dicongkel paksa..." (Surya Lesmana, dkk., (ed.), 2005: 56)

Mengenai kehadiran Soeharto, ia berkata, *"... Saya sedikit mengangkat kepala mayat yang sedang saya periksa dan baru sadar Pak Harto ada di ruangan. Dia mengenakan battle dress (pakaian tempur). Kabarnya RSPAD dari malam sampai pagi itu dijaga ketat pasukan Kostrad ..."* Lebih jauh Prof. Dr. Arif Budianto berkata, *"Kami tanyakan waktu itu, apakah mayat para jenderal akan diotopsi secara lengkap atau tidak. Para jenderal yang hadir, termasuk Pak Harto bilang tak usah"* (Surya Lesmana, dkk., (ed.), 2005: 56).

Kejanggalan Demi Kejanggalan

Namun dari semua keanehan, satu yang menurut Elson menjadi pertanyaan paling besar dari Gerakan 30 September ini adalah mengapa Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, dan sering menggantikan peran Yani (Menpangad) saat

berhalangan, lolos dari daftar penculikan? (Elson, 2001: 224). Apakah ini merupakan kesalahan amatir yang meremehkan kemampuan Pangkostrad yang pendiam itu? Atau adakah skenario lain yang melibatkan dirinya? Menurut keterangan Latief, Soeharto tidak ikut dibunuh karena dianggap loyal kepada Soekarno (Surya Lesmana, *dkk. (ed.)*, 2005: 89). Ini tentu bertentangan dengan keterangan Soeharto yang mengatakan Latief bermaksud membunuhnya.

Keterangan lain yang agak meragukan adalah keberadaan pasukan tak dikenal di Monas. Bagi Elson, adalah sebuah keanehan bila pasukan yang bermaksud melakukan kudeta tidak menyerbu markas Kostrad yang tak jauh dari Monas (Elson, 2001: 224). Mengenai hal ini, Kapten Soekarbi Wakil Komandan Batalion 530 Brawijaya memastikan, “Mengingat kedudukan kami dekat Markostrad, maka pasukan pun sering keluar-masuk Kostrad untuk ke kamar kecil. Karena tidak ada teguran dari Kostrad, berarti Kostrad tahu bahwa pasukan kami ada di sana” (Surya Lesmana, *dkk. (ed.)*, 2005: 103). Lagipula, menurut Soekarbi, perintah membawa pasukan ke Jakarta datang dari Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto melalui radiogram.

Meskipun banyak spekulasi yang beredar tentang siapa sebenarnya dalang di balik Gerakan 30 September, namun hingga kini misteri itu masih terselimuti oleh kabut yang tebal. Soeharto tidak sendiri dalam menanggung tuduhan. Beberapa spekulasi juga mengarah kepada PKI, CIA, dan bahkan pada Presiden Soekarno (Lihat: Crouch, 1986: 112-143). Meskipun demikian, Gerakan 30 September bagaimanapun telah menjadi bagian (paling) penting dari sejarah bangsa Indonesia dan juga peningkatan karier Soeharto ...

- 20 -

Epilog G 30 S

"Hidup Pak Harto!"
- **Demonstran Mahasiswa**
(Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

MASA setelah terjadinya Gerakan 30 September, yaitu pada bulan Oktober 1965 hingga bulan Maret 1966 adalah masa "perebutan pengaruh" antara Presiden Soekarno, seorang tokoh senior yang cahayanya mulai memudar, dengan *the rising star*, Soeharto. Masa inilah yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia memasuki sebuah lembar kehidupan baru yang bernama Orde Baru.

Banyak pihak yang menduga, bahwa peristiwa pada tanggal 1 Oktober 1965 adalah sebuah kudeta 'merangkak' yang kemudian berujung pada "Lahirnya Supersemar" pada tanggal 11 Maret 1966. Lagi-lagi tak ada bukti yang cukup kuat untuk mengiyakan tuduhan ini. Meski demikian, harus diakui pada bentang waktu tersebut, Soeharto telah memperlihatkan kemampuannya yang jenius dalam menilai situasi serta mengambil keputusan di saat yang tepat, dan entah dari mana tiba-tiba saja memperoleh kepandaian sebagai seorang politikus (yang mungkin sebelumnya telah bersembunyi di balik kelugunya) seiring dengan tumbuhnya ambisi-ambisi politik dalam dirinya.

Soeharto yang lugu mulai memperlihatkan "wajah sebenarnya" sebagai seorang yang kemudian dikenal sebagai ahli dalam mengubah keadaan yang kurang menguntungkan menjadi keun-

tungan. Oportunis, begitu sebagian kalangan menggambarkan dirinya pada masa-masa itu.

Balas Dendam yang Brutal

Situasi nasional yang berada dalam kondisi berduka, merupakan ladang yang subur bagi ajakan-ajakan persuasif untuk melakukan “aksi balas dendam” terhadap PKI. Dari dokumen-dokumen rahasia yang terungkap, terbukti pada waktu-waktu itu, pihak asing (terutama Amerika dan Inggris) berupaya memanfaatkan situasi dengan melancarkan propaganda anti-komunis (Harsutejo, 2003: 73). Sebuah upaya yang sangat efektif, dengan mempertimbangkan situasi mencekam yang sedang melanda rakyat Indonesia saat itu.

Pada tanggal 4 Oktober 1965, atau bersamaan dengan pengangkatan jenazah para Pahlawan Revolusi, terbentuklah Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh (KAP GESTAPU). Gerakan baru ini dibentuk di bawah pimpinan Subchan Z.E., yang mewakili dari kelompok Muslim, dan Harry Tjan Silalahi, yang mewakili Kelompok Katholik. Penggunaan istilah “Gestapu”, entah sengaja ataupun tidak sengaja, telah menggiring opini orang untuk menyamakan kekejaman Gerakan 30 September dengan Gestapo-nya Hitler. Melalui Adam Malik, pemerintah Amerika turut menyokong dana sebesar Rp 50 juta (Harsutejo, 2003: 70).

Maka meledaklah berbagai aksi anti-komunis di beberapa daerah. Teriakan “Bubarkan PKI!”, “Gantung Aidit!”, dan “Gantung PKI dan begundal-begundalnya!” bergema di penjuru kota. Para pemuda dan elemen masyarakat lainnya yang anti-PKI lalu mendirikan kesatuan-kesatuan aksi. Terbentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan lain-lainnya. Mulai muncul “hakim-hakim jalanan” yang melakukan pengrusakan terhadap segala sesuatu yang berbau PKI. Kantor PKI dan rumah-

rumah anggota PKI ramai-ramai dibakar. Anggota-anggota PKI dikejar dan dibunuh. Menanggapi hal ini, Soeharto hanya berkomentar, "Saya harus pegang kendali di tengah jalannya semua gerakan ini..." (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 139). Angkatan Darat telah mendapatkan mitranya untuk melakukan pengejaran terhadap anggota-anggota PKI. Dukungan juga terutama diperoleh dari kelompok-kelompok muslim dan kelompok agama lainnya yang jelas-jelas anti-komunis.

Sidang Kabinet Pertama Pasca-G 30 S

Apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya menunjukkan sebuah rivalitas yang terselubung antara Soekarno dengan Soeharto. Sikap Soekarno yang lunak terhadap PKI dan menganggap Gerakan 30 september sebagai "*een rimptje in de oceaan*" (sebuah riak kecil di samudra) menimbulkan rasa tidak suka di hati Soeharto. Namun saat itu, sadar akan pesona serta wibawa yang dimiliki oleh Soekarno sebagai tokoh nasional, membuat Soeharto tak dapat secara terang-terangan menentanginya. Hal ini membuat Soeharto terjebak dalam dua sikap yang berbeda; patuh pada Soekarno tetapi dalam waktu yang bersamaan dituntut untuk melanjutkan perburuannya dengan PKI menjadi "mangsa"-nya.

Pada tanggal 6 Oktober 1965, Presiden mengadakan pertemuan kabinet di Istana Bogor yang dihadiri para menteri, termasuk Menteri Negara yang menjadi anggota Politbiro CC PKI Nyoto dan Menteri Wakil Ketua DPR M.H. Lukman. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Soeharto yang diminta melaporkan perkembangan keadaan setelah Gerakan 30 September. Secara dramatis, Soeharto menggambarkan pertemuan tersebut sebagai berikut:

"Suasana jauh dari murung atau sedih di tengah sidang itu. Padahal baru kemarin para Pahlawan Revolusi dimakamkan. Saya tidak enak di tengah suasana yang banyak gelak dan tawa. Saya kesal melihat orang-orang PKI hadir dalam kesempatan ini, sementara saya sudah yakin, bahwa

mereka pasti punya hubungan dengan penculikan dan pembunuhan teman-teman saya itu.” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 138)

Terhadap tuduhan kepada PKI, Nyoto menyangkal bahkan berbalik menuduh Dewan Jenderal yang membuat kekacauan. Menurut kisah Soeharto, Presiden Soekarno lalu marah sambil menudingkan telunjuknya ke Nyoto, sambil berkata, “Nyoto, kau tolol mengobarkan peristiwa yang terkutuk itu. Peristiwa ini menghancurkan nama komunis. Itu satu tindakan kekanak-kanakan” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 138).

Malamnya, Ade Irma Suryani, putri dari Nasution meninggal dunia setelah enam hari dirawat di RSAD. Kemarahan massa makin menjadi. Pembunuhan terhadap orang-orang PKI terus berlanjut.

Pembantaian Terus Berlanjut

Pembunuhan yang terjadi menimbulkan rasa prihatin pada diri Soekarno. Setelah berbicara dengan Oei Tjoe Tat, Menteri Negara yang menjadi anggota komisi pencari fakta tentang pembunuhan massal di Jawa dan Bali, Presiden Soekarno dalam pidatonya mengutuk pembunuhan besar-besaran yang telah menelan korban sebesar 500 hingga 600 ribu jiwa. Jumlah ini lebih besar dari jumlah korban Perang Vietnam yang telah berlangsung selama beberapa tahun (Harsutejo, 2003: 74).

Meskipun tahu Soeharto tidak mengindahkan dukungannya terhadap PKI, Soekarno yang terdesak oleh keadaan, mengingat betapa besarnya dukungan dari pihak militer maupun dari kelompok aksi yang diberikan kepada Soeharto, mengangkat Soeharto sebagai Menpangad pada tanggal 14 Oktober. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober diiringi dengan kenaikan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Tanggal 17 Oktober, Soeharto mengeluarkan perintah harian, “Terus basmi sisa golongan petualang kontra-revolusi G 30 S/PKI” (Elson, 2001: 236).

Pada akhir tahun 1965, Soeharto tetap pada pendiriannya melakukan aksi pembersihan terhadap PKI dengan selalu menyebut-nyebut bahwa tindakannya itu demi menjaga keselamatan dan kewibawaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Sedang Soekarno terus berupaya untuk mengendalikan aksi-aksi yang semakin tidak terkontrol ini, namun suaranya tenggelam di antara teriakan kebencian massa terhadap komunis.

Para tokoh-tokoh utama Gerakan 30 September dapat segera ditangkap. Letkol Untung di tangkap pada tanggal 11 Oktober setelah sebelumnya dihakimi massa karena diteriaki sebagai pencopet. RPKAD dikirim untuk membantu pelaksanaan pembersihan sisa anggota komplotan di daerah Gunung Merapi-Merbabu.

Aidit Tertangkap dan Ditembak Mati

Bulan November, Soeharto mulai menyadari ketidakberdayaan Soekarno. Ia lalu mengusulkan pemberhentian pejabat-pejabat sipil seperti Subandrio, Achmadi, dan Omar Dhani (Crouch, 1986: 181). Di bulan yang sama, tanggal 22, Aidit tertangkap dan dengan alasan ingin melarikan diri, tewas ditembak. Sebelumnya, Nyoto ditangkap dan ditembak seusai menghadiri sidang kabinet tanggal 6 November. Soeharto juga meminta wewenang dari presiden untuk membentuk Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) untuk memeriksa dan mengadili para tahanan. Tanggal 4 Desember, Soekarno memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengangkat hakim-hakim pengadilan tersebut dan menentukan siapa saja yang akan diajukan ke pengadilan.

Jelas secara *de facto*, Soeharto telah berkuasa di hari-hari terakhir tahun 1965. Secara vulgar ia melakukan aksi yang ditentang oleh Soekarno. Namun sebagai seorang bawahan, ia tahu bahwa dirinya harus memperlakukan Soekarno secara hati-hati. Bagaimanapun, loyalitas tanpa *reserve* dari para pendukung Soekarno, tak dapat dipandang remeh.

Mahasiswa Bergerak

Seakan turut mendukung langkah Soeharto, inflasi makin memburuk pada bulan Desember. Menteri Koordinator Pembangunan Chaerul Saleh mengumumkan kenaikan harga minyak bumi dari empat rupiah per liter menjadi 250 rupiah. Akibatnya, harga-harga melambung tinggi. Bulan Januari 1966, Menteri Negara Urusan Minyak dan Gas Bumi Brigjen Ibnu Sutowo, mengumumkan kenaikan harga minyak tanah dan bensin. Harga karcis bis melonjak, dari Rp 200,- menjadi Rp 1000,-. Kenaikan harga ini dengan segera memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Masyarakat pun mulai menyuarakan keputusasaannya.

Para mahasiswa, yang mengklaim diri sebagai “wakil suara rakyat” makin rajin turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan-nya. Pada tanggal 10 Januari 1966, mereka mengumandangkan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu bubarkan PKI, *retool* (bubarkan) Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Aksi demonstrasi ini segera mendapat simpati dari beberapa tokoh Angkatan Darat, seperti Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris dan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie.

Pada tanggal 15 Januari, para mahasiswa kembali berkumpul di depan Istana Bogor. Tuntutan untuk membubarkan PKI masih terus dikumandangkan. Untuk menenangkan demonstran, Soeharto berdiri di atas pagar. “PKI sudah bubar. Pulanglah dengan tenang,” janji Soeharto. Tapi aksi terus berlanjut.

Aksi demonstrasi diwarnai teriakan “Hidup Pak Harto!” dan juga ejekan-ejekan pada anggota kabinet seperti Chaerul Saleh dan juga Soebandrio yang diberi julukan “Anjing Peking”. Teriakan-teriakan makin menjurus ke arah yang kasar. Ada juga tuntutan untuk “Stop impor istri!”. Bagi Soekarno, perlakuan mahasiswa ini menunjukkan rasa kurang menghargai terhadap para petinggi pemerintahan. Pada pidatonya di bulan Januari, Soekarno dengan marah menuduh aksi mahasiswa telah didukung oleh nekolim. Ter-

jadi kerusuhan antara para mahasiswa dengan barisan yang pro-Soekarno.

Soekarno Melawan

Merasa perlu memperlihatkan dukungan rakyat yang masih berada di belakangnya, Soekarno lalu menyerukan terbentuknya Barisan Soekarno. Perlawanan ini mengejutkan Angkatan Darat yang tadinya berharap kekuatan mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden (Crouch, 1986: 188). Melihat kondisi yang kurang menguntungkan dan mengikuti angkatan-angkatan lain yang telah menyatakan kesetiaannya pada Bung Karno, Soeharto atas nama Angkatan Darat juga menyatakan diri berada di belakang Soekarno. Pernyataan ini membuat Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasution, salah satu tokoh yang dengan berani berdiri berseberangan dengan Soekarno, mengumpulkan para panglima dalam lingkungan angkatan bersenjata untuk menetralsir pernyataan-pernyataan kesetiaan yang baru saja terucap. Mereka lalu menandatangani suatu pernyataan kesetiaan yang bersifat lebih hati-hati. Sebuah pernyataan kesetiaan yang bersyarat, sebuah janji untuk setia “menghadapi tantangan terhadap revolusi sesuai dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit” (Crouch, 1986: 188).

Pada tanggal 21 Februari, Presiden bermaksud mengubah kabinet menjadi Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Namun ternyata perubahan ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para mahasiswa. Nama Nasution, yang banyak memperoleh simpati, tidak tertera dalam susunan kabinet baru. Soeharto sendiri tetap masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menpangad/Panglima AD. Mengenai masalah ini, Crouch menduga adanya sebuah upaya untuk memisahkan Nasution dengan Soeharto. Tampaknya Soekarno berharap, Soeharto lebih dapat bekerjasama dengannya setelah jauh dari Nasution (Crouch, 1986: 196). Jumlah kabinet yang bertambah “gemuk” mengundang sindiran dari mahasiswa

yang menyebutnya sebagai “Kabinet 100 Menteri”. Adapula yang menyebutnya “Kabinet Gestapu”.

Marah karena merasa tuntutananya tidak didengarkan, para mahasiswa bermaksud memboikot upacara pelantikan kabinet baru. Jalan menuju Istana ditutup oleh para mahasiswa. Para menteri dipaksa memutar otak untuk mencari jalan yang aman menuju Istana. Aksi semakin meningkat ketika para mahasiswa, yang sebagian besar didominasi oleh jaket kuning UI, bersikeras ingin masuk ke Istana. Bentrokan dengan pasukan penjaga Istana Cakra-birawa tak terelakkan. Peluru pun ditembakkan. Seorang mahasiswa, Arif Rachman Hakim, terkapar bersimbah darah. Rasa duka bercampur amarah menyelimuti perasaan para mahasiswa. Soeharto menunjukkan rasa simpatinya dengan mengirimkan karangan bunga pada pemakaman Arief Rachman Hakim.

“Saya kemudian berpesan kepada Kemal Idris, supaya melindungi anak-anak muda yang berdemonstrasi dari serangan Cakra-birawa. Saya menaruh harapan pada anak-anak muda yang mengadakan demonstrasi itu,” tulis Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 164). Saat itu, (seolah-olah) telah lahir pahlawan baru yang membela kepentingan mahasiswa.

-21- Supersemar

“Harto, jane aku iki arep kok apakake?”
(*Harto, sebenarnya aku ini akan kamu apakan?*)
- **Presiden Soekarno** (Dwipayana dan Ramadhan, 1989) -

LUMPUHNYA PKI telah membuat hilangnya sebagian penopang kekuasaan Soekarno. Hal ini membuatnya berpikir untuk mendedatkan diri pada Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto. Angin memang tengah berhembus ke arah Angkatan Darat. Meski demikian, awal tahun 1966 dimanfaatkan Soekarno untuk “menyelamatkan” PKI dari reaksi keras Angkatan Darat. Dalam beberapa kesempatan, Soekarno mengingatkan bahwa PKI telah turut serta membangun kemerdekaan RI. Bahkan perjuangan PKI dinilai jauh lebih besar dibanding perjuangan-perjuangan pihak manapun.

Secara tidak sengaja, Soekarno telah mendiskreditkan AD dengan pernyataan-pernyataannya ini. Namun, bukannya memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan Soekarno, Soeharto tetap memilih untuk bersikap pasif, menanti tindakan apa yang selanjutnya akan diambil oleh sang Pemimpin Besar Revolusi (Elson, 2001: 249).

Reaksi Soekarno

Kepasifan ini mungkin saja disebabkan oleh prinsip Jawa yang dianut oleh Soeharto. “*Sabda pandhito ratu*” atau raja itu tak boleh dilawan, tetap dipegang teguh oleh Soeharto (Elson, 2001:

248). Meski demikian, kekecewaan Soeharto pada Soekarno yang tetap tidak mau membubarkan PKI, tak lagi dapat ditutupi. Hal ini tergambar pada pertemuan keduanya di Istana Merdeka Jakarta pada pertengahan Februari.

"Harto, jane aku iki arep kok apakake?" (Harto, sebenarnya aku ini akan kamu apakan?) Aku ini pemimpinmu," tanya Soekarno.

"Saya ingin mikul dhuwur terhadap Bapak. Sayang, yang mau di-pikul dhuwur mendhem jero tidak mau," tukas Soeharto.

Istilah *pikul dhuwur mendhem jero* adalah istilah Jawa yang berarti memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya, atau dengan kata lain berarti menghormat kepada orang tua. Dengan mengatakan hal ini, secara halus Soeharto ingin menunjukkan kepada Soekarno bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini agar Soekarno memutuskan hubungannya dengan PKI dan mengembalikan arah pemerintahan secara benar. Namun tampaknya hal ini tidak menggoyahkan Soekarno. Menurut Elson, pembelaan Soekarno terhadap PKI lebih disebabkan karena ia sebagai Pemimpin Besar di Asia Tenggara harus mempertahankan keyakinannya terhadap konsep Nasakom yang terlanjur diperkenalkannya di dunia internasional. Membubarkan PKI berarti kehilangan wibawa sebagai seorang pemimpin (Elson, 2001: 252).

Sidang Kabinet di Bawah Ancaman

Pada tanggal 11 Maret 1966, di Istana Merdeka Jakarta diselenggarakan sidang kabinet setelah mendapat jaminan keamanan dari Pangdam Jaya Amirmachmud. Di saat yang sama, gelombang demonstrasi juga bergerak ke Istana dengan satu tujuan, membubarkan sidang kabinet. Semua menteri hadir kecuali Menpangad Soeharto.

Ketidakhadiran Soeharto pada persidangan ini mengundang pertanyaan mengingat rangkaian peristiwa yang terjadi berikutnya memiliki kontribusi yang penting dalam pengalihan ke-

kuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Apakah kesabaran Soeharto untuk berkompromi telah menipis?

Mengenai ketidakhadirannya dalam sidang, Soeharto ber-alasan, "Saya ingat minggu-minggu itu penuh dengan pertemuan dan pembicaraan hangat. Udara politik masih tetap panas dan meresahkan," kenang Soeharto, "Tanggal 10 Maret, pukul 2 dini-hari, pimpinan mahasiswa saya undang ke Kostrad. Saya bicara dengan mereka. Pada kesempatan itu, hadir dan bicara pula Sub-chan Z.E. Kerja berat terus-menerus sampai larut malam seperti itu menyebabkan saya sakit tenggorokan sehingga saya tidak bisa hadir pada sidang kabinet di Istana tanggal 11 Maret pagi ..." (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 169).

Sehari sebelum sidang, telah terdengar desas-desus akan ada pengepungan Istana oleh RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat). Isu ini mungkin saja muncul akibat lanjutan dari permintaan Soeharto agar Presiden Soekarno mengizinkan dirinya menangkap para menteri yang terlibat G 30 S/PKI. Sudah menjadi rahasia umum, Letjen Soeharto dan Angkatan Darat telah sejak lama menjadikan Soebandrio sebagai target utama. Soebandrio dianggap bersalah karena menjadi orang yang paling gencar meniupkan isu Dewan Jenderal. Namun niat Soeharto tidak memperoleh restu dari Soekarno. Hal ini memunculkan rumor bahwa Angkatan Darat akan secara paksa menangkap menteri-menteri yang dianggap PKI.

Di tengah suasana yang penuh kecurigaan, sidang berjalan dengan penuh ketegangan. Untuk mencairkan kecemasan para anggota sidang, Presiden Soekarno mengajak Pangdam Jaya Amirmachmud untuk turut serta mengikuti pertemuan para menteri itu.

Nota Sabur

Baru sekitar sepuluh menit rapat berjalan, Amirmachmud menerima nota dari Komandan Resimen Cakrabirawa Sabur yang intinya meminta ia keluar sebentar karena di luar ada pasukan liar.

Amirmachmud menanggapi dengan menggoyang-goyangkan tangan kepada Sabur sebagai isyarat tidak akan terjadi apa-apa. Namun Sabur yang terlihat panik akan keselamatan Presiden lima menit kemudian mengirimkan nota yang sama kepada Amirmachmud. Kali ini ia juga mengirimkan nota kepada Presiden.

Setelah membaca nota dari Sabur, dan mungkin juga membaca ekspresi panik di wajah pengawalnya itu, Soekarno memutuskan menskors sidang dan menyerahkan pimpinan sidang pada Waperdam II Leimena. Ia lalu berjalan ke luar ruangan diikuti oleh Soebandrio dan Chairul Saleh. Menurut kabarnya, karena terlalu tergesa-gesa, Soebandrio bahkan belum sempat mengenakan alas kakinya hingga ia terpaksa berjalan dengan telanjang kaki menuju helikopter. Mereka kemudian pergi ke istana Bogor. Itulah terakhir kali Soekarno memimpin sidang kabinet.

Kombinasi kehadiran “pasukan liar” yang berpakaian preman dan kepanikan Sabur telah memaksa Soekarno berjalan menuju sebuah kondisi yang pada akhirnya melahirkan Supersemar. “Pasukan” inilah yang telah sukses memprovokasi Presiden agar segera memberikan pelimpahan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan negara. Mengenai keberadaan pasukan misterius yang berada di luar Istana, tidak ada keterangan yang pasti. Berdasarkan informasi dari Kepala Staf Kostrad Kemal Idris, pasukan itu adalah pasukan yang diterjunkan atas perintahnya. “Saya disuruh Pak Harto. Lalu saya memerintahkan Sarwo Edhie untuk menggerakkan pasukannya ke Istana untuk menangkap Bandrio (Soebandrio -ed.),” aku Kemal Idris (Pambudi, 2006: 24). Pasukan ini memang sengaja tidak menggunakan tanda kesatuan agar Soebandrio tidak takut keluar Istana.

Hal ini diperkuat oleh kesaksian Soemitro. Menurutnya, beberapa hari sebelum pelaksanaan sidang, dilangsungkan rapat Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) di mana dalam rapat tersebut diputuskan untuk memisahkan Presiden Soekarno dari “*durno-durno*”-nya. Pelaksanaannya ditetapkan pada tanggal 11 Maret,

saat dilangsungkan sidang kabinet. Penangkapan para *durno*, termasuk di antaranya Soebandrio, akan dilaksanakan oleh RPKAD (Pambudi, 2006: 26).

Bagaimana kesaksian Brigjen Sabur terhadap munculnya pasukan “liar” ini? Dalam sebuah kesempatan, ia berkomentar, “Itu hanya *apus-apusan* (akal-akalan)!” (Pambudi, 2006: 263).

Tiga Jenderal Pergi ke Bogor

Kabar mengenai sidang diterima Soeharto dari Menteri Veteran Mayjen Basuki Rahmat, Menteri Perindustrian Ringan Brigjen M. Yusuf, dan Pangdam V Jaya Brigjen Amirmachmud. Ketiga jenderal itu datang ke rumah Soeharto untuk mengabarkan situasi. Dalam otobiografinya, Soeharto bercerita bahwa ketiga jenderal itu kemudian atas inisiatif sendiri menyusul Bung Karno ke Istana Bogor dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Soeharto. Maksudnya adalah agar Bung Karno tidak merasa dikucilkan oleh AD. Mereka akhirnya berangkat ke Bogor setelah sebelumnya dititipi pesan, “Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan saya dalam keadaan sakit. Kalau saya diberi kepercayaan, keadaan sekarang ini akan saya atasi” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 170).

Malamnya, ketiga jenderal telah tiba kembali di rumah Soeharto Jalan Haji Agus Salim, Jakarta. Kedatangan mereka membawa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) untuk diserahkan kepada Soeharto. Isinya antara lain: Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk atas nama Presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, agar terjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Setelah membacanya, Soeharto segera mengambil keputusan: Bubarkan PKI, segera adakan rapat staf dan undang semua panglima angkatan di Kostrad; Jenderal Basuki Rahmat (diperintahkan untuk) bersiap-siap memberi penjelasan mengenai surat perintah itu. Segera kemudian dilaksanakan rapat di Kostrad untuk mengkoordinasikan langkah-langkah selanjutnya.

Kesaksian yang Berbeda-beda

Penjelasan Soeharto mengenai proses kelahiran Supersemar itu sendiri terasa janggal menyusul perbedaan kisah yang ditemui dari keterangan M. Yusuf maupun Amirmachmud. Menurut Soeharto, ketiga jenderal itu berangkat ke Bogor atas inisiatif mereka sendiri, sedangkan menurut M. Yusuf mereka pergi ke Bogor karena ditugaskan oleh Soeharto untuk menemui Presiden (Pambudi, 2006: 141).

Kejanggalan berikutnya, pada pesan yang disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno, menurut M. Yusuf ia dan kedua rekannya telah diberikan semacam “petunjuk-petunjuk lisan” yang harus disampaikan kepada Soekarno, yang kurang lebih berisi tentang kesediaan Soeharto untuk menerima kewenangan dalam melaksanakan stabilitas keamanan dan politik berdasarkan Tritura, demi kelanjutan cita-cita perjuangan bangsa dan negara RI (Pambudi: 2006: 141). Jadi, pesan yang disampaikan bukan sekedar “salam” dan “permohonan kepercayaan” seperti yang dikisahkan Soeharto, namun lebih kepada “permintaan kewenangan”.

Hal yang juga janggal, dari keterangan M. Yusuf dan Amirmachmud, mereka menyerahkan surat perintah itu di markas Kostrad tempat di mana Soeharto waktu itu sedang melaksanakan rapat bersama staf Kostrad dan para panglima angkatan. Sebelumnya mereka memang telah pergi ke rumah Soeharto namun diberi kabar Soeharto sedang berada di Kostrad sehingga mereka kemudian menyusul ke sana. Ini sedikit berbeda dengan pengakuan Soeharto. Ia mengaku menerima Supersemar di rumahnya

di Jalan Agus Salim untuk kemudian memerintahkan kepada para jenderal menyelenggarakan rapat Kostrad dan meminta Mayjen. Basuki Rahmat untuk menjelaskan kepada para peserta rapat tentang proses dibuatnya Supersemar.

Perbedaan versi mengenai proses kelahiran Supersemar ini menimbulkan keragu-raguan, apa yang menyebabkan munculnya perbedaan di antara keterangan para pelaku yang terlibat langsung? Mengapa Soeharto telah menyelenggarakan rapat di Kostrad sebelum ketiga jenderal datang menemuinya? Apakah ini mengindikasikan bahwa Soeharto telah terlebih dahulu mengetahui kabar mengenai Supersemar itu sebelum surat itu sampai di tangannya?

Selain itu, muncul pula perbedaan “kecil” di antara kisah M. Yusuf dengan Amirmachmud. Menurut ingatan M. Yusuf, mereka bertiga pergi ke Bogor dengan mengendarai mobil jip sedang menurut Amirmachmud mereka menuju Bogor dengan helikopter. Keterangan siapa yang benar? Apakah ini ada keterkaitannya dengan tiga versi Supersemar yang kemudian muncul di masa Orde Baru? (Untuk membahas hal ini lihat tulisan Pambudi, 2006).

Detik-detik Penyusunan Supersemar

Supersemar menjadi kontroversi karena di kemudian hari ditafsirkan secara sengaja oleh Soeharto sebagai pelimpahan kekuasaan. Dengan berbekal Supersemar itu, Soeharto kemudian secara formal membubarkan PKI, sebuah wewenang yang seharusnya hanya dimiliki oleh Presiden.

Proses penyusunan Supersemar itu sendiri sebenarnya, dipercaya oleh berbagai pihak, sebagai sebuah strategi yang telah dirancang sebelumnya di Jakarta. Ketiga jenderal yang menyusul Presiden Soekarno tampaknya telah dibebani tugas untuk “memaksa” Presiden untuk menyerahkan secara resmi dan tertulis, sebuah perintah untuk Menpangad Letjen Soeharto.

Dikisahkan, setelah memperoleh izin dari Soeharto, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amirmachmud berangkat menuju Istana Bogor. Setibanya di Istana, setelah menanti beberapa saat, mereka diterima oleh Bung Karno yang baru saja bangun dari tidur siang. Bung Karno langsung menanyakan keperluan ketiga jenderal tersebut menghadap presiden. Oleh Basuki Rahmat, yang paling senior di antara mereka, dijelaskan maksud kedatangannya ke Istana Bogor sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Soeharto. Setelah itu terjadi diskusi panjang dalam suasana yang tegang. "... terasa benar bagi kami bertiga, bagaimana beratnya rasa tanggung jawab yang dibebankan dengan penuh kepercayaan oleh Pak Harto," ujar M. Yusuf mengenang saat itu (Pambudi, 2006: 146).

Beberapa argumen Presiden dapat dipatahkan oleh ketiga jenderal. Ketiganya meyakinkan Soekarno bahwa Letjen Soeharto dapat diberi kepercayaan untuk mengatasi keadaan serta berbagai kekacauan di dalam negeri. "Caranya! Caranya yang saya tanyakan," kata Bung Karno dengan nada marah seperti yang diceritakan oleh Amirmachmud (Pambudi, 2006: 178).

Akhirnya dirancang konsep surat yang melibatkan Presiden Soekarno, Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amirmachmud. Setelah konsep surat selesai, Presiden masih merasa perlu untuk mengkonsultasikannya pada Soebandrio dan Chairul Saleh yang menyusul datang ke ruangan itu. Juga tampak hadir Dr. Leimena. Konsep surat itu kemudian diserahkan pada Soebandrio dan Chairul Saleh untuk dikoreksi. Ada beberapa coretan dan penambahan kata-kata pada konsep surat. "Akibatnya, kami bertiga, dengan Jenderal Basuki Rahmat dan Amirmachmud, tidak puas dengan perubahan-perubahan yang dikehendaknya itu ...," tutur M. Yusuf.

Setelah melanjutkan pembahasan dan diselingi oleh salat Maghrib, akhirnya disepakati konsep surat perintah yang rencananya akan diberikan kepada Letjen Soeharto. Konsep itu kemudian

diberikan kepada Sabur untuk diketik. Pada saat naskah selesai diketik, semua yang hadir dalam pertemuan itu sedang berkumpul di paviliun Istana Bogor, tempat tinggal Ny. Hartini. Presiden yang menerima ketikan naskah dari Sabur, nampak masih ragu untuk membubuhkan tandatangan. Amirmachmud lantas bersuara, "Teken saja, Pak. *Bismillahirrahmanirrahim*."

Sambil mengucap "*bismillah*" Presiden Soekarno menandatangani naskah Surat Perintah 11 Maret yang kini dikenal dengan nama Supersemar. Surat inilah kemudian yang menandai awal kekuasaan Soeharto. Sungguh sayang, dokumen yang memiliki nilai tinggi bagi sejarah bangsa itu kini raib entah ke mana. Tidak jelas siapa yang menyimpannya. Hal ini kemudian menimbulkan dugaan ada sesuatu yang disembunyikan dari hilangnya naskah asli Supersemar ini.

Dalam perjalanan pulang menuju Jakarta, Brigjen Amirmachmud bersama kedua rekannya baru tersadar, "... bahwa itu penyerahan kekuasaan." Pada akhirnya, jalan menuju ke atas terbuka lebar bagi Soeharto.

Menjadi Presiden RI Kedua

*“Seorang jenderal dapat membunuh seribu serdadu musuh,
namun seribu jenderal tidak dapat mencabut keyakinan seseorang”*

- **Soekarno** mengutip ajaran Konfusius -

SETELAH keluarnya Supersemar, reaksi cepat Soeharto dalam mengebiri kekuatan Soekarno sangat penting artinya dalam terbentuknya sebuah pemerintahan baru. Hal ini juga berarti munculnya pemimpin pemerintahan baru, yang tak lain adalah sang pengemban Supersemar itu sendiri.

Meskipun dalam otobiografinya berkali-kali ditekankan oleh Soeharto bahwa dirinya tak pernah terpikir untuk merebut kekuasaan dan memuaskan ambisinya menjadi presiden, namun ia tak pernah memungkiri bahwa lahirnya Supersemar merupakan “tonggak sejarah” serta sebuah “awal dari perjuangan Orde Baru” (Elson, 2001: 266). Pernyataan ini kemudian menjadi sangat kontradiktif dengan langkah-langkah politik yang ia ambil sesaat setelah menerima Supersemar, yang jelas-jelas menunjukkan ambisinya menuju puncak kekuasaan.

Supersemar

Banyak kalangan yang menilai bahwa Soeharto telah melakukan pengalihan kekuasaan secara perlahan-lahan, tidak dengan

menggunakan senjata melainkan dengan memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret yang telah diperolehnya. Soeharto dianggap telah mengintepretasikan Supersemar lebih dari kewenangan yang seharusnya diberikan kepadanya.

Isi dari Supersemar itu sendiri terdiri dari tiga poin. Poin *pertama*, Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno, memutuskan, memerintahkan kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, agar atas nama atas Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, agar terjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Poin *kedua*, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan poin *ketiga*, melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas (poin 1 dan 2).

Begitu selesai menerima Supersemar, berdasarkan poin pertama Supersemar yang berbunyi "... mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, agar terjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi ...," Soeharto lalu memerintahkan pembubaran PKI. Bagi Soeharto, PKI adalah sumber gerakan G 30 S yang harus ditumpas.

Selama ini, upayanya untuk membubarkan PKI selalu terhalang oleh Presiden Soekarno, namun dengan adanya Supersemar, Soeharto merasa bisa lebih leluasa mengambil segala tindakan yang ia inginkan. Maka pada tanggal 12 Maret 1966, lahirlah Keputusan Presiden No. 1/3/1966 yang ditandatangani oleh Soeharto. Isinya antara lain memuat tentang perintah membubarkan

PKI dengan menggunakan Supersemar sebagai landasan yuridisnya.

Reaksi Soekarno

Reaksi terkejut ditunjukkan oleh Presiden saat mengetahui Soeharto telah mengambil langkah, menggunakan Supersemar untuk membubarkan PKI. “Yang berhak membubarkan partai politik adalah Presiden,” teriak Soekarno. Sebagai wujud protesnya, Presiden Soekarno lalu menyusun surat kedua yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 1966. Dalam surat itu, Presiden memperingatkan Menpangad agar tidak menyalahgunakan Supersemar yang sifatnya teknis/administratif, bukan politik. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Jenderal Soeharto tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang dan tanggung jawabnya, sebab bidang politik adalah wewenang langsung presiden.

Surat ini lalu diantarkan kepada Soeharto melalui Waperdam II J. Leimena namun tak ada reaksi apa-apa dari Soeharto. Keesokan harinya, tanggal 14 Maret 1966, Menpangau Sri Mulyono Herlambang datang menemui Soeharto untuk meminta penjelasan mengapa Soeharto telah mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Angkatan Udara, sesuai dengan poin kedua Supersemar. Oleh Soeharto, dijawab “Itu atas tanggung jawab saya” (Pambudi, 2006: 56).

Merasa suaranya tidak didengarkan oleh Soeharto, pada tanggal 16 Maret Presiden lalu membuat pengumuman yang menegaskan bahwa dirinya masih berkuasa penuh dan hanya dia yang berkuasa mengangkat menteri. Seolah-olah menantang Presiden, dua hari kemudian Soeharto menangkap 15 menteri Kabinet Dwikora yang dituduh terlibat dalam gerakan G 30 S. Ada dalam nama menteri-menteri yang ditangkap ini, Waperdam I/Menteri Kompartemen Luar Negeri Soebandrio dan Waperdam III/Ketua MPRS Chairul Saleh. Akibatnya, Presiden merasa perlu untuk mere-

visi bentuk kabinet, menjadi Kabinet Dwikora yang Disempurnakan pada tanggal 27 Maret 1966. Soeharto, bersama dengan Adam Malik dan Sultan Hamengku Buwono IX, lalu diangkat sebagai anggota presidium kabinet ini.

“Pembersihan” juga dilakukan di tubuh AU. Sri Mulyono Herlambang kemudian digantikan oleh Rusmin Nurjadin. Bersama Omar Dhani, Sri Mulyono Herlambang kemudian termasuk dalam perwira yang ditahan. Hal yang sama juga dilakukan di tubuh AL dan Kepolisian. Sedangkan Resimen Cakrabirawa harus menerima nasibnya dibekukan (Crouch, 1986: 223). Tapi aksi Soeharto tidak berhenti sampai di situ.

“Mata Pedang Akan Tumpul Kalau Terlalu Sering Digunakan”

Untuk menjaga agar jangan sampai Supersemar ditarik kembali oleh Presiden, Soeharto berencana untuk mengubah Supersemar menjadi Tap MPRS. Setelah sebelumnya melakukan beberapa perubahan, dengan menyingkirkan orang-orang Soekarno dalam MPRS dan menggantinya dengan orang yang dikenal bermusuhan dengan Soekarno; seperti A.H. Nasution (diangkat menjadi Ketua MPRS) dan Osa Maliki (Wakil Ketua MPRS), maka pada tanggal 20 Juni hingga 6 Juli digelar Sidang Umum MPRS IV di Istora Senayan.

Hampir bersamaan dengan pelaksanaan SU MPRS, Soeharto kerap muncul berpidato di radio dan televisi. Dalam satu pidatonya, Soeharto selaku pengemban Supersemar berupaya meyakinkan rakyat Indonesia, “Saya tidak akan sering menggunakan Surat Perintah 11 Maret tersebut, lebih-lebih kalau surat perintah itu belum diperlukan. Mata pedang akan tumpul bila selalu digunakan.”

Sementara itu, dengan setengah hati dan setitik harapan akan adanya dukungan dari orang-orangnya yang duduk dalam lembaga MPRS, Soekarno dengan gayanya yang flamboyan ber-

upaya menarik simpati MPRS dengan pidatonya *Nawaksara*. Jelas sudah, terjadi dualisme kepemimpinan di pemerintahan.

Dengan segala manuver yang telah dilakukannya, Soeharto telah memenangkan “pertarungan” terselubungnya dengan Soekarno. Gelombang demonstran terus menyuarakan keinginannya untuk menurunkan Soekarno. Namun tampaknya Soeharto tak mau buru-buru dalam mengambil tindakan.

Pada laporannya di SU MPRS IV, Soeharto menuding Presiden Soekarno telah bertindak untuk keuntungan yang tak langsung bagi G 30 S/PKI dan telah melindungi pemimpin-pemimpin G 30 S/PKI (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 176). Namun ditekankan oleh Soeharto bahwa, “Tujuannya yang utama (dari Presiden) bukanlah untuk membantu G 30 S/PKI, tetapi untuk menyelamatkan politiknya” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 177).

Menurut pengakuannya, melalui sidang itu, Soeharto memperingatkan MPRS agar jangan mengambil tindakan yang terlalu drastis kepada Presiden. “Jangan biarkan generasi ini disalahkan oleh generasi yang akan datang karena tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai terhadap seorang pemimpin rakyat yang patriotik” demikian ia beralasan (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 177).

Membuat Soekarno Tersudut

Sidang Umum MPRS IV ini telah menjadi simbol kemenangan politik Soeharto atas Soekarno. MPRS memutuskan menolak pidato *Nawaksara* Presiden dan memberinya kesempatan untuk melengkapi, terutama berkaitan dengan penjelasan atas terjadinya G 30 S serta kemerosotan ekonomi. Gelar “Pemimpin Besar Revolusi” direnggut dari Soekarno. Begitupula dengan jabatan “Presiden Seumur Hidup” yang dianggap tidak memiliki landasan konstitusi. Dalam sidang ini pula, Supersemar ditetapkan menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966. Artinya, Soekarno sebagai penguasa

eksekutif tidak dapat mencabut kembali kewenangan yang telah diberikan kepada Soeharto.

Meskipun demikian, sikap “lembut” Soeharto pada Presiden Soekarno dapat dipahami mengingat saat itu dualisme kepemimpinan telah menyebabkan negara terpecah menjadi dua, yaitu golongan yang pro-Soekarno dan golongan yang menuntut agar Soekarno diadili. Menentang atau bersikap keras pada Presiden, berarti akan memperuncing perpecahan, termasuk juga perpecahan dalam tubuh angkatan bersenjata.

“Sudah ada yang berbisik-bisik pada saya untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan,” terang Soeharto, “tetapi tak pernah terlintas satu kali pun di benak saya untuk melakukannya.”

Penolakan Soeharto untuk bertindak keras terhadap Soekarno yang melemah ini mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. Apa sebenarnya yang ada di benak Soeharto? Mengapa ia tidak juga dengan segera mengambil tindakan untuk menjatuhkan Soekarno dari kursi kepresidenan? Apakah ia sedang merencanakan sesuatu?

Menurut Crouch, selain khawatir dengan jumlah pendukung Soekarno yang masih tersisa, sikap ini juga kemungkinan disebabkan oleh prinsip kehidupan Jawa yang dipegang teguh oleh Soeharto. Sebagai seorang bawahan, Soeharto merasa berkewajiban untuk mengurangi kekuasaannya (Soekarno) tanpa melalui konfrontasi terbuka yang dapat menimbulkan rasa malu (Crouch, 1986: 223). Crouch membandingkan hal ini dengan kisah penggalan dari Mahabharata di mana Gatotkaca harus menegur pamannya, Raja Baladewa yang hendak dihadapinya. Dengan penuh rasa hormat, Gatotkaca menunduk menyembah kepada pamannya hingga akhirnya sang paman mulai menarik pedang, memulai pertarungan.

Menurut Elson, Soeharto Berbohong

Berbeda dengan Crouch, menurut Elson sikap ini adalah wujud dari sikap kurang percaya diri Soeharto tentang apa yang

sebenarnya diinginkan oleh dirinya saat itu (Elson, 2001: 269). Mungkin saja ini merupakan perwujudan atas karakter pribadinya di masa lalu yang selalu berdiri di tengah-tengah garis pemisah dua kubu, memilih menunggu (*wait and see*) sebelum akhirnya bergerak sesaat setelah jelas ke mana arah angin bertiup. Atau mungkin pula hal ini untuk menutupi tuduhan-tuduhan negatif yang dialamatkan kepadanya berkaitan dengan Supersemar.

Para pendukung Soekarno menuding Soeharto telah memanfaatkan sebuah instruksi militer menjadi transfer kewenangan eksekutif terbatas. Mungkin saja Soeharto yang telah merasa berada di atas angin memutuskan untuk menahan diri agar tidak melakukan sebuah tindakan terburu-buru yang cukup bodoh, yang akan menghilangkan kesempatannya untuk berada di puncak kekuasaan.

Lebih lanjut Soeharto berkali-kali bercerita tentang berbagai dorongan dari orang-orang terdekatnya untuk “memaksa” naik ke atas. “Saya tidak mempunyai sedikit pun pikiran di benak saya untuk melakukan *coup* atau gerakan yang bernoda,” tolak Soeharto, “Gerakan serupa itu menurut saya tidak akan berhasil.” Dan ketika dorongan itu semakin keras, ia pun bersikeras, “Kalau caranya begitu, lebih baik saya mundur saja” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 185).

Mengenai tuduhan terhadap kudetanya melalui Supersemar, ia berkomentar, “Saya tidak pernah menganggap Supersemar itu sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Surat Perintah 11 Maret itu juga bukan merupakan alat untuk mengadakan *coup* secara terselubung.”

Bagi Elson, pernyataan-pernyataan Soeharto ini merupakan lukisan dari sebuah kepura-puraan dan kebohongan (Elson, 2001: 266). Karena pada akhirnya, terbukti ke arah mana langkah politik Soeharto berjalan.

Membentuk Kabinet Militeristik

Menindaklanjuti hasil SU MPRS IV, pada tanggal 25 Juli terbentuk Kabinet Ampera yang didominasi oleh kalangan militer. Dalam kabinet ini, Soeharto yang pada beberapa hari setelahnya diangkat menjadi jenderal penuh, menjabat sebagai ketua presidium kabinet sekaligus merangkap sebagai menteri pertahanan dan keamanan.

Mengenai kebijakan dalam negeri, sejak bulan Maret 1966, Soeharto telah menetapkan perbaikan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Tahun 1965 inflasi mencapai 500% dan harga beras naik 900%. Defisit anggaran belanja mencapai 300% dari pemasukan, sementara bila rencana pembayaran utang negara yang harus dilaksanakan pada tahun itu juga tetap dijalankan berarti seluruh pendapatan ekspor negara akan segera habis. Satu-satunya jalan yang dianggap paling memungkinkan adalah dengan mengandalkan pinjaman-pinjaman baru dari negeri “imperialis” Barat. Ini berarti sebelumnya, Soeharto harus melakukan sebuah langkah populis di mata Barat. Dan langkah itu dimulai dengan dikirimnya Adam Malik untuk memperbaiki hubungan dengan Malaysia.

Mengenai situasi semasa Dwikora, Soeharto mengkritik kebijakan Soekarno, “Saya berpikir bahwa hal-hal yang telah terjadi jelas hanya merupakan proyek mercu suar.” Dengan bernada menyalahkan ia berkata, “Memang benar waktu itu ambisi Bung Karno adalah ingin menjadi tokoh dunia. Sedangkan perekonomian kita sedang rusak-rusaknya.”

Pada bulan April dan Mei dimulai sebuah upaya memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Di Bangkok, kemudian terjalin kesepakatan antara Adam Malik dengan Tun Abdul Razak. Apa yang tidak dipikirkan oleh Soeharto adalah peristiwa ini menimbulkan kritikan yang tajam di dalam negeri, terutama dari Soekarno yang terus gencar menyuarakan anti-nekolim. Takut kebijakannya akan digunakan untuk menyerang posisinya, Soeharto

memutuskan untuk menunda pelaksanaan perjanjian hingga akhirnya benar-benar terlaksana pada tanggal 11 Agustus.

Perlawanan Terakhir Soekarno

Masalah ini menyadarkan pada Soeharto bahwa perlawanan Soekarno belum berakhir. Bahkan pada peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Presiden Soekarno berpidato “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” atau yang lebih dikenal dengan “Jas Merah”. Efek dari pidato itu membangkitkan perlawanan dari kalangan pendukung Soekarno.

Di tengah suasana yang panas itu Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada bulan September 1966. Sementara tokoh-tokoh yang disorot, seperti Jusuf Muda Dalam, Soebandrio dan Omar Dhani dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), yang anggota-anggotanya dipilih sendiri oleh Soeharto. Mereka akhirnya dinyatakan bersalah. Dalam persidangan ini, dibiarkan terungkap bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Soekarno telah terlibat, atau setidaknya mengetahui adanya upaya penggulingan kekuasaan melalui G 30 S (Elson, 2001: 291). Hal ini tentu mencoreng nama baik sang presiden. Ini berarti masa pemerintahan (orde) lama tinggal menghitung hari.

Sebelumnya, benih-benih Orde Baru telah ditanam pada sebuah seminar angkatan bersenjata yang diadakan di Bandung pada akhir bulan Agustus 1966. Seminar ini bermaksud untuk merumuskan tujuan dan strategi bagi era baru politik Indonesia. Menurut Soeharto, pada seminar inilah Orde Baru dirumuskan (Elson, 2001: 281).

Sementara itu, Soeharto terus menunjukkan dominasinya terhadap Soekarno. Mendekati bulan November, Soekarno yang bermaksud menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Surabaya pada tanggal 10 November, menemui kendala memperoleh izin dari Soeharto. “Saya melihat bahaya kalau sampai beliau terbang ke sana.” Pelarangan ini bisa jadi merupakan pertanda kekhawatiran

Soeharto akan terjadinya perpecahan di kalangan angkatan bersenjata di Jawa Timur, terutama di kalangan perwira Brawijaya yang dikenal anti-komunis namun memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Soekarno (Crouch, 1986: 235).

Menanggapi pelarangan ini, Soekarno menunjukkan kekecewaannya pada sebuah kesempatan berbicara di depan publik dalam rangka memperingati Israj Mi'raj. "Ya, aku akan bersabar tetapi sabar seperti Nabi Muhammad. Ketika Nabi direndahkan, dicaci maki, difitnah dan bahkan dilempari kotoran di Thaif, ia bersabar. Akan tetapi setelah itu Nabi mulai mengambil tindakan, bahkan pergi berperang ..." ucap Bung Karno (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 184).

Ancaman itu dinilai Soeharto dialamatkan pada dirinya. Pada pidato lainnya, Soekarno menyerang ketetapan MPRS yang melarang Marxisme, "Seorang jenderal dapat membunuh seribu serdadu musuh namun seribu jenderal tidak dapat mencabut keyakinan seseorang" (Crouch, 1986: 231).

Soekarno Menyerah

Terus menerus dikekang dan dimatikan kegiatan politiknya, membuat Soekarno merasa gerah. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan keyakinan politiknya, namun di sisi lain ia sadar bahwa dualisme kepemimpinan akan menyebabkan perang saudara di antara angkatan bersenjata.

Tanda-tanda ke arah itu makin terlihat ketika pada tanggal 3 Februari 1967 beberapa perwira anggota keluarga besar Brawijaya yang dipimpin oleh Pangdam Sumitro menemui Soekarno untuk menyatakan dukungannya. Mengetahui hal itu, Sarbini yang juga mantan Pangdam Brawijaya memutuskan, atas izin Soeharto, pada tanggal 5 Februari menemui Soekarno untuk melakukan pendekatan personal sekaligus menyarankan agar Soekarno meniru kebijakan Resi Abiyasa, seorang raja di kisah Mahabharata yang memilih mundur dari tampuk pemerintahan untuk bertapa, namun

selalu siap sedia memberikan petunjuknya bila dibutuhkan oleh negara.

Meskipun tidak sepenuhnya berhasil namun pada tanggal 8 Februari secara diam-diam Soekarno telah mengirimkan surat kepada Soeharto yang isinya sebuah penawaran pembagian tugas secara tegas, di mana Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari dan Soekarno sebagai pemegang tugas kenegaraan.

Usulan ini ditolak oleh Soeharto. Meski kemudian dipandang sebagai sebuah kesempatan, oleh kawan-kawannya, untuk maju menjadi presiden. "Saya tidak mempunyai kemampuan untuk menduduki kursi yang begitu tinggi," tolak Soeharto pada awalnya. Namun kenyataannya, ia tak menolak saat rekan-rekannya berhasil meyakinkan bahwa tidak ada orang lain yang "pantas" menggantikan Soekarno selain dirinya.

Setelah melalui rapat dengan para panglima dan juga dihadiri oleh Soeharto, Soekarno yang lelah akhirnya menyetujui pelimpahan kekuasaan kepada Soeharto. Pada tanggal 20 Februari 1967, hal ini diumumkan kepada masyarakat luas. Soeharto dengan sangat berhati-hati menyampaikan kabar ini kepada 500 perwira senior. "Saya tak ingin terjadi kekacauan semata karena keputusan yang diambil secara tergesa-gesa," jelas Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 190). Sebagai seorang Jawa tulen, tampaknya Soeharto berupaya menerapkan filosofi *alon-alon asal kelakon* (lebih baik pelan tapi berhasil) dalam kasus ini.

Akhirnya, demonstrasi kejelian strategi yang dipadu dengan kesabaran menanti saat yang tepat, membuat Soeharto melenggang bebas menuju puncak kekuasaan. Pada bulan Maret 1967, diselenggarakan Sidang MPRS yang menetapkan dirinya sebagai Pejabat Presiden.

Soeharto Naik Takhta

Apa yang menjadi kehendak Soeharto akhirnya benar-benar tampak saat kursi Pejabat Presiden berada di tangan. Gambar-

gambar Soeharto telah terpampang di kantor-kantor publik bahkan saat ia belum secara resmi memangku jabatan sebagai Pejabat Presiden. Ia lalu memutuskan untuk memindahkan rumahnya dari Jalan H. Agus Salim ke sebuah bangunan sederhana di Jalan Cendana yang kelak menjadi pusat dari “kerajaannya”.

Hanya dalam hitungan bulan, Soeharto dapat dengan segera melucuti kekuasaan Soekarno (Elson, 2001: 302). Foto-foto Soekarno segera menghilang dari kantor-kantor pemerintah. Ia juga melarang Soekarno, yang masih menjabat sebagai presiden, untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-66 di Istana Negara. Bahkan Soekarno yang tidak berdaya dikenai “karantina politik”, istilah yang dipergunakan Soeharto untuk menyebutkan penahanan rumah bagi Soekarno di Istana Bogor. Puncaknya, pada tanggal 29 Juni, dikeluarkan pernyataan bahwa Soekarno tidak lagi menjadi presiden dan tidak diizinkan menggunakan gelar Kepala Negara dan Presiden Republik Indonesia. Pukulan yang bertubi-tubi ini diyakini telah mempengaruhi kondisi kesehatan Soekarno hingga akhirnya wafat dalam kesendiriannya pada tanggal 21 Juni 1970.

Dalam bidang ekonomi, Soeharto tak perlu berlama-lama menunjukkan tekadnya. Sudah sejak lama ia tidak menaruh simpati pada politik konfrontasi yang digaungkan oleh pemerintahan Soekarno. Ia lebih memilih untuk mengarahkan perhatian pemerintahan pada masalah-masalah ekonomi dalam negeri, seperti upaya menstabilkan ekonomi, menekan inflasi, dan mengatasi masalah kenaikan harga. Pembangunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pun mulai digulirkan pada bulan April 1967.

Sadar akan perlunya ideologi yang mendasari jalannya kestabilan pemerintahan, Soeharto mulai mempertegas visi Orde Baru yang berniat menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Mereka yang berperilaku bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 akan berhadapan dengan ABRI (Elson, 2001: 305).

Pada masa-masa itu, Soeharto mulai menemukan keyakinan dirinya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan caranya sendiri. Lingkaran penasihat di sekelilingnya, di antaranya yang menonjol Panggabean, Basuki Rachmat, dan Ibnu Sutowo, makin kuat pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah. Dan dengan alasan demi kepentingan perbaikan ekonomi Indonesia, ia memulai hubungannya dengan pengusaha China-Indonesia, Liem Sioe Liong, dalam bentuk dukungan terhadap Bank Windu Kencana.

Sebagai langkah akhir dalam masa jabatannya sebagai Pejabat Presiden, Soeharto pada tanggal 10 Januari 1968 berhasil meyakinkan MPRS tentang ketidaksiapan Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu dekat. Maka untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, pada Sidang MPRS V yang diselenggarakan pada bulan Maret 1968, Soeharto ditasbihkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua.



Foto: Repro Internet

*Mahasiswa “menyemut” di Gedung MPR/DPR
menuntut Soeharto mundur.*



Foto: Repro Internet

*Soeharto pun menyerah pada
“Kudeta Camdessus”. Perhatikan gesture
kemenangan Camdessus.*



Foto: Repro Internet

*Setelah berkuasa 32 tahun, Soeharto akhirnya
membacakan pengunduran dirinya
tanggal 21 Mei 1998.*



Foto: Repro Internet

*Soeharto bersama Tutut, putri sulungnya,
pasca-lengser dari kekuasaan.*



Foto: Repro Internet

Runtuhnya “rezim” Soeharto telah diramal sebelumnya, seperti yang terlihat di sampul majalah TIME di tahun 1998.



Foto: Repro Internet

*Padahal di majalah yang sama pada tahun 1966,
Soeharto dipuji sebagai penyelamat Indonesia
dari komunisme.*

Foto: www.indonesianembassy.org.uk/sudirman.jpg



*Soeharto, di sebelah kiri Soedirman
di masa revolusi.*



Foto: Repro Internet

*Letnan Kolonel Soeharto melapor pada
Sultan Yogyakarta sebelum memimpin
Serangan Umum 1 Maret 1949.*



Foto: Repro Internet

Soekarno dan Soeharto: Rivalitas dua figur pemimpin di tahun 1966-67.



Foto: Repro Internet

Soekarno mengangkat Soeharto sebagai Menpangad.



Foto: Repro Internet

Dua orang “kesayangan” Soeharto, Ali Moertopo (kiri) dan Benny Moerdani (kanan). Nasihat serta kedekatannya dengan Presiden nyaris tak tergoyahkan hingga akhirnya Soeharto memutuskan mendepak mereka.



Foto: Repro Internet

Sebagai orang Jawa, banyak yang percaya wahyu Soeharto ada dalam diri Ibu Tien.



Foto: Repro Internet/Setneg.

Soeharto bersama keluarga. Semasa berkuasa, banyak kabar yang mengaitkan keluarganya dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

-23-

32 Tahun di Puncak Kekuasaan

*“Heran ya, Pak. Di Indonesia ini setiap ada tokoh yang nongol
pasti kemudian disingkirkan.”*

- **Soemitro**, mantan Pangkopkamtib kepada Soeharto
(Heru Cahyono, 1998) -

“**JIKA** sudah duduk, lupa berdiri,” begitu kira-kira ungkapan skeptis yang sesuai untuk menggambarkan Soeharto saat berada di kursi kekuasaan. Selama 32 tahun ia menikmati saat-saat menjadi orang nomor satu di Indonesia, sesuatu yang mungkin tak terpicirkan sebelumnya ketika ia masih menjadi bocah miskin yang gemar berkubang lumpur.

Kini, si bocah miskin itu telah berubah nasibnya. Sesuai dengan namanya, ia pun mulai membuka peluang untuk memanjakan dirinya menerima limpahan *harto* sebagai konsekuensi atas posisinya sebagai Presiden RI Kedua.

Meski tak pernah secara gamblang menyatakan keinginannya menjadi presiden seumur hidup, namun segala manuver yang dimainkannya saat berkuasa, secara tersirat telah menunjukkan ambisi sebenarnya untuk selama mungkin duduk di singgasana. Sosok yang dulunya disangka orang tidak ambisius, kini mulai memikirkan cara membangun fondasi serta pilar-pilar yang kokoh untuk mengabadikan kekuasaannya.

Aspri dan Opsus

Dan upaya itu telah dimulai saat ia sedikit demi sedikit membangun lingkaran penasihat di sekitarnya. Berkaca dari pengalaman pemerintahan yang lalu, Soeharto sepenuhnya sadar dibutuhkan keseimbangan politik, ekonomi, dan juga keamanan untuk mewujudkan kelanggaran kekuasaan. Maka dibentuklah “lembaga-lembaga tidak resmi”, dengan meminjam istilah Soemitro (Heru Cahyono, 1998: 4), yang bertugas memberikan nasihat serta segala masukan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan. “Saya memerlukan bantuan dari asisten-asisten yang saya percayai untuk menghadapi pelbagai persoalan ...,” demikian alasan Soeharto (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 203).

Bukan sebuah kejutan jika kemudian Soeharto menempatkan dua rekan baiknya sejak di Diponegoro dulu, yaitu Ali Moertopo dan Sudjono Humardani untuk mengendalikan Aspri (Asisten Pribadi) dan Operasi Khusus (Opsus). Aspri adalah bentuk lebih lanjut dari Spri yang sejak diresmikan pada bulan Agustus 1966 bertugas memberi masukan kepada Soeharto tentang masalah ekonomi, intelijen, dan keuangan. Sementara Opsus adalah semacam unit intelijensi yang awalnya dibentuk demi kepentingan kegiatan mata-mata Kostrad dan sempat pula digunakan untuk keperluan kontak tertutup dengan Malaysia di masa Dwikora.

Di tangan dua orang perwira kepercayaan itu, Aspri dan Opsus berkembang menjadi kekuatan tak terbatas yang bahkan pengaruhnya terhadap Presiden melebihi kabinet serta lembaga-lembaga resmi di dalam tubuh pemerintahan. Ali Moertopo dengan Opsus-nya, jelas telah memainkan perannya dengan baik menyediakan segala informasi yang dibutuhkan, terutama di bidang politik, untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru. Sementara Sudjono Humardani, yang telah lama menjadi partner bisnis setia Soeharto semasa di Jawa Tengah, bertugas memberikan nasihat mengenai masalah keuangan serta masalah-masalah mistik dan spiritual (Elson, 2001: 216).

Pengaruh “penasihat-penasihat” presiden ini makin lama makin terasa dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam bidang ekonomi, tak jarang masukan yang mereka berikan bertentangan dengan ide-ide para teknokrat; macam Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dan Mohammad Sadli, yang posisinya lebih jelas dalam pemerintahan.

Akibat sepak terjang Aspri dan Opsus ini, terjadi dualisme dalam pencarian pemecahan masalah perekonomian. Dengan kemudahan akses ke pucuk pimpinan pemerintahan, para penasihat tak resmi ini dapat menanamkan pengaruhnya pada kabinet dengan memasukkan Sumitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan (Heru Cahyono, 1998: 23). Sumitro, yang juga ayah dari Prabowo (kelak menjadi menantu Soeharto dan berperan dalam konflik politik menjelang jatuhnya Soeharto) sengaja dijemput pulang dari Malaysia untuk membantu mengatasi kemerosotan ekonomi Indonesia.

Keberadaan para “penasihat” atau juga “pembisik” ini kemudian mewarnai kehidupan politik Soeharto selama menjabat menjadi Presiden RI di masa-masa mendatang. Dan seperti pengakuan Soemitro sebagai mantan Pangkopkamtib (salah satu lembaga yang juga termasuk “lembaga tak resmi”), peran mereka sangatlah besar dalam mengembangkan Orde Baru dengan segala manuvernya (Heru Cahyono, 1998: 47) meski terkadang terlalu vulgar dalam mencapai tujuannya. Tapi bagaimanapun hal ini sejalan dengan langkah-langkah politik yang dipilih oleh Soeharto kemudian dalam menjaga kestabilan pemerintahannya.

Menyingkirkan Nasution

Tantangan pertama bagi Soeharto dalam menciptakan kestabilan politik hadir dalam diri Nasution. Sebagai seorang jenderal senior, figur Nasution jelas secara tidak langsung berpotensi menjadi rival Soeharto dalam menuju kursi kepemimpinan.

Jenderal Nasution dikenal jago dalam merumuskan strategi. Jasanya membangun Angkatan Darat sejak masa revolusi merupakan bukti sah kapabilitas Nasution sebagai seorang pemimpin. Kebenciannya terhadap PKI serta kehidupannya yang sederhana, jauh berbeda dengan gaya hidup yang dipilih oleh Yani Cs., membuat orang mulai ramai membicarakan kemungkinan Nasution sebagai alternatif pengganti Soekarno menjadi Presiden RI.

Hanya saja ada satu “cacat” tak terlupakan dalam karier Nasution. Peristiwa 17 Oktober 1952 telah meninggalkan kesan yang tidak baik di mata sementara orang. Pribadinya yang keras bahkan berani menentang Soekarno tentu kurang bisa diterima oleh para pendukung Soekarno.

Dalam keadaan normal, pecahnya Gerakan 30 September harusnya membuka jalan bagi Nasution untuk naik ke atas, bukannya Soeharto. Namun suratan nasib berkata lain. Perseteruannya dengan Soekarno membuat dirinya teralienasi dari pemerintahan formal. Terbetik kabar, Presiden Soekarno lebih memilih Pangkostrad Soeharto dalam menjalankan kegiatan keamanan dan ketertiban pasca-G 30 S, semata karena sang Presiden “alergi” terhadap Nasution.

Akibatnya, pasca Gerakan 30 September Nasution memilih berada di belakang layar sementara Mayor Jenderal Soeharto menjadi motor penggerak di lapangan. Dalam buku *Perjalanan Hidup A.H. Nasution: Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai* dikatakan, “Secara bersama-sama, mereka dengan gigih berusaha membersihkan nama baik TNI Angkatan Darat ...” (Tim PDAT, 1998: 202).

Dengan segala keterbatasan geraknya, Nasution terus berbuat optimal untuk kepentingan Angkatan Darat. Bahkan Nasution pulalah yang dengan gigih mengajukan kepada Presiden Soekarno agar Mayjen Soeharto bisa diangkat menjadi Panglima AD

menggantikan Jenderal Achmad Yani yang tewas pada tanggal 1 Oktober 1965.

Peran Nasution amatlah besar bagi kemajuan karier Soeharto. Menjelang SU MPRS IV, Angkatan Darat dan ABRI sepakat “mengangkat” Nasution menjadi Ketua MPRS. SU MPRS IV ini memiliki arti penting dalam memperlicin jalan Soeharto menjadi presiden. Melalui sidang itu, Nasution dengan MPRS-nya menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan memperkuat kedudukan Supersemar melalui Tap MPRS No. IX/MPRS/1966.

Setahun kemudian, ia juga berperan dalam pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Melalui Sidang Istimewa MPRS yang dibuka pada tanggal 7 Maret 1967, Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden. Dan pada Sidang Umum MPRS V di tahun 1968, Soeharto diambil sumpah oleh Nasution untuk menjadi Presiden RI Kedua.

Sayangnya, masa “bulan madu” mereka cepat berakhir. Muncul kabar yang mengatakan Nasution ingin menjadi presiden (Tim PDAT, 1998: 223). Mungkin hal inilah yang kemudian membuat Nasution harus tersingkir dari kursi MPRS.

Sebenarnya, bibit-bibit perpecahan telah tampak sesaat sebelum Sidang Umum MPRS V dilaksanakan. Pemerintah, yang berada di bawah kendali Pejabat Presiden Soeharto, dengan mengatasnamakan rakyat melakukan perombakan anggota DPR-GR dan MPRS. Sesuatu hal yang sebenarnya berada di luar keinginan MPRS itu sendiri. Alhasil, terbentuk MPRS wajah baru di mana fraksi Golkar dan ABRI secara gabungan menjadi mayoritas (Tim PDAT, 1998: 227). Maka tak heran pada SU MPRS V ini, Soeharto kemudian diangkat menjadi presiden.

Namun rupanya ini belum cukup bagi Soeharto. Setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI, MPRS tidak lagi dapat menjalankan fungsinya. Banyak pihak yang menduga lembaga ini sengaja dimacetkan. Kemacetan ini terjadi lantaran fraksi Golkar tak mau berpartisipasi serta tak mau mengakui susunan Badan Pekerja (BP).

Secara otomatis hal ini menghentikan kegiatan komisi serta panitia MPRS yang sedianya disusun oleh BP.

Menanggapi hal ini, Nasution mengeluh, “Setelah *safe* Presiden diangkat untuk menjabat selama lima tahun, maka macetlah atau dimacetkanlah MPRS.” Sepertinya ada upaya rekayasa politik untuk menyingkirkan Nasution. Tersiar berbagai spekulasi mengenai mengapa Soeharto ingin menyingkirkan Nasution. Ada kabar yang mengatakan bahwa Soeharto masih menyimpan dendam lama kepada Nasution yang telah “membuangnya” ke Bandung saat terlibat kasus di Diponegoro dulu. Ada pula yang mengatakan Soeharto tidak suka mendengar kemungkinan Nasution ingin menjadi presiden. Namun menurut Nasution, dirinya disingkirkan karena pemerintahan baru tidak menyukai cara kerja MPRS yang vokal dan kritis terhadap pemerintah (Tim PDAT, 1998: 235).

Niat pemerintah itu tergambar dari pernyataan Kepala Opsus dan Aspri Presiden Ali Moertopo bahwa pimpinan MPR secara tersendiri tak diperlukan lagi karena bisa dirangkap oleh pimpinan DPR. Pada akhirnya, semuanya menjadi jelas saat Presiden secara sepihak menyatakan bahwa MPRS tak berfungsi lagi setelah terbentuknya DPR hasil pemilu pada bulan Oktober 1971.

Menjinakkan Partai dan Memilih Golkar Sebagai Kendaraan

Kunci dari awetnya masa pemerintahan Soeharto adalah kecerdikannya dalam mengelola organisasi partai-partai. Dengan segala cara ia berupaya melemahkan partai-partai yang berpotensi menjadi pesaing. Dan untuk menjalankan tugas ini, ia banyak berhutang pada Ali Moertopo.

Ali Moertopo dengan Opsus-nya, memiliki langkah yang jelas dalam menjinakkan parlemen. Dan biasanya, jalan yang dipilih untuk ditempuh adalah dengan mereorganisasi kepemimpinan partai. Bahkan tak jarang pemerintah menempatkan orang-orangnya sebagai ketua partai. Seperti misalnya yang terjadi pada PNI. Partai

besar di masa Orde Lama ini berhasil “dipaksa secara halus” untuk menempatkan Hadisubeno, teman lama Soeharto semasa di Diponegoro, sebagai ketua dari partai yang banyak dihuni oleh para Soekarnoisme ini.

Nasib yang sama juga dialami oleh Parmusi (Partai Muslim Indonesia). Oleh karena dianggap memiliki hubungan dekat dengan Masyumi, sebuah partai yang dilarang pada tahun 1960 karena dianggap mendukung PRRI, partai ini lalu menjadi korban rekayasa politik Ali Moertopo. Soeharto pun leluasa untuk menempatkan Mintareja, salah seorang anggota kabinetnya, sebagai ketua partai. Dengan cara ini, Parmusi kemudian menjadi “milik” Orde Baru.

Penjinakan partai ini hanyalah sasaran antara bagi Soeharto untuk kemudian digunakan untuk mencapai sebuah sasaran yang lebih tinggi, yaitu kemenangan “demokratis” melalui pemilu. Sebagai pemimpin pemerintahan di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kemenangan melalui pemilihan umum adalah sebuah legitimasi yang tak tergoyahkan. Dan untuk memenangkannya maka berarti pemerintah memerlukan sebuah partai untuk dijadikan kendaraan pacu dalam pemilu.

Lagi-lagi, ini menjadi tugas Ali Moertopo. Pada awalnya ia kurang tertarik untuk menjadikan Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) sebagai perwakilan suara pemerintah dalam parlemen. Ali menganggap konsep serta kecenderungan Golkar yang Soekarnoisme tidak sesuai dengan cita-cita pemerintah. Namun bagi Soeharto, Golkar sangat berpotensi untuk dijadikan wahana. Baginya, Golkar adalah partai yang istimewa karena dalam partai ini tidak ada tokoh-tokoh politik yang menonjol (Elson, 2001: 354).

Maka dimulailah aksi gerilya Ali Moertopo dengan dibantu oleh Sudjono Humardani untuk membesarkan Golkar. Para pegawai negeri “dianjurkan” untuk memilih Golkar. Pemilihan bagi mereka dilakukan di kantor sehingga mereka yang tidak

mencoblos Golkar memiliki risiko ketahuan (Elson, 2001: 356). Pendekatan kepada organisasi-organisasi muslim juga dilakukan. Mereka dijanjikan dana naik haji serta pembangunan tempat-tempat ibadah bila bersedia mengajak anggotanya memberikan dukungan pada Golkar. Para pejabat daerah dinilai kinerjanya berdasarkan jumlah perolehan suara bagi Golkar.

Sementara itu upaya pengeroposan partai-partai lain terus dijalankan. Orang-orang PNI ditarik ke dalam keanggotaan Golkar. Guntur Sukarnoputra, putra tertua mantan Presiden Soekarno, dilarang mencalonkan diri melalui PNI. Kopkamtib turut diberdayakan dengan melarang calon-calon tertentu mengikuti pemilu dengan alasan “keamanan”.

Dan upaya ini juga didukung dengan mencari sokongan pemberitaan media massa. PWI resmi pimpinan Rosihan Anwar kemudian harus berhadapan dengan PWI pimpinan B.M. Diah yang didukung oleh pemerintah.

Dengan segala trik dan daya upaya Ali Moertopo, dalam waktu yang relatif singkat terjadi perubahan kekuatan politik yang cukup signifikan. Meski demikian, hasil pemilu tahun 1971 yang berakhir bagi kemenangan Golkar sebanyak 62,8 persen, bagi Elson tetap saja merupakan hasil yang “mengherankan” (Elson, 2001: 358).

Pada tahun-tahun berikutnya, melalui cara yang sama, Orde Baru membuat perolehan suara mereka nyaris tak tersentuh oleh pesaing-pesaingnya. Dan pada tahun 1973, dalam rangka memudahkan kemenangan Golkar dalam setiap pemilu maka sembilan partai kontestan pemilu tahun 1971 dilebur ke dalam dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikatakan mewakili unsur “spiritual”, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mewakili kaum “nasional”. Golkar sendiri dengan segala hak istimewanya mengklaim sebagai perwakilan dari “fungsional”. Dengan demikian, Orde Baru semakin kokoh menancapkan kukukuku kekuasaannya di alam politik Indonesia.

Bangkrutnya Pertamina

Masa depan pemerintahan Indonesia di bawah rezim Soeharto sebenarnya telah tergambar dengan jelas di awal-awal tahun 70-an. Pada tahun-tahun ini, pemerintahan yang baru seumur jagung itu untuk pertama kalinya membangun reputasi sebagai pemerintahan yang gemar melakukan praktik *koncoisme* dan rentan bagi masalah-masalah korupsi.

Dalam hal ini, kasus bangkrutnya Pertamina adalah contoh yang paling baik untuk mewakili skandal-skandal korupsi yang mengakibatkan limbungnya perekonomian bangsa. Pertamina didirikan sejak tahun 1957, dengan nama Permina. Di bawah pemerintahan Soeharto, Pertamina dikelola oleh Ibnu Sutowo, seorang kawan yang juga telah lama menjadi orang kepercayaan.

Di masa-masa awal Soeharto berkuasa, Pertamina telah menjadi salah satu andalan peningkatan ekonomi yang selalu digembar-gemborkan oleh Orde Baru. Ibnu Sutowo dengan gayanya yang agresif, serta didukung oleh kepercayaan tak terbatas dari Soeharto, telah melakukan beberapa gebrakan yang di mata para teknokrat terlalu *sebrono*. Pertamina dinilai telah *over* dalam melakukan ekspansi ke bidang-bidang yang beberapa di antaranya tidak berkaitan dengan masalah minyak, seperti PT Krakatau Steel, hotel dan rumah sakit, bahkan menginvestasikan sejumlah uang pada sebuah restoran di kota New York.

Namun kekuasaan Ibnu di Pertamina bisa dikatakan tak tersentuh oleh siapa pun. Soeharto seolah memberikan jaminan kepada Ibnu untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginannya. Ia membalas serangan para teknokrat ini dengan menyebut mereka sebagai kolot dan teoretis (Retnowati Abdulgani-Knapp, 2007: 118). Ia pun mengklaim dirinya sebagai seorang entrepreneur yang sukses.

Arogansi ini sebagian besar disumbangkan dari penilaian yang terlalu berlebihan kepada Ibnu Sutowo yang dianggap telah berhasil membesarkan Pertamina. Dengan lonjakan penerimaan

pemerintah dari sektor perminyakan yang cukup besar, yaitu dari Rp 66,5 Miliar (tahun 1969/1970) menjadi Rp 957,2 miliar (tahun 1974/1975), Pertamina segera menjadi “harta nasional”.

Berkorelasi dengan itu, kepopuleran Ibnu pun melonjak bak selebriti. Gaya hidupnya yang mewah serta “istananya” yang megah telah mengundang sorotan dari para mahasiswa. Sementara itu, kepercayaan dari Soeharto pun semakin meningkat hari demi hari.

Kekuasaan yang tidak terkontrol telah menyeret Pertamina ke dalam masalah besar. Tahun 1972 Pertamina mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah. Bahkan pada bulan Oktober 1974, Pertamina dengan semena-mena menghentikan sama sekali pembayaran pajaknya, dan menggunakan uang serta pinjaman milik mereka untuk membiayai proyek-proyek internal. Ibnu Sutowo seakan lupa bahwa gepokan uang yang diinvestasikan tanpa perhitungan itu adalah pinjaman dari luar negeri yang suatu saat harus dibayarkan. Ia juga seolah tak mau tahu bahwa keberhasilan Pertamina menjadi salah satu dari dua ratus perusahaan terbesar dunia, tak lepas dari *boom* minyak yang sedang melanda dunia saat itu.

Aksi diam Soeharto terhadap tindak tanduk Ibnu Sutowo itu kemudian menimbulkan suara protes di mana-mana. Baru setelah terkuak utang yang dimiliki Pertamina sebesar 10,5 miliar dolar – jumlah yang tak sanggup ditanggung Pertamina melalui operasionalnya - Soeharto menjadi kelimpungan. Ia mengaku, “Kesulitan yang dialami Pertamina memang cukup parah. Terutama karena ... kewajiban-kewajiban yang disebabkan oleh meluasnya kegiatan Pertamina yang sebagian besar tidak langsung ada hubungannya dengan kegiatan di bidang minyak ...” (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 304). Hal ini diperparah dengan terbongkarnya kasus korupsi dalam proyek pengadaan tanker Pertamina.

Upaya penyelamatan yang sedikit terlambat lalu dilakukan. Soeharto pada tanggal 3 Maret 1976 memanggil dan memberhen-

tikan “secara hormat” Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo dan menggantikannya dengan Jenderal Piet Haryono. Meski demikian, Ibnu Sutowo tak pernah diajukan ke pengadilan. Ia lalu menikmati masa pensiunnya yang makmur sebagai pengusaha sukses (Elson, 2001: 411).

Soeharto sendiri secara jujur mengatakan, “Masalah Pertamina itu sungguh merupakan pengalaman yang pahit dan harus menjadi pelajaran bagi kita semua ...” (Elson, 2001: 305). Namun pada kenyataannya, kasus korupsi serta *missmanagement* terus mewarnai perusahaan-perusahaan milik pemerintah di kemudian hari.

Peristiwa Malari

Peristiwa berikutnya menjadi bukti sebuah keharusan bagi Soeharto untuk memiliki kontrol yang lebih terhadap kawan-kawan terdekatnya. Sepak terjang Opsus Ali Moertopo yang sebelumnya dicurigai turut merasakan limpahan dana Pertamina dari Ibnu Sutowo, mulai mendapat sorotan yang serius dari berbagai kalangan.

Krisis pangan dan inflasi yang memuncak telah membangkitkan amarah rakyat, terutama dari kalangan mahasiswa. Kedekatan “geng” Ali dengan para *cukong* China dianggap telah merugikan rakyat pribumi.

Akhir tahun 1973, terjadi kerusuhan anti-China di Bandung yang mengakibatkan sekitar 1.500 rumah dan toko dibakar. Lambannya militer menangani pemasalahan ini menimbulkan isu tak sedap tentang kemungkinan adanya dukungan militer terhadap aksi massa ini.

Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib kemudian diminta oleh Soeharto untuk memelihara keamanan dengan terjun langsung ke kampus-kampus untuk berdialog dengan para akademisi yang kritis. Namun tampaknya upaya ini kurang berhasil. Dengan dukungan dari kaum muslim dan media massa, para mahasiswa

menyuarakan tiga permintaan, yaitu: membubarkan Aspri, penurunan harga barang-barang komoditas, dan pemberantasan korupsi. Aksi protes ini terutama ditujukan pada para *cukong*, serta orang-orang dekat Soeharto, termasuk Ali Moertopo, Sudjono Humardani, Liem Sioe Liong, Liem Bian Kie, dan bahkan pada Ibu Tien (Retnowati Abdulgani-Knapp, 2007: 128).

Kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1974 dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk menunjukkan rasa tidak suka mereka terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menuding pemerintah telah membiarkan investor Jepang bekerjasama hanya dengan para pengusaha Cina sehingga menutup kesempatan bagi pengusaha pribumi.

Saat para mahasiswa berdemonstrasi di Istana Merdeka pada tanggal 15 Januari 1974, terjadi kerusuhan di Pasar Senen. Kantor Astra, di mana pemiliknya William Soerjadjaya dianggap memiliki hubungan dekat dengan Ibu Tien dan Ibnu Sutowo, dibakar oleh massa (Retnowati Abdulgani-Knapp, 2007: 129). Kendaraan-kendaraan buatan Jepang juga habis dirusak. Sekitar 470 orang ditangkap, termasuk Hariman Siregar pimpinan demonstrasi mahasiswa. Tercatat lebih dari 800 mobil dan 150 bangunan hancur akibat aksi ini.

Bagi para pengamat, kerusuhan yang terjadi bukanlah semata kerusuhan yang bertujuan menolak investor Jepang. Menurut mereka, kerusuhan ini merupakan efek dari pertentangan dua kubu, yaitu kubu Opsus dan Aspri Ali Moertopo-Sudjono Humardani dengan kubu Komkaptib-Bakin Soemitro-Sutopo Juwono.

Kelompok Opsus Ali Moertopo menuding Soemitro berada di balik gerakan yang dikenal dengan nama Malari ini. Soemitro dianggap memiliki ambisi untuk menjadi presiden dengan bantuan AS dan berupaya menggalang kekuatan dari kalangan kampus. Tersiar kabar ditemukan Dokumen Ramadi yang menyebutkan ada seorang jenderal berinisial S (Soemitro) yang berencana

merebut kekuasaan dengan menggulingkan Presiden pada bulan April 1974 (Heru Cahyono, 1998: 185).

Soemitro yang merasa dirinya dicitra buruk lalu balik menyerang. Ia merasa bahwa pihak Ali-lah yang sebenarnya memiliki ambisi untuk menjadi Presiden (Heru Cahyono, 1998: 13). Dari keterangan Bakin (lembaga intelijen versi resmi) yang dipimpin oleh Sutopo Juwono, dikatakan Ramadi adalah rekan dekat Sudjono Hoemardani (Heru Cahyono, 1998: 187). Bagi Soemitro, dengan alasan inilah yang mungkin membuat akhirnya Ramadi menemui ajalnya yang misterius. Apalagi sebelumnya ia telah mendengar kabar adanya seseorang dari kubu Opsus yang membagikan uang pada tukang becak di Pasar Senen sebelum meletusnya Malari (Heru Cahyono, 1998: 234).

Soeharto yang cerdas menyadari bahwa kedua kubu yang bertikai ini harus dijauhkan dari pemerintahan tetapi tanpa menimbulkan luka hati yang mendalam. Soemitro dan Sutopo Juwono, juga orang-orang dekat mereka kemudian diberikan jabatan yang ringan tanpa kekuasaan (istilah yang *trend* di masa Orde Baru adalah “didubeskan”). Ali Moertopo juga mengalami nasib yang sama. Perlahan posisinya digeser menjadi Menteri Penerangan sebelum akhirnya berakhir di posisi “buangan”, DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Aspri pun dibubarkan.

Bagi Elson, kehati-hatian Soeharto ini merupakan hasil dari pelajaran di masa lalu, di mana Soeharto memahami bahwa tindakan keras hanya akan menghasilkan perlawanan (Elson, 2001: 394). Setelah terjadinya peristiwa Malari yang memalukan itu, Soeharto melakukan reorganisasi kelembagaan. Yoga Sugama ditarik pulang, setelah sebelumnya disingkirkan karena terlibat perselisihan dengan Soeharto. Ia kemudian ditunjuk menjadi Kepala Bakin. Sedangkan posisi Soemitro digantikan oleh Soedomo. Benny Moerdani, salah seorang bekas bawahan Ali Moertopo di Opsus juga dipanggil pulang dari Korea Selatan untuk memperkuat Hankam.

Secara halus Soemitro mencurigai adanya upaya khusus untuk memecah belah tokoh-tokoh tertentu sebagai fenomena mencegah munculnya seorang tokoh yang bisa menyaingi Soeharto (Heru Cahyono, 1998: 306). Hal itu pun sekali waktu pernah diutarakan Soemitro langsung kepada Soeharto, "Heran ya, Pak. Di Indonesia ini setiap ada tokoh yang *nongol* pasti kemudian disingkirkan."

Petisi 50

Seiring dengan terpilihnya Soeharto menjadi Presiden RI untuk ketiga kalinya, semakin jelas ambisi serta arogansi seorang penguasa yang tumbuh dalam diri Soeharto. Petisi 50 mungkin bukan peristiwa yang dapat menimbulkan guncangan bagi "kerajaan"-nya, namun cukup mengundang kehebohan lantaran melibatkan banyak nama yang cukup dikenal dalam dunia politik Indonesia.

Semuanya berawal saat Presiden Soeharto bereaksi keras terhadap aksi *walk out* yang dilakukan oleh unsur-unsur NU di DPR sewaktu pembahasan tentang RUU Pemilihan Umum. Pada Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1980, Soeharto yang berpidato tanpa teks menekankan bahwa ABRI tidak akan mengubah Pancasila dan UUD 1945 meskipun hal itu memungkinkan. Dengan berlandaskan janji prajurit yang tertuang pada Sapta Marga, ABRI jika perlu akan menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankannya. Lebih lanjut Soeharto mengatakan, "Daripada menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 1945 dan Pancasila, lebih baik menculik satu orang dari 2/3 anggota MPR yang menghendaki perubahan itu, sebab 2/3 anggota MPR dikurangi satu berarti tidak sah (Tim PDAT, 1998: 252).

Ucapan Soeharto ini kemudian memicu munculnya Petisi 50 yang ditandatangani oleh para tokoh nasional serta beberapa purnawirawan militer, seperti: A.H. Nasution, A.Y. Mokoginta,

Ali Sadikin, Muhammad Natsir, A.M. Fatwa, Syafruddin Perwiranegara, Manai Shopiaan, dan lain-lain. Pada intinya petisi itu berisi tentang keprihatinan terhadap penggunaan Pancasila oleh Soeharto sebagai sarana untuk mengancam lawan-lawan politik. Presiden seolah-olah dianggap sebagai pengejawantahan dari Pancasila. Setiap orang yang menentang Presiden berarti dianggap sebagai anti-Pancasila.

Selain itu, pernyataan-pernyataan Soeharto dianggap membujuk ABRI untuk memihak penguasa, bukan berpijak pada semua golongan masyarakat. Bahkan posisi UUD 1945 ditempatkan di bawah Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Petisi ini kemudian diserahkan kepada DPR pada tanggal 13 Mei 1980.

Soeharto dengan hati panas menanggapi sepi Petisi 50. "Apa yang dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya Petisi 50 itu tidak saya sukai," katanya. "Dalam Demokrasi Pancasila tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat," demikian pernyataan Soeharto yang semakin memperlihatkan kecurigaan serta kebenciannya terhadap pihak-pihak yang dianggapnya ingin menjatuhkan dirinya dari kursi kepresidenan (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 346).

Meskipun Soeharto memilih untuk mendingkan saja Petisi 50, sempat tersiar kabar para tokoh yang terlibat akan dikirim ke Pulau Buru. Kabarnya, karena bingung alasan apa yang akan digunakan, maka Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf tak memberikan izin terhadap pelaksanaan rencana itu (Tim PDAT, 1989: 255). Tetapi tetap saja Panglima Kopkamtib Soedomo memerintahkan agar para tokoh yang sering disebut "Barisan Sakit Hati" ini untuk meminta maaf kepada Presiden Soeharto. Mereka yang menolak meminta maaf, salah satunya adalah Nasution (tokoh yang sejak lama menjadi rival Soeharto dan sering melontarkan kritiknya terhadap cara-cara Soeharto menerjemahkan dwi fungsi ABRI dalam kehidupan politik), kemudian harus mengalami pencekalan serta dibuat susah hidupnya (Tim PDAT, 1998: 255).

Penembak Misterius (Petrus)

Orde Baru semakin menunjukkan taringnya dengan kehadiran “Petrus”. Menurut James T. Siegel, profesor senior di Jurusan Antropologi dan Studi Asia di Cornell University, Amerika Serikat, Orde Baru sengaja menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan maut yang setiap saat siap melenyapkan segala bentuk ancaman. Petrus merupakan salah satu contoh kasusnya.

Rentetan penembakan ini dimulai di Yogyakarta pada bulan Maret 1983. Para tokoh-tokoh kriminal ditemukan telah menjadi mayat di tempat-tempat umum. Hal ini kemudian meluas ke seluruh Jawa dan daerah di luar Jawa.

Masyarakat merasa yakin bahwa pihak aparat keamanan telah “main hakim sendiri” untuk mengurangi tingginya angka kriminal di Indonesia saat itu. Suara pro dan kontra kemudian menjadi bahan diskusi yang ramai dimuat oleh media massa.

Panglima Angkatan Bersenjata Benny Moerdani dengan tegas membantah bahwa pasukannya berada di balik rangkaian penembakan misterius ini. Menurut Benny, korban-korban penembakan itu adalah hasil perang antargeng yang banyak melanda kota-kota besar di Indonesia.

Bagi Siegel, penembakan misterius ini dilakukan tanpa adanya bukti atas tindak “kriminal” yang dituduhkan pada korban-korbannya. Hampir tak ada upaya untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang dituding sebagai kriminal untuk membela diri.

Sebenarnya, ada kabar yang mengatakan bahwa Petrus ini adalah kampanye terselubung untuk menghabisi mantan tukang-tukang pukul Ali Moertopo yang berpotensi mengganggu keamanan pemerintahan. Namun tak ada bukti yang dapat membenarkan spekulasi macam itu.

Meski demikian, kemudian muncul pengakuan Soeharto tentang keterlibatan pemerintah atas masalah Petrus ini. Soeharto menulis, “Masalah yang sebenarnya adalah bahwa kejadian itu

didahului oleh ketakutan yang dirasakan oleh rakyat Orang-orang jahat itu sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan Dengan sendirinya kita (maksudnya pemerintah, - *ed.*) harus mengadakan *treatment*, tindakan yang tegas ... yang melawan, ya mau tidak mau harus ditembak. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk *shock therapy* ... Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya (Dwipayana dan Ramadhan, 1989: 390).

Belakangan Benny Moerdani mengakui bahwa pengadilan benar-benar kewalahan menghadapi para pelaku kriminal. Para intel kemudian ditugaskan mengikuti para penjahat itu untuk memastikan kejahatannya. Begitu merasa yakin bahwa targetnya adalah penjahat, maka mereka lalu dihabisi begitu saja (Elson, 2001: 456).

Penembakan misterius terus berjalan hingga tahun 1985. Masyarakat dihinggapi keresahan, terutama bagi mereka yang merasa penampilan fisiknya serupa dengan para kriminal. Diperkirakan 5 ribu hingga 10 ribu orang menjadi korban keganasan para penembak misterius ini.

Begitulah cara penegakan keadilan ala Orde Baru ...

Peristiwa Tanjung Priok

Sementara itu, niat pemerintah untuk memperkuat kedudukanannya dengan berencana menyusun undang-undang yang menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi massa di Indonesia mendapat tentangan dari berbagai elemen. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pula di kalangan Islam (Elson, 2001: 456). Pada akhirnya, ketidakpuasan ini berujung pada sebuah insiden yang terjadi pada bulan September 1984 di wilayah pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Terjadi kerusuhan besar-besaran menentang pemerintah. Bentrokan antara aparat keamanan dengan warga tak terhindarkan. Warga menuntut pembebasan empat orang teman mereka yang ditahan oleh aparat. Selain itu, mereka menolak dijadikannya

Pancasila sebagai asas tunggal, menentang kebijakan pemerintah soal Keluarga Berencana (KB), dan mempertanyakan pelarangan menggunakan jilbab di sekolah-sekolah.

Pemerintah melalui angkatan bersenjata kemudian dengan ganas, menurut Elson, berupaya memadamkan perlawanan warga (Elson, 2001: 457). Lampu-lampu dipadamkan dan terdengar tembakan beruntun. Diketahui 23 orang tewas setelah dilaksanakan penggalian kuburan di Condet (7 orang), Kramat Ganjeng (8 orang) dan Mengkok (8 orang).

Banyak pengamat yang menilai, Benny Moerdani yang menurut Soemitro perannya bukannya melunak namun semakin menjadi-jadi (Heru Cahyono, 1998: 127), adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Benny kerap dianggap sebagai orang yang sengaja memojokkan golongan Islam. Namun, Benny membantahnya di hadapan para kiai Ponpes Lirboyo, Kediri, "Saya ingin menegaskan, umat Islam Indonesia tidak dipojokkan. Dan tidak akan pernah dipojokkan."

Nama Try Soetrisno juga sering disebut-sebut terkait dalam insiden ini. Di kemudian hari, karena merasa bertanggung jawab, Try Soetrisno dikabarkan mengajukan pengunduran diri namun ditolak oleh Benny. "Ini kesalahan kita semua," tegas Benny.

Benny Moerdani Dipinggirkan

Aksi penyingkiran oleh pemerintahan Orde Baru tidak hanya dialami oleh musuh-musuhnya yang berperan sebagai oposisi bagi kebijakan pemerintah, namun juga berlaku bagi teman-teman yang tadinya adalah seorang loyalis namun kemudian dianggap berpotensi mengancam kekuasaan. Seorang yang setia mengawal Orde Baru seperti Benny Moerdani sekalipun harus menerima kenyataan pahit disingkirkan dari lingkaran pemerintahan.

Gaya Soeharto dalam memimpin adalah jelas dan tegas tidak menerima perbedaan pendapat yang mempertanyakan kebijakan-kebijakannya. Dan ketika Benny seorang yang gemar berbicara

blak-blakan terlalu berani melewati garis-garis pembatas yang dibuat oleh Soeharto, tak ada jalan lain bagi Soeharto kecuali menunjukkan bahwa tak ada seorang pun di Republik yang mampu menyaingi dirinya.

Di awal kemunculannya, Benny Moerdani adalah orang yang sangat diharapkan oleh Soeharto untuk menggantikan peran Ali Moertopo yang telah meredup bintangnya setelah Peristiwa Malari. Bukan sebuah kebetulan jika kemudian diketahui Benny adalah mantan anak didik Ali Moertopo dan sempat bergabung di Opsus sejak masa konfrontasi dengan Malaysia dulu. Dengan Soeharto ia telah menjalin hubungan baik saat terlibat dalam upaya pembebasan Irian Barat.

Benny Moerdani diangkat sebagai Panglima ABRI pada bulan Maret 1983 sekaligus merangkap sebagai Panglima Kopkamtib. Pendekatan yang digunakan galak dan tak kenal ampun - yang kelak dijuluki "pendekatan keamanan" - terhadap apa yang mereka pandang sebagai ancaman bagi keamanan dalam negeri (Elson, 2001: 470).

Lambat-laun, Benny tumbuh menjadi figur paling kuat setelah Soeharto. Pamor Benny bahkan disebut hampir menyamai Soeharto.

Soeharto yang tidak menyukai adanya dualisme figur dalam suatu pemerintahan, akhirnya mengambil langkah yang cepat dan sistematis untuk menjauhkan Benny dari kekuasaan. Sebelum SU MPR tahun 1988, Benny diberhentikan dari Jabatan Panglima ABRI. Benny pun kehilangan kendali terhadap Fraksi ABRI di DPR/MPR. Santer terdengar rumor di masyarakat, Soeharto marah karena Benny dianggap berambisi menduduki kursi wakil presiden pada Sidang Umum MPR 1988.

Dalam biografinya *Tragedi Seorang Loyalis*, diakui oleh Benny bahwa keretakan itu bermula ketika ia dan Presiden sedang bermain billiar berdua di Jalan Cendana, kediaman Soeharto. "Saya katakan kepada beliau untuk menjaga keamanan pribadi Presiden

memang sudah cukup dengan satu batalion Paspampres. Tetapi untuk pengamanan politik Presiden, mutlak harus didukung oleh keterlibatan keluarga dan juga dari presidennya sendiri. Begitu saya angkat masalah tentang anak-anaknya tersebut, Pak Harto langsung berhenti main. Segera masuk kamar tidur, meninggalkan saya di ruang biliar sendirian,” ujar Benny. Pamor Benny langsung surut di mata Soeharto.

Sejak itu Suharto marah kepada Benny dan ujungnya dia dicopot mendadak dari jabatan Panglima ABRI yang sangat berkuasa pada masa itu. Karier Benny “sedikit” terselamatkan berkat Laksamana Soedomo yang mengingatkan Soeharto bahwa “membuang” Benny bisa membawa bencana.

Meski tak menyebut nama Benny, Soedomo mengutip kisah Presiden Korea Selatan Park Chung-hee yang ditembak mati oleh mantan kepala intelijennya. “Tetapi, saya lihat Pak Harto kaget. Sudah pasti, beliau kemudian juga ingat kembali kepada kisah tersebut. Mungkin beliau mulai merasa takut dan berpikir, bagaimana kalau nanti Benny *mbambung*, nekad karena dikecewakan. Perasaan tersebut terasa sekali, mulai menghantui beliau ...,” tutur Soedomo.

Kemungkinan karena masalah ini, setelah SU MPR 1988 selesai, presiden membutuhkan waktu sekitar tiga minggu untuk menyusun Kabinet Pembangunan IV (ini jauh sangat terlambat dan di luar kebiasaan Orde Baru). Benny dijadikan Menhankam. Tampaknya Soeharto belum berani menyingkirkannya sama sekali. Dia tetap di kabinet sampai tahun 1993, dekat dengan Soeharto, tetapi kekuasaannya sudah dibatasi.

Bisnis Keluarga Cendana

Selama menjabat sebagai Presiden RI, Soeharto memperlihatkan sikap yang membingungkan dan bermuka dua dalam menanggapi masalah korupsi. Di satu sisi ia berulang kali menegaskan kepada publik untuk melakukan pemberantasan korupsi (Elson,

2001: 371) namun di sisi lain ia bersikap melindungi tindak korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Penyingkiran Benny Moerdani, yang secara berani mengingatkan sang “Raja” untuk mengendalikan putra-putrinya, adalah satu contoh ketegasan Soeharto dalam menerapkan sistem proteksi yang kuat terhadap keluarga serta rekan-rekan terdekatnya; seperti Probosutejo, Sudwikatmono, Liem Sioe Liong, Bob Hasan, William Soerjadjaya, Prayogo Pangestu, dan Sofjan Wanandi, yang secara sengaja memanfaatkan hubungan itu untuk keuntungan pribadi.

Tercatat berbagai kasus *missmanagement* yang berbau korupsi mendera perusahaan-perusahaan milik negara, dari Pertamina hingga Bulog. Namun yang paling menjadi sorotan adalah bisnis keluarga Cendana.

Sejak awal tahun 70-an keterkaitan Ibu Tien dengan berbagai skandal bisnis telah menyeruak di kalangan masyarakat umum. Pada bulan September 1971, Kepala Polisi Hugeng Imam Santoso mengumumkan pembongkaran sindikat impor mobil-mobil mewah yang mendapat perlindungan tentara serta juga melibatkan nama Ibu Tien. Herannya, tidak berapa lama setelah mengumumkan kasus ini, Hugeng dicopot dari jabatannya (Elson, 2001: 376).

Memanfaatkan Yayasan Harapan Kita, Ibu Tien kemudian “memungut” sumbangan dari para pejabat daerah untuk digunakan mengembangkan proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dana miliaran yang dihabiskan untuk proyek ini dianggap oleh para mahasiswa sebagai sebuah pemborosan mengingat saat itu Indonesia termasuk dalam kategori negara miskin (Elson, 2001: 377). Menghadapi gelombang protes yang menyerang istrinya, Soeharto balik menuding para mahasiswa telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan politik.

Bisnis keluarga Cendana makin menjadi-jadi saat anak-anak Soeharto beranjak dewasa. Era 80-an merupakan titik awal petualangan mereka dalam membangun kerajaan bisnis. Tommy, putra bungsu Soeharto, adalah yang paling cekatan dalam bidang

bisnis ini. Tahun 1984 bersama kakaknya, Sigit Harjoyudanto, ia mendirikan kelompok Humpuss. Melalui koneksi, yang sebagian diperolehnya dari nama ayahnya, ia secara gigih melakukan lobi-lobi untuk menguasai kegiatan-kegiatan bisnis BUMN (Elson, 2001: 477). Segera setelah menguasai hak-hak Pertamina yang berkaitan dengan masalah distribusi, langkah Tommy menjadi tak tertahan-lagi.

Seperti tak mau kalah dari adiknya, Bambang Trihatmojo juga mendirikan Bimantara di tahun 1982. Usaha konglomerasi di bidang tanah, pembangunan hotel, monopoli ekspor (termasuk sebagian minyak dari Pertamina), serta monopoli impor plastik juga dijalani grup ini dengan sukses. Dan ketika Bambang Tri bermaksud bermain dalam bisnis komunikasi dengan mendirikan RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), pemerintah dengan entengnya “membuka jalan” mencabut larangan atas televisi komersial di tahun 1988.

Meskipun tidak semencolok kedua saudara laki-lakinya, Tutut juga menunjukkan “bakat”-nya dalam bidang bisnis. Bersama suami dan saudara-saudara perempuannya, ia mendirikan Citra Lamtoro Gung pada tahun 1983. Melalui wadah ini, Tutut banyak bermain di wilayah pembangunan jalan tol dan juga melakukan akuisisi TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang menggunakan secara gratis fasilitas TVRI (Elson, 2001: 478). Anak-anak Soeharto yang lain, umumnya berperan sebagai pemegang saham pasif dari perusahaan-perusahaan besar, seperti BCA (Bank Central Asia) milik Liem Sioe Liong ataupun perusahaan lainnya yang dimiliki oleh rekan ayahnya (Elson, 2001: 478).

Sebegitu dominannya bisnis putra-putri mahkota dari Cendana ini sehingga menimbulkan rasa keprihatinan yang tinggi, tidak hanya dari dalam negeri namun juga berasal dari luar negeri. Tokoh sekaliber Lee Kuan Yew (mantan perdana menteri yang kini menjadi Menteri Senior Singapura), juga pernah “cerewet” soal anak-anak Soeharto. Dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul

From Third World to First: The Singapore Story 1965-2000, Lee Kuan Yew berkomentar soal anak-anak Soeharto ini, utamanya di bidang bisnis. Lee pernah menasihati anak-anak mantan Presiden Soeharto agar mereka jangan menyalahgunakan posisi guna memperoleh keuntungan keuangan dan bisnis.

Yayasan-yayasan Soeharto

Banyak pihak yang percaya bahwa pilar-pilar kekayaan keluarga Cendana amat disokong oleh yayasan-yayasan yang didirikan oleh Soeharto. Yayasan-yayasan ini dicurigai telah mengembangkan sumber pendapatan yang tak resmi, di luar budget negara (atau dikenal dengan istilah dana non-bujeter) sehingga luput dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya. Sebagian dana lainnya diperoleh dari “sumbangan” pengusaha dan pejabat, serta potongan sosial dari gaji pegawai negeri yang jumlahnya tidak seberapa itu.

Wartawan senior Rosihan Anwar mencatat, setidaknya ada tujuh yayasan berkaitan dengan Soeharto, yaitu: (1) Yayasan Supersemar didirikan 16 Mei 1974 untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang pintar dari keluarga yang tidak berada, (2) Yayasan Trikora membantu para janda prajurit yang gugur dalam operasi di Irian Barat, (3) Yayasan Dharmais dibentuk 8 Agustus 1975 membantu rumah yatim piatu, kaum invalid, (4) Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila didirikan 17 Februari 1982 ditujukan untuk membangun masjid-masjid, (5) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab) memberi kredit kepada usaha kecil dan menengah, (6) Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam, dan (7) Yayasan Dana Sejahtera Diri (Damandiri) didirikan 15 Januari 1996 bertujuan mengurangi jumlah orang miskin.

Menurut Rosihan Anwar, dana-dana yang dikumpulkan oleh yayasan-yayasan tersebut kemudian disimpan di berbagai bank sebagai deposito. Yayasan menggunakan suku bunga dari de-

posito itu untuk mengoperasionalkan yayasan-yayasan sedangkan jumlah pokok dibiarkan tetap utuh. Dana abadi Yayasan Trikora diperkirakan berjumlah Rp 32,5 miliar dan didepositokan di tiga bank negara.

Berapa sebenarnya kekayaan keluarga Cendana ini tidak ada yang mengetahui secara pasti. Lee Kuan Yew menulis, “Wartawan Amerika, yang telah melaporkan dalam majalah *Forbes* bahwa keluarga Soeharto mempunyai aset 42 miliar dolar AS, mengatakan kepada saya di New York bulan Oktober 1998 bahwa sebagian besar dari kekayaan itu berada di Indonesia.”

Meski diserang sedemikian rupa, Soeharto seolah-olah tutup mata (juga telinga) atas laporan-laporan negatif di seputar bisnis orang-orang dekatnya. Pada akhirnya, ramalan Lee Kuan Yew pun terbukti, “Kelakuan anak-anak ini akhirnya ikut menyumbang kejatuhan ayah mereka.”

Sabtu Kelabu 27 Juli 1996

Entah disadari atau tidak, Soeharto yang menua mulai menunjukkan tanda-tanda kemerosotan kekuasaannya sejak tahun 1993. Golkar terlihat loyo, sementara makin banyak pihak yang berani menyuarakan ketidakpuasannya. Bahkan ia gagal “menggalkan” rencananya untuk menjadikan Habibie sebagai Wakil Presiden di tahun 1993 ini karena ABRI begitu ngotot memasukkan nama Try Sutrisno (yang berada di bawah pengawasan Benny Moerdani) sebagai calon utama untuk menyuarakan kepentingan mereka di kabinet setelah belakangan Soeharto cenderung untuk merapat ke pihak sipil (Elson, 2001: 522).

Di penghujung tahun 1993, Soeharto lagi-lagi gagal menghambat langkah Megawati Soekarnoputri untuk terpilih menjadi Ketua PDI. Calon yang digadang-gadang Soeharto untuk menduduki posisi itu, Soerjadi, gagal menghadang kerinduan massa terhadap sosok Soekarno. Tampaknya, naiknya Mega juga didukung oleh sebagian pihak militer yang kecewa atas pengangkatan Har-

moko (dari kalangan sipil) sebagai Ketua Umum Golkar (Elson, 2001: 524).

Dan pukulan psikologis terbesar bagi Soeharto datang pada tanggal 28 April 1996. Istri tercintanya wafat secara tiba-tiba (dan ini menimbulkan banyak kasak-kusuk yang beredar di tengah masyarakat). Orang mulai berhitung seberapa kuat Soeharto akan tetap bertahan di puncak kekuasaan tanpa sokongan dari istrinya?

Hanya tiga bulan setelah Ibu Tien wafat, terjadi kerusuhan yang dikenal orang dengan sebutan Sabtu Kelabu atau Peristiwa 27 Juli 1996. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 yang dikuasai oleh PDI Megawati, diserang oleh sekelompok massa (menurut Elson tak lain adalah “tukang pukul sewaan dan tentara”) yang mengatasnamakan diri mereka sebagai massa PDI Soerjadi (Elson, 2001: 548).

Dalam catatan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak lima orang tewas, 23 hilang, dan 149 luka-luka dalam peristiwa tersebut. Partai Rakyat Demokratik (PRD), organisasi prodemokrasi yang baru dideklarasikan tanggal 22 Juli 1996, harus menelan pil pahit menjadi kambing hitam dari peristiwa itu. Jaringan organisasi ini kemudian dibabat hingga ke akar karena dianggap representatif dari bahaya laten komunis.

Melalui aksi ini penguasa mungkin berharap “sekali tepuk dua musuh akan mati.” Namun di luar perhitungan, nama Megawati yang “teraniaya” semakin berkibar. Sebaliknya, wibawa Soeharto makin merosot. Di akhir tahun 1996 dan awal tahun 1997, muncul berbagai kerusuhan yang merongrong keamanan nasional. Anti-China merebak di Tasikmalaya dan Rengasdengklok. Sementara suku Dayak dan Madura saling bunuh di Kalimantan Barat. Sebuah pengantar bagi Soeharto untuk menuju akhir masa kekuasaannya di tahun 1998.

- 24 -

Jatuhnya Sang “Raja”

“Bila sudah tidak dipercaya, ya sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata,”
- Soeharto (Luhulima, 2005) -

SELAMA 32 tahun berkuasa di Indonesia, Soeharto telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang *untouchable*. Hampir tak ada yang dapat menggoyangkan kursi sang “Raja”. Walaupun ada tokoh yang berani muncul menyaingi pamornya, dapat dipastikan tokoh tersebut, tidak dalam waktu yang lama, akan tersingkir oleh upaya-upaya politik yang kadangkala dilakukan secara terang-terangan.

Dengan membangun jaringan-jaringan loyalis dalam pemerintahan dan diimbangi dengan jaminan pembangunan pondasi ekonomi keluarga (serta kroninya), Soeharto tak diragukan lagi telah begitu menikmati berjalan di atas rel kekuasaannya. Dan kekuasaannya yang hampir-hampir tak terbatas itu sepertinya akan berlangsung abadi sampai ketika krisis ekonomi menyerang ...

Reformasi 1998

Di mulai pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi telah menyebabkan harga-harga di dalam negeri melambung tinggi. Mahasiswa, elemen dalam masyarakat yang paling sering menyuara-

kan pendapat kritisnya, lalu memimpin gelombang protes di berbagai daerah. Mereka menuntut penurunan “harga”, yang sering pula diplesetkan menjadi “Harto dan Keluarga”. Para mahasiswa menuntut adanya reformasi pemerintahan yang bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Ketidakpuasaan para mahasiswa ini juga mungkin dipicu oleh penculikan rekan-rekan aktivis mereka yang hilang secara misterius sejak terjadinya peristiwa 27 Juli 1996.

Mencoba menyenangkan hati para mahasiswa, pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) pada tanggal 2 Mei 1998. Melalui serangkaian pemeriksaan, Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal Subagyo Hadisiswoyo mengungkapkan bahwa mantan Komandan Jenderal Kopassus Letjen Prabowo mengakui telah membuat kesalahan analisis terhadap Bawah Kendali Operasi (BKO). Prabowo dikabarkan menerima perintah BKO yang kemudian diterjemahkan oleh Tim Mawar (nama kelompok Kopassus yang terlibat dalam penculikan) untuk menculik dan menangkap para aktivis (Luhulima, 2005: 93).

Hal yang menjadi pertanyaan, siapakah yang telah memerintahkan BKO itu kepada Prabowo? Muncul kecurigaan perintah tersebut langsung diperoleh Prabowo dari Panglima Tertinggi, Soeharto. Dugaan ini muncul karena Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung mengakui tidak mengetahui adanya kasus penculikan tersebut.

Belakangan dari mulut Prabowo (tahun 1999) terungkap bahwa perintah BKO diterimanya dari KSAD Jenderal R. Hartono. Saat itu, menurut Prabowo, Hartono merupakan orang dekat Soeharto karena Presiden Soeharto sendiri sering merasa kesulitan untuk menghubungi Panglima ABRI (waktu itu) Jenderal Feisal Tanjung yang lebih sering berada di lapangan golf (Luhulima, 2005: 97).

Seperti tidak sadar akan sorotan yang sedang menimpanya, Soeharto yang secara resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia

pada bulan Maret 1998, melakukan tindakan “tidak wajar” dengan memasukkan nama putri sulungnya Tutut serta kawan bisnisnya Bob Hasan ke dalam susunan Kabinet Pembangunan VII. Praktik nepotisme yang terang-terangan di depan mata mahasiswa ini membuat gelombang demonstrasi semakin besar.

Dan seperti hendak menantang aksi mahasiswa, Soeharto pada tanggal 4 Mei 1998 mengambil kebijakan yang berlawanan dengan kehendak mahasiswa. Ia memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Para mahasiswa semakin gemas. Sepertinya “Pak Tua” (sebutan para mahasiswa buat Soeharto) menganggap sepi tuntutan mereka. Bahkan dengan tenang, Soeharto pada tanggal 9 Mei meninggalkan Indonesia menuju Kairo dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15.

Saat sedang berada di Kairo itulah terjadi perubahan situasi di Tanah Air. Pada tanggal 12 Mei, empat mahasiswa Trisakti yang baru saja selesai menjalankan aksi keprihatinan, tewas ditembak. Tidak jelas siapa yang melakukan penembakan. Namun para mahasiswa yang terlanjur marah kemudian bertekad untuk melakukan perlawanan. Ada isu yang mengatakan Amien Rais akan menggalang para mahasiswa menjalankan aksi sejuta massa (*people power*) untuk mendesak Soeharto mundur.

Di lain pihak, tragedi tewasnya para mahasiswa ini telah memicu aksi kekerasan massa, pengrusakan, pembakaran, penjarahan, hingga pemerkosaan terhadap warga negara keturunan Cina di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Tercatat kerusakan yang terjadi di Jakarta saja pada tanggal 13-15 Mei telah menelan sedikitnya 500 orang tewas, 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil hangus, dan 1.026 rumah penduduk hancur.

Banyak pengamat menduga Prabowo berada di balik terjadinya kerusakan ini (Elson, 2001: 562). Prabowo, dengan dibantu oleh teman-temannya seperti Syafrie Syamsuddin (Panglima Kodam

Jaya) dan Kivlan Zen, dituding sengaja merekayasa kerusakan untuk merusak kredibilitas Pangab Wiranto.

Kedua nama ini, Prabowo dan Wiranto, memang sejak lama telah menjadi rival dalam tubuh militer. Wiranto merasa bearing karena pada bulan-bulan akhir pemerintahan Soeharto, Prabowo pernah melaporkan dirinya membangkang pada Soeharto. Sementara menurut kelompok Prabowo, Wiranto harus segera diganti karena tidak becus mengatasi kerusakan (Pambudi, 2007: 90).

Perpecahan di tubuh militer ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi para mahasiswa. Mereka dengan leluasa menduduki Gedung DPR/MPR. Gedung tua itu nyaris tertutup oleh ribuan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah. Nasib pemerintahan Soeharto kini berada di ujung tanduk ...

Para Loyalis Meninggalkan Soeharto

Mendengar kabar keadaan Tanah Air, Soeharto yang sedang berada di Kairo pada tanggal 13 Mei menyiratkan keinginannya untuk mundur. "Sebetulnya, kalau masyarakat tidak memberi kepercayaan lagi, tidak apa-apa. Saya sendiri sudah mengatakan, bila sudah tidak dipercaya, ya sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata," ujar Soeharto, "Saya akan menjadi *pandhito*, mendekatkan diri pada Tuhan."

Pernyataan ini telah mengubah arah angin. Mereka yang menuntut reformasi semakin bersemangat untuk mewujudkan cita-citanya. Sementara itu, kawan-kawan dekat Soeharto mulai merasa bahwa mungkin saja ini merupakan akhir dari Soeharto.

Kepulangan Soeharto pada tanggal 15 Mei 1998 bertujuan untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Namun apa daya, sambutan dalam negeri benar-benar di luar dugaan. Menteri Pariwisata Abdul Latief mengajukan pengunduran diri karena alasan tekanan dari keluarga. Pada tanggal 18 Mei, Ketua DPR/MPR Harmoko, yang selama ini menjadi "anak emas" Soeharto, membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan. Bersama Syarwan Hamid,

ketua Fraksi ABRI di parlemen, Harmoko menuntut pengunduran diri Soeharto. Para loyalis mulai meninggalkan Soeharto. Para mahasiswa menyambut gembira berita ini.

Inpres No. 16 Tahun 1998: Serupa dengan Supersemar?

Dalam sebuah peperangan, haram hukumnya menampilkan kelemahan. Dengan pertimbangan itulah, kelompok loyalis yang tersisa, dengan dipimpin oleh Wiranto berupaya melakukan netralisasi atas pernyataan Ketua MPR/DPR. Hanya beberapa jam dari pengumuman Harmoko, Wiranto menyatakan, "... pernyataan pimpinan DPR RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan secara kolektif" (Luhulima, 2005: 151).

Pada hari yang sama, Soeharto melakukan sebuah upaya terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia mengeluarkan Inpres No. 16 Tahun 1998 yang isinya memberikan kewenangan kepada Panglima ABRI Wiranto untuk mengambil segala tindakan pengamanan yang dianggap perlu apabila situasi berubah menjadi *chaos* dan tidak terkendali.

Banyak pihak yang membandingkan penyerahan mandat itu dengan Supersemar yang diterima Soeharto dari Soekarno di tahun 1966. Wiranto, dengan menggunakan Inpres itu, dapat memberlakukan situasi darurat militer. Hal ini diakui sendiri oleh Wiranto, "Saat itu mandat diteruskan kepada saya. Maka saya bisa mendesak pada Presiden untuk memberlakukan SOB (*staat van oorlog en beleg*) atas negara, dan saya ambil alih kepemimpinan. Namun saya sadar kalau itu dilakukan, maka korban yang jatuh akan sangat besar" (Luhulima, 2005: 156).

Besar kemungkinan dengan menyerahkan mandat tersebut Soeharto yang putus asa bermaksud menyerahkan segala keputusan (juga nasibnya) kepada Wiranto. Reaksi Wiranto saat menerima mandat itu sangat menentukan jalan peristiwa berikutnya. Ia ternyata lebih memilih jalan konstitusi dengan memberikan du-

kungan terhadap penyerahan kekuasaan dari Soeharto kepada Wakil Presiden Habibie. Andai saja Wiranto mengambil keputusan yang berbeda saat itu, mungkin sejarah akan berubah.

Soeharto Curiga Ada Kudeta

Satu per satu orang kepercayaannya meninggalkan dirinya. Soeharto yang dulunya dikenal sebagai pemimpin yang berpembawaan tenang dan murah senyum itu, menjelang keruntuhannya menyerupai seorang “paranoid”. Kehilangan teman-teman setianya membuat Soeharto percaya ada kudeta yang sedang diatur untuk menjatuhkannya. Masalahnya, siapa yang mengatur kudeta itu?

Ketika upaya terakhirnya melalui Inpres No. 16 Tahun 1998 gagal, Soeharto yang melemah lalu mencoba melunakkan aksi protes dengan menjanjikan akan adanya pembentukan Kabinet Reformasi. Melalui Mensesneg Saadillah Mursjid pemerintah mengumumkan akan adanya pembentukan Komite Reformasi pada tanggal 21 Mei.

Namun dalam menjalankan rencananya, hampir tak ada tokoh yang bersedia bergabung dalam komite tersebut. Jelas sudah Soeharto telah ditinggalkan. Bahkan pada malam tanggal 20 Mei, Soeharto menerima surat pernyataan dari ke-14 menteri (dipimpin oleh Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita) yang menyatakan tidak bersedia dilibatkan lagi dalam kabinet yang di-*reshuffle* oleh Soeharto. Soeharto tahu tak mungkin lagi, dalam waktu yang demikian sempit, dapat membentuk Komite Reformasi. Ini berarti ia harus mundur.

Malam itu juga Yusril Ihza Mahendra diperintahkan untuk menyiapkan naskah pengunduran diri Soeharto yang akan dibacakan keesokan harinya. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto membacakan naskah tersebut dan secara resmi meletakkan jabatannya sebagai presiden. B.J. Habibie lalu diangkat sumpah untuk menggantikannya.

Akhirnya Soeharto benar-benar mundur. Di balik pengunduran diri tersebut, tersiar kabar Soeharto memendam kecurigaan terhadap Habibie. Soeharto memperkirakan Habibie adalah dalang pengunduran diri Menko Ekuin dan ke-14 menteri lainnya (Pambudi, 2007: 51). Hal ini mungkin didasarkan pada pertemuan yang diselenggarakan Habibie pada malam itu dengan para menteri (sesaat setelah mereka mengundurkan diri) di Jalan Kuningan tempat kediaman sang Wapres.

Kecurigaan ini membuat Soeharto mendiamkan Habibie pada pagi hari sebelum naskah pengunduran diri dibacakan. Saat itu Soeharto melintas di depan Habibie tanpa menyapanya. Mengenai hal ini, Habibie bercerita, “Betapa sedih perasaan saya saat itu. Saya hanya melangkah ke ruang upacara mendampingi Presiden Soeharto, seseorang yang saya sangat hormati, cintai, dan kagumi, yang ternyata menganggap saya seperti tidak ada.” Kabarinya, hingga kini Soeharto masih belum mau berbicara dengan Habibie.

Dari kisah Sumitro Djojohadikusumo (ayahanda Prabowo), juga dikabarkan bahwa Soeharto memendam prasangka buruk terhadap Prabowo dan Habibie. Mereka berdua telah disangka membuat sebuah persekongkolan untuk menjatuhkan tahta Soeharto (Luhulima, 2005: 135). Kabarinya Cendana marah mengapa Prabowo membiarkan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR. Mereka curiga hal itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menumbangkan sang “Raja”.

Pasca-Soeharto Mundur

Setelah Soeharto mundur, banyak pihak yang berharap agar beberapa kabut misteri dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi semasa Orde Baru berkuasa, akan terbuka. Pada kenyataannya, mundurnya (atau jatuhnya) Soeharto dari kekuasaan justru semakin menambah banyaknya pertanyaan yang tak terjawab dari masalah-masalah seputar kehidupan politik Indonesia.

Hingga sekarang belum terungkap siapa dalang di balik penembakan mahasiswa Trisakti dan juga kerusuhan anti-China yang terjadi setelahnya. Padahal kedua peristiwa tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar bagi keruntuhan rezim Soeharto. Dan bila benar “Kudeta Camdessus” dirancang untuk menggulingkan Soeharto, siapakah yang menjadi kepanjangan tangan pihak asing dalam menjalankan misinya itu? Apakah ada dari pihak militer yang terlibat?

Tampaknya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pengamat luar, “Di negeri ini kebenaran tidak akan pernah menampakkan wajahnya”. Sejarah tetap saja terselubungi oleh kabut tebal misteri. Dan Soeharto, menjadi salah satu bagian dari kisah misteri itu ...

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulgani-Knapp, Retnowati, *Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President*, Singapore: Marshall Cavendish International 2007
- Cahyono, Heru, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986
- Djarot, Eros, dkk., *Siapa Sebenarnya Soeharto*, Jakarta: Media Kita, 2006
- Dwipayana, G., dan Ramadhan, K.H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989
- Elson, R.E., *Suharto: Sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Minda, 2001
- Harsutejo, G 30 S: *Sejarah yang Digelapkan*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003
- Lesmana, Surya, dkk. (ed.), *Saksi dan Pelaku Gestapu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005
- Luhulima, James, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*, Jakarta: Kompas, 2005
- Pambudi, A., *Supersemar Palsu*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006
- Pambudi, A., *Kontroversi "Kudeta" Prabowo*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007
- Redaksi Hasta Mitra, *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G 30 S – 1965*, Jakarta: Hasta Mitra, 2002
- Reksosamudra, R. Pranoto, *Memoar Mayor Jenderal Raden Pranoto*, Yogyakarta: Syarikat Indonesia: 2002
- Roeder, O.G., *The Smiling General*, Jakarta: Gunung Agung Ltd., 1969
- Scott, Peter Dale, *Peran CIA Dalam Penggulingan Sukarno*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1999
- SESKOAD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta*, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989
- Tim PDAT, *Perjalanan Hidup A.H. Nasution*, Jakarta: Grafitipers, 1998

Website

- www.kompas.com
- www.pikiranrakyat.com
- www.sinarharapan.co.id
- www.tokohindonesia.com
- <http://www.geocities.com/capitolhill/4120/soeharto.html>